

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menjaga kualitas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan; b. bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal provinsi; c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;	Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menjaga kualitas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan; b. bahwa beberapa peraturan perundang-undangan baru terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan telah ditetapkan, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);</p> <p>13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p> <p>14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39), diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Di antara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 3a, 3b, 3c, 3d, dan 3e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah kegiatan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 5. Hari adalah hari kerja. 6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 9. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta. 10. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah kegiatan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 3a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 3b. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 3c. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 3d. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. 3e. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan. 4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 5. Hari adalah hari kerja. 6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah kegiatan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 2. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 6. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 9. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 10. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 11. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. 12. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>
	<p>8. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.</p> <p>9. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>10. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p>	<p>13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p> <p>14. Hari adalah hari kerja.</p> <p>15. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>16. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>17. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.</p> <p>18. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p>
<p>Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan memberikan landasan hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>
	<p>2. Ketentuan ayat 1 Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pendelegasian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI; b. Perizinan Berusaha Non KBLI; c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan d. Nonperizinan. (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (5) Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha. (6) Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko. (7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (8) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan berdasarkan: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan b. delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pendelegasian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI; b. Perizinan Berusaha Non KBLI; c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan d. Nonperizinan. (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (5) Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha. (6) Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko. (7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (8) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI dan Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
(2) Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI dan Nonperizinan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
BAB III KEWAJIBAN		
Pasal 6 Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib: a. menjamin kelancaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat; b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah Teknis; c. menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan baik secara berkala atau insidental kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Teknis.	Tetap	Tetap
		2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN		
Pasal 7 Perizinan yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS maupun aplikasi yang tersedia akan dilayani secara manual.	Tetap	Pasal 7 Perizinan dan nonperizinan yang belum terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan/atau belum dapat dilayani melalui sistem OSS atau sistem aplikasi lain akan dilayani secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 8 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>
	<p>3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan huruf B Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; b. Ketentuan huruf D Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor ESDM; c. Ketentuan huruf E Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; d. Ketentuan huruf H Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; e. Ketentuan huruf J Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; dan f. Ketentuan huruf K1 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan. <p>diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>3. Ketentuan huruf C tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan ketentuan huruf D tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Esdm sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.</p>
	<p>4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>4. Ketentuan Jenis Perizinan Non Berusaha Non Kbli dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 39) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 9 Desember 2021</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Agustus 2022</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 19 September 2023</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Desember 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>ttd.</p> <p>R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>ttd.</p> <p>R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 September 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>ttd.</p> <p>BENY SUHARSONO</p>
<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 116</p>	<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 39</p>	<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 38</p>
<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p>ttd.</p> <p><u>ADIBAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p>ttd.</p> <p><u>ADIBAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p>ttd.</p> <p><u>ADIBAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>																																																																															
<p>LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</p>	<p>LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</p>	<p>LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</p>																																																																															
<p>A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <table border="1" data-bbox="96 830 1050 1427"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th colspan="3">BIDANG USAHA</th> <th colspan="3">RISIKO</th> <th rowspan="3">PERIZINAN BERUSAHA</th> <th rowspan="3">JANGKA WAKTU</th> <th rowspan="3">MASA BERLAKU</th> <th colspan="2">KEPERANGAN PERATURAN</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">KODE KBL</th> <th rowspan="2">JUDUL KBL</th> <th rowspan="2">RUANG LINGKUP AKTIVITAS</th> <th colspan="2">PARAMETER RISIKO</th> <th rowspan="2">TINGKAT RISIKO</th> <th rowspan="2">PARAMETER</th> <th rowspan="2">KEWENANGAN</th> </tr> <tr> <th>SKALA USAHA</th> <th>LUAS LAHAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">03111</td> <td rowspan="2">Pemasangan piring/ ikan bersip di laut</td> <td rowspan="2">sejarah</td> <td>rendah</td> <td>NA</td> <td>rendah/moder</td> <td rowspan="2">NB dan sertifikat standar</td> <td rowspan="2">NA</td> <td rowspan="2">sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan</td> <td>sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut</td> <td rowspan="2">Gubernur</td> </tr> <tr> <td>level menengah dan besar</td> <td>NA</td> <td>tinggi</td> <td>NB, iku (tan sertifikat standar)</td> <td>7 hari</td> <td>1 tahun</td> <td>ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">03112</td> <td rowspan="2">pangeangkapan crustacea di laut</td> <td rowspan="2">sejarah</td> <td>rendah</td> <td>NA</td> <td>rendah/moder</td> <td rowspan="2">NB dan sertifikat standar</td> <td rowspan="2">NA</td> <td rowspan="2">sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan</td> <td>sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut</td> <td rowspan="2">Gubernur</td> </tr> <tr> <td>level menengah dan besar</td> <td>NA</td> <td>tinggi</td> <td>NB, iku (tan sertifikat standar)</td> <td>7 hari</td> <td>1 tahun</td> <td>ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">03113</td> <td rowspan="2">pangeangkapan mollusca di laut</td> <td rowspan="2">sejarah</td> <td>rendah</td> <td>NA</td> <td>rendah/moder</td> <td rowspan="2">NB dan sertifikat standar</td> <td rowspan="2">NA</td> <td rowspan="2">sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan</td> <td>sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut</td> <td rowspan="2">Gubernur</td> </tr> <tr> <td>level menengah dan besar</td> <td>NA</td> <td>tinggi</td> <td>NB, iku (tan sertifikat standar)</td> <td>7 hari</td> <td>1 tahun</td> <td>ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya</td> </tr> </tbody> </table>	NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEPERANGAN PERATURAN		KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP AKTIVITAS	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN	1	03111	Pemasangan piring/ ikan bersip di laut	sejarah	rendah	NA	rendah/moder	NB dan sertifikat standar	NA	sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan	sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut	Gubernur	level menengah dan besar	NA	tinggi	NB, iku (tan sertifikat standar)	7 hari	1 tahun	ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya	2	03112	pangeangkapan crustacea di laut	sejarah	rendah	NA	rendah/moder	NB dan sertifikat standar	NA	sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan	sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut	Gubernur	level menengah dan besar	NA	tinggi	NB, iku (tan sertifikat standar)	7 hari	1 tahun	ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya	3	03113	pangeangkapan mollusca di laut	sejarah	rendah	NA	rendah/moder	NB dan sertifikat standar	NA	sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan	sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut	Gubernur	level menengah dan besar	NA	tinggi	NB, iku (tan sertifikat standar)	7 hari	1 tahun	ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
NO		BIDANG USAHA			RISIKO						PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU				MASA BERLAKU	KEPERANGAN PERATURAN																																																																
		KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP AKTIVITAS	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN																																																																			
	SKALA USAHA				LUAS LAHAN																																																																												
1	03111	Pemasangan piring/ ikan bersip di laut	sejarah	rendah	NA	rendah/moder	NB dan sertifikat standar	NA	sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan	sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut	Gubernur																																																																						
				level menengah dan besar	NA	tinggi				NB, iku (tan sertifikat standar)		7 hari	1 tahun	ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya																																																																			
2	03112	pangeangkapan crustacea di laut	sejarah	rendah	NA	rendah/moder	NB dan sertifikat standar	NA	sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan	sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut	Gubernur																																																																						
				level menengah dan besar	NA	tinggi				NB, iku (tan sertifikat standar)		7 hari	1 tahun	ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya																																																																			
3	03113	pangeangkapan mollusca di laut	sejarah	rendah	NA	rendah/moder	NB dan sertifikat standar	NA	sistem evaluasi usaha pangeangkapan ikan	sampai dengan jumlah 5 07 atau tidak menggunakan kapal. Wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administratifnya dan di atas 12 mil laut	Gubernur																																																																						
				level menengah dan besar	NA	tinggi				NB, iku (tan sertifikat standar)		7 hari	1 tahun	ditas 5 07 sampai dengan 30 07 sampai dengan 12 mil laut di wilayah administratifnya																																																																			

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG UTAMA			REBRO			PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JURUSAN KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER REBRO	KEAD. LAYAN	TINGKAT REBRO				PARAMETER	KEWENANGAN
4	03115	penyngkapan/ pengontrolan usaha/ usaha di laut	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi dan di atas 12 mil laut	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB, izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	batas 5 07 sampai dengan 10 07. Sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi	
5	03116	penyngkapan air/air permukaan di laut	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi dan di atas 12 mil laut	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB, izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	batas 5 07 sampai dengan 10 07. Sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi	
6	03117	penyngkapan/contohnya di laut	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi dan di atas 12 mil laut	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB, izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	batas 5 07 sampai dengan 10 07. Sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi	
7	03118	penyngkapan ikan laut	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi dan di atas 12 mil laut	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB, izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	batas 5 07 sampai dengan 10 07. Sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi	

NO	BIDANG UTAMA			REBRO			PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JURUSAN KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER REBRO	KEAD. LAYAN	TINGKAT REBRO				PARAMETER	KEWENANGAN
8	03119	penyngkapan ikan air tawar/ di laut	seluruh	rekursi/kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi dan di atas 12 mil laut	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB, izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	batas 5 07 sampai dengan 10 07. Sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi	
9	03121	penyngkapan (air/air) laut/air di perairan dalam	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan (dan) di wilayah administrasi	
10	03122	Penyngkapan/contohnya di perairan dalam	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan (dan) di wilayah administrasi	
11	03123	Penyngkapan/contohnya di perairan dalam	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan (dan) di wilayah administrasi	

NO	BIDANG UTAMA			REBRO			PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JURUSAN KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER REBRO	KEAD. LAYAN	TINGKAT REBRO				PARAMETER	KEWENANGAN
8	03119	penyngkapan ikan air tawar/ di laut	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi dan di atas 12 mil laut	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB, izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	batas 5 07 sampai dengan 10 07. Sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasi	
9	03121	penyngkapan (air/air) laut/air di perairan dalam	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan (dan) di wilayah administrasi	
10	03122	Penyngkapan/contohnya di perairan dalam	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan (dan) di wilayah administrasi	
11	03123	Penyngkapan/contohnya di perairan dalam	seluruh	rekursi	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama realisasinya usaha penyngkapan ikan	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan negara republik Indonesia di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin (dan sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sampai dengan kearifan 5 07 atau lebih menggunakan kapal. Wilayah pengontrolan perikanan (dan) di wilayah administrasi	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG UMUM			RUMAH			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JURDIK. KBLI	STATUS LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RUMAH SAKILA UMUM	LIJAN LAYAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KWENANGAN
12	03124	Perangkoan/ pengembalian Pasokan air di perantara dasar	selektif	tidak	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama melakukan usaha penangkapan ikan	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain (+ sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	
13	03125	Perangkoan/ pengembalian (air) Bawah (tan di perantara dasar)	selektif	tidak	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama melakukan usaha penangkapan ikan	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain (+ sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	
14	03126	Perangkoan (tan. Man di perantara dasar)	selektif	tidak	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama melakukan usaha penangkapan ikan	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain (+ sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	
15	03129	Perangkoan (tan. air) Labaya di perantara dasar	selektif	tidak	NA	esensial rendah	NIB dan standar	NA	selama melakukan usaha penangkapan ikan	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	Gubernur
				kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain (+ sertifikasi standar)	7 hari	1 tahun	sempai dengan kearifan 5 OT atau lebih menggunakan kapal. Perantara dasar di wilayah administrasi	
16	03133	jenis jasa perantara penangkapan ikan di laut	selektif	esensial dan besar	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	berlaku selama pelaku menggunakan anggaran standar	penetapan modal dalam rangai (PMTB), sebagai petunjuk	Gubernur
17	03145	jenis jasa perantara penangkapan ikan di darat	selektif	esensial dan besar	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	berlaku selama pelaku melakukan kegiatan usaha	penetapan modal dalam rangai (PMTB), sebagai petunjuk	Gubernur

NO	BIDANG UMUM			RUMAH			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JURDIK. KBLI	STATUS LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RUMAH SAKILA UMUM	LIJAN LAYAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KWENANGAN
18	03211	sambutan pener/ atau penyerta lain	selektif	tidak dan kecil	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	di luar sempai dengan 12 sd yang menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual, di kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur
				esensial dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
19	03212	penjualan ikan laut	selektif	tidak dan kecil	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	tidak usaha berata di dalam satu provinsi, menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual,	Gubernur
				esensial dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
20	03213	budidaya ikan air tawar	selektif	tidak dan kecil	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	tidak usaha berata di dalam satu daerah kabupaten/ kota, menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual,	Gubernur
				esensial dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
21	03214	budidaya burung (air)	selektif	tidak dan kecil	NA	esensial rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	di luar sempai dengan 12 sd yang menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual, di kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur
				esensial dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USHAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUNAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE BKD	JUDUL BKD	KUOR/LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	KLAS LAMBA					PARAMETER	KEWENANGAN
22	02215	pendaftaran usaha kecil	selektif	risiko dan kecil	NA	menengah rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	di luar waktu dengan 12 ml yang menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual di kawasan komersial yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			
23	02216	pendaftaran perusahaan kecil	selektif	risiko dan kecil	NA	menengah rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku menggunakan kegiatan usaha	di luar waktu dengan 12 ml yang menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual di kawasan komersial yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			
24	02217	pendaftaran perusahaan di luar	selektif	risiko dan kecil	NA	menengah rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	di luar waktu dengan 12 ml yang menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual di kawasan komersial yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			
25	02219	tradisional kecil dan menengah	selektif	risiko dan kecil	NA	menengah rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	di luar waktu dengan 12 ml yang menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual di kawasan komersial yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			
26	02221	pendaftaran dan sertifikasi di bidang	selektif	risiko dan kecil	NA	Menengah Rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	waktu usaha berlaku di dalam satu daerah kabupaten/ kota. Menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual.	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			

NO	BIDANG USHAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUNAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE BKD	JUDUL BKD	KUOR/LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	KLAS LAMBA					PARAMETER	KEWENANGAN
27	02222	pendaftaran dan sertifikasi di bidang	selektif	risiko dan kecil	NA	Menengah Rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	waktu usaha berlaku di dalam satu daerah kabupaten/ kota. Menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual.	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			
28	02224	pendaftaran dan sertifikasi di bidang	selektif	risiko dan kecil	NA	Menengah Rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	waktu usaha berlaku di dalam satu daerah kabupaten/ kota. Menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual.	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			
29	02225	tradisional dan menengah di luar	selektif	risiko dan kecil	NA	Menengah Rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	waktu usaha berlaku di dalam satu daerah kabupaten/ kota. Menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual.	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			
30	02226	pendaftaran dan sertifikasi di luar	selektif	risiko dan kecil	NA	Menengah Rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	waktu usaha berlaku di dalam satu daerah kabupaten/ kota. Menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual.	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			

NO	BIDANG USHAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUNAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE BKD	JUDUL BKD	KUOR/LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	KLAS LAMBA					PARAMETER	KEWENANGAN
31	02227	pendaftaran dan sertifikasi di bidang	selektif	risiko dan kecil	NA	Menengah Rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	Berlaku selama berlaku untuk pendaftaran kegiatan usaha	waktu usaha berlaku di dalam satu daerah kabupaten/ kota. Menggunakan teknologi sederhana, semi otomatis dan manual.	Daerah
				menengah dan besar	NA	Menengah Tinggi	NB dan sertifikasi standar	3 hari			

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	SIBERANG UJUMBA			RESEK		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUMAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAYANAN						
21	02227	perencanaan dan air tanah di kawasan jalur tengah	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
22	02229	kegiatan dan air tanah di media lainnya	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
23	02251	perencanaan pesisir / ikan laut di air payau	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
24	02252	perencanaan dan air payau	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			

NO	SIBERANG UJUMBA			RESEK		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUMAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAYANAN						
25	02253	perencanaan reklamasi air payau	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
26	02254	perencanaan reklamasi air payau	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
27	02255	perencanaan reklamasi air payau	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			
28	02259	kegiatan dan air payau	seluruh	ukuran dan bentuk	NA	Meringah Rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	Definitif selama berlaku, tetapi memperhatikan kegiatan usaha	Isuasi usaha beresita di dalam satu daerah kabupaten/kota. Mengembangkan teknologi sederhana, semi otomatis, dan manual.	Gubernur
				menengah dan besar	NA	Meringah Tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari			

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	SIBARU USARA			REBUKO		PERUBAHAN EKSKORAPAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE BKD	JUDUL BKD	RUANG LINGKUP KEBERATAN	PARAMETER REBUKO SILAS USARA	TINGKAT REBUKO LUAS LAKUK				PARAMETER	KETERANGAN	
39	08900	struktur gambar	kawasan produktif gambar	memangkas	lebih dari 100 sampai dengan 500 hektar	tinggi	ND dan foto	17 hari	10 tahun	selektif	Diutamakan
				kecil	15 sampai dengan 100 hektar	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	17 hari	10 tahun	selektif	Diutamakan
40	10311	Indikator pengamatan/pengawasan dan	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
41	10312	Indikator pengamatan/pengawasan dan	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
42	10313	Indikator pemeliharaan dan	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
43	10314	Indikator pemeliharaan dan	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
44	10315	Indikator peragaan/ formasi dan	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
45	10316	Indikator berhadir diang (manajemen dan sarana)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
46	10317	Indikator pemeliharaan/ pengamatan dan	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan

NO	SIBARU USARA			REBUKO		PERUBAHAN EKSKORAPAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE BKD	JUDUL BKD	RUANG LINGKUP KEBERATAN	PARAMETER REBUKO SILAS USARA	TINGKAT REBUKO LUAS LAKUK				PARAMETER	KETERANGAN	
47	10319	Indikator pengamatan dan pengawasan lokasi usaha dan	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
48	10321	Indikator pengamatan dan pengawasan (tan dan lahan) atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
49	10322	Indikator pengamatan dan pengawasan (tan dan lahan) atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
50	10391	Indikator pengamatan/pengawasan (tan dan lahan) atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
51	10392	Indikator pengamatan/pengawasan (tan dan lahan) atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
52	10393	Indikator pemeliharaan/ atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
53	10394	Indikator pemeliharaan/ atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
54	10395	Indikator pemeliharaan/ atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah Rendah	ND dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan
55	10396	Indikator pemeliharaan/ atau (lahan) atau (lahan) atau (lahan)	selektif	memangkas dan besar	NA	Menengah tinggi	ND dan verifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melanjutkan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMDN), wilayah istimewa	Diutamakan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	SIHARI UMUM		BILANG LINGKUP KEBERATAN	MOSOK		TINGKAT MOSOK	PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BELAKU	KEPERANGAN PERUBAHAN	
	KODE BKU	JUDUL BKU		SKALA USUKA	LUAS LUKAN					PARAMETER MOSOK	
										PARAMETER	KEWENANGAN
50	10207	dukungi pendirian/ perizinan tata air tenaga	selemb	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur
51	10208	dukungi pendirian/ ragn besar	selemb	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur
52	10209	dukungi perubahan dan pengisian tenaga listrik	selemb	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur
53	10414	dukungi ragn besar	selemb	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur
61	10779	dukungi produk teknik listrik	selemb dan besar	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur
61	10784	dukungi produk, ragn, produk, dan layanan	selemb dan besar	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur
62	30001	perencanaan, pengujian dan penyusunan arsitektur	selemb	selemb	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	17 hari	10 tahun	yang berada di perizinan penerbit dan penerbit-penerbit baru dalam kewenangan nasional	Gubernur

NO	SIHARI UMUM		BILANG LINGKUP KEBERATAN	MOSOK		TINGKAT MOSOK	PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BELAKU	KEPERANGAN PERUBAHAN	
	KODE BKU	JUDUL BKU		SKALA USUKA	LUAS LUKAN					PARAMETER MOSOK	
										PARAMETER	KEWENANGAN
63	30002	perencanaan dan penyusunan arsitektur	selemb	selemb	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	17 hari	10 tahun	yang berada di perizinan penerbit dan penerbit-penerbit baru dalam kewenangan nasional	Gubernur
64	43120	perizinan lahan	selemb	selemb	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	17 hari	3 tahun	yang berada di perizinan penerbit dan penerbit-penerbit baru dalam kewenangan nasional	Gubernur
65	40206	pendirian besar unit pembuat	selemb	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur

NO	SIHARI UMUM		BILANG LINGKUP KEBERATAN	MOSOK		TINGKAT MOSOK	PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BELAKU	KEPERANGAN PERUBAHAN	
	KODE BKU	JUDUL BKU		SKALA USUKA	LUAS LUKAN					PARAMETER MOSOK	
										PARAMETER	KEWENANGAN
66	40206	pendirian besar unit pembuat	selemb	selemb dan besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha	peraturan model dalam ragn (PMDN), wilayah provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG URBAN			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEWAJIBAN	PARAMETER RISIKO SILANG URBAN	KLAS LAYANAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
66	46134	pendelegasian besar hasil ulah pertanian	selektif	memangkas dan besar	NA	Memangkas tinggi	NID dan verifikasi standar	5 hari	berlaku selama berlaku usaha merupakan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMND), wilayah provinsi	Gubernur
67	47215	pendelegasian resmi hasil pertanian	selektif	memangkas dan besar	NA	memangkas rendah	NID dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku usaha merupakan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMND), wilayah provinsi	Gubernur
68	47245	pendelegasian resmi dagang dan lain-lain	selektif	memangkas dan besar	NA	memangkas rendah	NID dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku usaha merupakan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMND), wilayah provinsi	Gubernur
69	47355	pendelegasian resmi dan lain-lain	selektif	memangkas dan besar	NA	memangkas rendah	NID dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku usaha merupakan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMND), wilayah provinsi	Gubernur
70	47754	pendelegasian resmi jabatan dan lain-lain	selektif	memangkas dan besar	NA	memangkas rendah	NID dan verifikasi standar	NA	berlaku selama berlaku usaha merupakan kegiatan usaha	penanaman modal dalam negeri (PMND), wilayah provinsi	Gubernur

NO	BIDANG URBAN			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEWAJIBAN	PARAMETER RISIKO SILANG URBAN	KLAS LAYANAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
71	50133	kegiatan luar dalam negeri untuk barang khusus	selektif	tidak	NA	memangkas rendah	NID dan standar	NA	selama berlaku usaha merupakan kegiatan usaha	sampai dengan kearifan 5 GT, wilayah pemerintahan provinsi kabupaten/kota/ kota	Ditentukan
72	50222	kegiatan energi dan lain-lain untuk barang khusus	tidak	NA	Memangkas Rendah	NID dan standar	NA	selama berlaku usaha merupakan kegiatan usaha	sampai dengan kearifan 5 GT, wilayah pemerintahan provinsi kabupaten/kota/ kota	Ditentukan	
			tidak dan memangkas	NA	tinggi	NID dan verifikasi standar	7 hari	1 tahun	sampai dengan 5 GT, Perak atau Perak di dalam kabupaten/kota/ kota	Ditentukan	
73	74999	kegiatan profesional, bisnis, dan lain-lainnya YNI	selektif	tidak	NA	Tinggi	NID dan lain	14 hari	2 tahun	yang berada di perizinan primer dan primer-grafis/ lokal untuk kewenangan nasional	Ditentukan
74	91039	aktivitas kearsifan dan lain-lainnya	selektif	tidak	NA	tinggi	NID, lain dan verifikasi standar	17 hari	20 tahun	kewenangan kearsifan daerah	Ditentukan
75	91249	kegiatan bisnis lainnya	selektif	tidak	NA	tinggi	NID dan lain	17 hari	20 tahun	yang berada di perizinan primer dan primer-grafis/ lokal untuk kewenangan nasional	Ditentukan

NO	BIDANG URBAN			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEWAJIBAN	PARAMETER RISIKO SILANG URBAN	KLAS LAYANAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
76	93249	kegiatan bisnis lainnya	selektif	tidak	NA	tinggi	NID dan lain	17 hari	20 tahun	yang berada di perizinan primer dan primer-grafis/ lokal untuk kewenangan nasional	Ditentukan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
1	01191	pertanian tanaman pakan ternak	budidaya tanaman pakan ternak	kecil	<25 Ha	Rendah	NIB	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				menengah dan besar	>25 Ha	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
2	01192	perbibitan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula)	seluruh	seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
3	01411	pembibitan dan budidaya sapi potong	pembibitan sapi potong	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya sapi potong	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
4	01412	pembibitan dan budidaya sapi perah	pembibitan sapi perah	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya sapi perah	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
5	01413	pembibitan dan budidaya kerbau potong	pembibitan kerbau potong	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya kerbau potong	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
6	01414	pembibitan dan budidaya kerbau perah	pembibitan kerbau perah	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya kerbau perah	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
7	01450	peternakan babi	pembibitan dan budidaya babi	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
8	01461	budi daya ayam ras pedaging	budi daya ayam ras pedaging	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
9	01462	budi daya ayam ras petelur	budi daya ayam ras petelur	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
10	01463	pembibitan ayam lokal dan perisanganya	pembibitan ayam lokal	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
11	01464	budi daya ayam lokal dan perisanganya	budi daya ayam lokal dan perisanganya	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
12	01465	pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek	pembibitan itik dan/atau bebek	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budi daya itik dan/atau bebek	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
13	01466	pembibitan dan budidaya burung puyuh	pembibitan dan budidaya burung puyuh	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
14	01468	pembibitan ayam ras perisang dan petelur	pembibitan ayam ras perisang dan petelur	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
15	01623	peternakan telur	pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
1	01191	pertanian tanaman pakan ternak	budidaya tanaman pakan ternak	kecil	<25 Ha	Rendah	NIB	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				menengah dan besar	>25 Ha	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
2	01192	perbibitan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula)	seluruh	seluruh	NA	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
3	01411	pembibitan dan budidaya sapi potong	pembibitan sapi potong	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya sapi potong	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
4	01412	pembibitan dan budidaya sapi perah	pembibitan sapi perah	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya sapi perah	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
5	01413	pembibitan dan budidaya kerbau potong	pembibitan kerbau potong	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya kerbau potong	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
6	01414	pembibitan dan budidaya kerbau perah	pembibitan kerbau perah	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budidaya kerbau perah	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
7	01450	peternakan babi	pembibitan dan budidaya babi	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
8	01461	budi daya ayam ras pedaging	budi daya ayam ras pedaging	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
9	01462	budi daya ayam ras petelur	budi daya ayam ras petelur	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
10	01463	pembibitan ayam lokal dan perisanganya	pembibitan ayam lokal	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
11	01464	budi daya ayam lokal dan perisanganya	budi daya ayam lokal dan perisanganya	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
12	01465	pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek	pembibitan itik dan/atau bebek	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
				budi daya itik dan/atau bebek	besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota
13	01466	pembibitan dan budidaya burung puyuh	pembibitan dan budidaya burung puyuh	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
14	01468	pembibitan ayam ras perisang dan petelur	pembibitan ayam ras perisang dan petelur	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
15	01623	peternakan telur	peternakan telur	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan izin	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
14	01468	penghambatan ayam ras	perubahan ayam ras pedagang dan petelur	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
15	01623	Jasa penetasan telur	usaha yang mencakup bidang penetasan telur atau dasar telur jans dan kontrak	menengah dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha lintas kabupaten/kota	Gubernur
16	46444	perdagangan besar obat farmasi untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
17	46445	perdagangan besar obat tradisional untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
18	46446	perdagangan besar kosmetik untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
19	46447	perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
20	46448	perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
21	46692	perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
22	01111	pertanian jagung	usaha horti daya (meliputi usaha lain penyediaan sapihedi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman jagung	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pe laku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pe laku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			mikro dan kecil	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pe laku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
			menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
16	46444	perdagangan besar obat farmasi untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
17	46445	perdagangan besar obat tradisional untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
18	46446	perdagangan besar kosmetik untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
19	46447	perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
20	46448	perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
21	46692	perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
22	01111	pertanian jagung	usaha horti daya (meliputi usaha lain penyediaan sapihedi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman jagung	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pe laku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pe laku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
23	01112	pertanian gandum	usaha perbenihan jagung	mikro dan kecil	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pe laku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			usaha perbenihan gandum	mikro dan kecil	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pe laku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahir usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
16	46444	perdagangan besar obat farmasi untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
17	46445	perdagangan besar obat tradisional untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
18	46446	perdagangan besar kosmetik untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
19	46447	perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
20	46448	perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi
21	46692	perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan	distributor obat hewan	kecil, menengah, dan besar	NA	tinggi	NIB dan lain	20 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lokasi usaha di kabupaten/kota	Gubernur
											lokasi usaha di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
26	01115	pertanian kacang hijau	usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman kacang hijau	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
			usaha perbenihan kacang hijau	mikro dan kecil	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lulusan usaha	Gubernur

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
27	01119	pertanian serelia lainnya, aneka kacang	usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman serelia lainnya, aneka kacang	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
			usaha perbenihan serelia lainnya, aneka kacang	mikro dan kecil	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lulusan usaha	Gubernur

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
28	01121	pertanian padi hibrida	usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman padi hibrida	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
			usaha perbenihan padi hibrida	mikro dan kecil	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lulusan usaha	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
29	01121	pertanian padi hibrida	usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman padi hibrida	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
			usaha perbenihan padi hibrida	mikro dan kecil	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lulusan usaha	Gubernur

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
30	01135	pertanian aneka umbi-umbi lainnya	usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman aneka umbi-umbi lainnya	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
			usaha perbenihan aneka umbi-umbi lainnya	mikro dan kecil	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lulusan usaha	Gubernur

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
31	10011	industri pengalangan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	mencakup usaha pengalangan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
32	10012	industri pengalangan-aneka kacang (termasuk leguminosa)	mencakup usaha pemrosesan tepung dari aneka kacang melalui proses pengalangan, seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminosa lainnya	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
29	01121	pertanian padi hibrida	usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman padi hibrida	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikasi standar	3 hari	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
			usaha perbenihan padi hibrida	mikro dan kecil	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama berlaku di tingkat kabupaten / kota	lulusan usaha	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lulusan usaha	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
29	01121	pertanian padi (sawah)	usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan sapihri yang tepat, pemupukan, penyiangan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman padi: lahan	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				risiko dan kecil	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				menengah dan besar	NA	menengah tinggi	3 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
30	01135	pertanian aneka umbi pahawja	usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan sapihri yang tepat, pemupukan, penyiangan, panen, dan/atau pasca panen) tanaman aneka umbi pahawja	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				menengah dan besar	NA	menengah tinggi	3 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
31	10611	industri penggilingan gandum dan sereal lainnya	mencakup usaha penggilingan gandum dan sereal lainnya menjadi tepung dan pelet, seperti gandum dan sorgum, rye, oat dan sereal lainnya	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
32	10612	industri pengalangan kaca (termasuk lembaran)	mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang-kacangan: proses pengalangan, seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan kacang leguminosa lainnya)	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
33	10613	industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma)	mencakup usaha pembuangan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses pengalangan, seperti tepung dari ubi kayu (gipfisi), ubi jalar, talas, irut, jabe, termasuk: kunyit dan kapulaga (dari sayuran)	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
33	10613	industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma)	mencakup usaha pembuangan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses pengalangan, seperti tepung dari ubi kayu (gipfisi), ubi jalar, talas, irut, jabe, termasuk: kunyit dan kapulaga dan sayuran	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
34	10621	industri pati ubi kayu	mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung kapulaga	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
35	10631	industri penggilingan padi dan peranakan beras	mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyusutan beras yang tercampur dengan usaha penggilingan padi	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
36	10632	industri penggilingan dan pembebasan jagung	mencakup usaha penggilingan dan pembebasan jagung	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
37	01612	jasa pemupukan, pemecahan hama/basah dan pengendalian hama dan gulma	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
38	01630	jasa pencampuran	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
39	01640	peralihan bentuk tanaman untuk pengangkutan	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
40	01611	jasa pengalihan lahan	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
33	10613	industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma)	mencakup usaha pembuangan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses pengalangan, seperti tepung dari ubi kayu (gipfisi), ubi jalar, talas, irut, jabe, termasuk: kunyit dan kapulaga dan sayuran	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
34	10621	industri pati ubi kayu	mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung kapulaga	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
35	10631	industri penggilingan padi dan peranakan beras	mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyusutan beras yang tercampur dengan usaha penggilingan padi	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
36	10632	industri penggilingan dan pembebasan jagung	mencakup usaha penggilingan dan pembebasan jagung	menengah	NA	menengah rendah	NA	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				besar	NA	menengah tinggi	3 hari	berlaku selama pelaksanaan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
34	10621	industri pati ubi kayu	mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
35	10631	industri penggilangan padi dan penyusutan beras	mencakup usaha penggilangan padi menjadi beras, termasuk penyusutan beras yang terpisah dengan usaha penggilangan padi	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
36	10632	industri penggilangan dan pembersihan jagung	mencakup usaha penggilangan dan pembersihan jagung	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
37	01612	jasa persiapan, penanaman, bibit/beras dan pengendalian hama dan gulma	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
38	01630	jasa pascapanen	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
39	01640	pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
41	01613	jasa penanaman	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
42	01614	jasa pengemasan dan pemertukan melalui udara	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
43	01619	jasa penunjang pertanian lainnya	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
44	01116	pertanian aneka kacang hortikultura perubahan aneka kacang hortikultura	budi daya aneka kacang hortikultura mikro, kecil dan menengah	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				menengah dan besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
45	01121	perbaikan hortikultura sayuran daun	budi daya sayuran daun perubahan sayuran daun	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
46	01122	perbaikan hortikultura buah	budi daya buah perubahan buah	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
47	01123	pertanian hortikultura sayuran buah	budi daya sayuran perubahan sayuran buah	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				menengah dan besar	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
41	01613	jasa penanaman	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
42	01614	jasa pengemasan dan pemertukan melalui udara	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
43	01619	jasa penunjang pertanian lainnya	seluruh	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
44	01116	pertanian aneka kacang hortikultura perubahan aneka kacang hortikultura	budi daya aneka kacang hortikultura mikro, kecil dan menengah	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
				menengah dan besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
40	01011	jasa pengalihan lahan	sekolah	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelepasan hak atas tanah	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
41	01013	jasa pemukiman	sekolah	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelepasan hak atas tanah	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
42	01014	jasa pengangkutan dan penyebarluasan melalui udara	sekolah	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelepasan hak atas tanah	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
43	01019	jasa penunjang pertanian lainnya	sekolah	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	berlaku selama pelepasan hak atas tanah	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
44	01110	peranian aneka kacang hortikultura	budi daya aneka kacang hortikultura	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
45	01131	peranian hortikultura sayuran daun	budi daya sayuran daun	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
46	01132	peranian hortikultura buah	budi daya buah	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
47	01133	peranian hortikultura sayuran buah	budi daya sayuran	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
48	01134	peranian hortikultura sayuran umbi	budi daya sayuran umbi	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
49	1136	peranian jamur	budi daya jamur	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
50	01130	peranian hortikultura sayuran lainnya	budi daya sayuran lainnya	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
51	01190	peranian tanaman bunga	budi daya tanaman bunga	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
52	01104	pembibitan tanaman bunga	peranian tanaman bunga	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
53	01210	peranian buah anggur	budi daya buah anggur	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
54	01220	peranian buah buah tropis dan subtropis	budi daya buah-buahan tropis dan subtropis	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN					PARAMETER	KEWENANGAN
48	01134	peranian hortikultura sayuran umbi	budi daya sayuran umbi	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
49	1136	peranian jamur	budi daya jamur	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
50	01130	peranian hortikultura sayuran lainnya	budi daya sayuran lainnya	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
51	01190	peranian tanaman bunga	budi daya tanaman bunga	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
52	01104	pembibitan tanaman bunga	peranian tanaman bunga	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
53	01210	peranian buah anggur	budi daya buah anggur	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
54	01220	peranian buah buah tropis dan subtropis	budi daya buah-buahan tropis dan subtropis	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama masa aktif	lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
48	01134	pertanian hortikultura sayuran umbi	budi daya sayuran umbi	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan sayuran buah	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
48	1136	pertanian jamur	budi daya jamur	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan jamur	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur	
50	01139	pertanian hortikultura sayuran lainnya	budi daya sayuran lainnya	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan sayuran lainnya	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	lahan usaha lintas provinsi	Gubernur	

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
51	01193	pertanian tanaman bunga	budi daya tanaman bunga	menengah	NA	menengah rendah	NIB	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan tanaman bunga	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
52	01194	perubahan tanaman bunga	perubahan tanaman bunga	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
53	01210	pertanian buah anggur	budi daya buah anggur	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan buah anggur	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
53	01210	pertanian buah anggur	perubahan buah anggur	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
55	01230	pertanian buah jeruk	budi daya buah jeruk	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan buah jeruk	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
56	01240	pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	budi daya buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
			perubahan buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
57	01251	pertanian buah beri	budi daya buah beri	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan buah beri	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
57	01251	pertanian buah beri	perubahan buah beri	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
58	01253	pertanian sayuran taburan	budi daya sayuran taburan	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan sayuran taburan	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
59	01199	perubahan tanaman semangit lainnya YTDL	perubahan tanaman semangit lainnya	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
60	01259	pertanian buah semak lainnya	budi daya buah semak lainnya	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan buah semak lainnya	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
61	01283	pertanian cabai	budi daya cabai	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan cabai	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
55	01230	pertanian buah jeruk	budi daya buah jeruk	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan buah jeruk	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
56	01240	pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	budi daya buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
			perubahan buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
57	01251	pertanian buah beri	budi daya buah beri	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	
			perubahan buah beri	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pelepasan buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	
57	01251	pertanian buah beri	perubahan buah beri	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi buah dan akan ditinjau secara berkala	Gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
54	01220	pertanian buah-buahan tropis dan subtropis	budi daya buah-buahan tropis dan subtropis	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan buah-buahan tropis dan subtropis	besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pektek usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan buah-buahan tropis dan subtropis	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
55	01230	pertanian buah jeruk	budi daya buah jeruk	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan buah jeruk	besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pektek usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan buah jeruk	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
62	01285	pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	budi daya tanaman obat atau biofarmaka rimpang	menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan tanaman obat atau biofarmaka rimpang	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
63	01286	pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	budi daya tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	menengah dan besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
64	01301	pertanian tanaman hias	budi daya tanaman hias	menengah	NA	menengah-rendah	NIB	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan tanaman hias	besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
64	01302	pertanian perembung/balok tanaman	perubahan perembung/balok tanaman	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
56	01240	pertanian buah apel dan buah batu (pome acid stone fruit)	budi daya buah apel dan buah batu (pome acid stone fruit)	menengah	NA	menengah-rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan buah apel dan buah batu (pome acid stone fruit)	besar	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	berlaku selama pektek usaha menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
66	01118	pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makanan	budi daya kapas	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kapas	sesuai	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/kota	Gubernur
67	01190	perkebunan tebu	budi daya perkebunan tebu	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan Irit	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih tebu	sesuai	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
58	01253	pertanian sayuran tahunan	budidaya sayuran tahunan	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan sayuran tahunan	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
59	01199	pertanian tanaman semusim lainnya YTEL	perubahan tanaman semusim lainnya	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
60	01259	pertanian buah semak lainnya	budidaya buah semak lainnya	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan buah semak lainnya	besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	bertindak selama periode tanam menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan buah semak lainnya	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
68	01150	perkebunan tembakau	budidaya tembakau	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih tembakau	sekarang	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
69	01101	pertanian tanaman pakan ternak	budidaya tanaman perutup tanah	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perilaku benih tanaman perutup tanah	sekarang	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
			perubahan benih tanaman perutup tanah	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
61	01253	pertanian cabai	budidaya cabai	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan cabai	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
62	01285	pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	budidaya tanaman obat atau biofarmaka rimpang	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan tanaman obat atau biofarmaka rimpang	mikro, kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
70	01199	pertanian tanaman semusim lainnya YTEL	budidaya tanaman semusim lain	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih tanaman semusim lain	sekarang	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
71	01220	pertanian buah-buahan tropis dan subtropis	budidaya kurma	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kurma	sekarang	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
72	01252	pertanian buah biji kacang-kacangan	budidaya jambu mete	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih jambu mete	sekarang	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
03	01296	pertanian tanaman obat atau biofarmaka non ringkong	budi daya tanaman obat atau biofarmaka non ringkong	menengah dan besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			perubahan tanaman obat atau biofarmaka non ringkong	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi bensin dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
04	01301	pertanian tanaman hias	budi daya tanaman hias	menengah	NA	menengah rendah	NIB	NA	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
				besar	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	7 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
04	01302	perawatan pengubahsuaian tanaman	perubahan pengubahsuaian tanaman	menengah	NA	menengah rendah	NIB dan Sertifikat standar	NA	selama masih aktif memproduksi bensin dan akan ditinjau secara berkala	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
06	01118	pertanian biji-bijian penghasil bahan minyak nabati	budi daya kapas	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kapas	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
07	01140	perkebunan tebu	budi daya perkebunan tebu	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih tebu	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
08	01150	perkebunan tembakau	budi daya tembakau	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih tembakau	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
73	01261	perkebunan buah kelapa	budi daya kelapa	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kelapa	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
74	01262	perkebunan buah kelapa sawit	budi daya kelapa sawit	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kelapa sawit	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
75	01270	pertanian tanaman untuk bahan makanan	budi daya kopi, kakao	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			budi daya teh	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
76	01281	perkebunan pala	budi daya pala	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih pala	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
73	01261	perkebunan buah kelapa	budi daya kelapa	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kelapa	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
74	01262	perkebunan buah kelapa sawit	budi daya kelapa sawit	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kelapa sawit	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
75	01270	pertanian tanaman untuk bahan makanan	budi daya kopi, kakao	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			budi daya teh	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
76	01281	perkebunan pala	budi daya pala	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih pala	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
69	01191	pertanian tanaman pakan ternak	budi daya tanaman pemupuk tanah	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih tanaman pemupuk tanah	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
70	01199	pertanian tanaman semusim lainnya YTE	budi daya tanaman semusim lain	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih tanaman semusim lain	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
77	01282	perkebunan cengkeh	budi daya cengkeh	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih cengkeh	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
78	01284	perkebunan tanaman aromatik/ penyegar	budi daya nilam, serih wang	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi nilam, serih wang	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
71	01220	pertanian buah-buahan tropis dan subtropis	budi daya kurma	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kurma	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
72	01252	pertanian buah kacang-kacangan	budi daya jambu mete	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan lain	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih jambu mete	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
79	01285	pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	budi daya ginseng	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih ginseng	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
80	01286	pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	budi daya kina, adas, pinang, gambir	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kina, adas, pinang, gambir	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
81	01289	pertanian tanaman obat atau biofarmaka	budi daya kemiri, pala, kayu manis, pala	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kemiri, pala, kayu manis, pala	seluruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
73	01261	perkebunan buah kelapa	budi daya kelapa	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan Izin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kelapa	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
74	01262	perkebunan buah kelapa sawit	budi daya kelapa sawit	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan Izin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kelapa sawit	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
82	01291	perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya	budi daya karet	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih karet	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
83	01299	pertanian sayuran dan tanaman tahunan lainnya	budi daya jagung, jagung, arum, bawang, kentang, kacang dan tanaman tahunan lainnya	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih jagung, jagung, arum, bawang, kentang dan tanaman tahunan lainnya	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
84	10431	industri minyak mentah kelapa sawit (CPO)	pengolahan minyak mentah kelapa sawit (CPO)	besar	NA	tinggi	NIB dan Izin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
85	10721	industri gula pasir	pengolahan gula pasir bernasas tebu	besar	NA	tinggi	NIB dan Izin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
86	10763	industri pengolahan teh	pengolahan teh	besar	NA	tinggi	NIB dan Izin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
75	01261	pertanian tanaman untuk bahan minuman	budi daya kopi, kakao	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			budi daya teh	besar	luas lahan >25 ha	tinggi	NIB dan Izin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih teh, kopi, kakao	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
70	01281	perkebunan lada	budi daya lada	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih lada	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
87	01117	pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	budi daya wijen	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih wijen	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
88	01127	pertanian biji-bijian tanaman perennials bukan tebu	budi daya bit	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih bit	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di lintas kabupaten / kota	Gubernur
89	01160	pertanian tanaman berumut	budidaya kapuk, roselle, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf	besar	luas lahan >25 ha	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kapuk, roselle, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf	seluruh	NA	menengah-tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISKI SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISKI				PARAMETER	KEWENANGAN
77	01282	perkebunan engkih	buah daya engkih	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah engkih	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten / kota	Gubernur
78	01284	perkebunan tanaman aromatik / pengayag	buah daya nilam, serih wang	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi nilam, serih wang	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISKI SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISKI				PARAMETER	KEWENANGAN
90	01269	perkebunan buah oleaginous lainnya	buah daya zaitun	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah lainnya	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISKI SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISKI				PARAMETER	KEWENANGAN
70	01285	pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	buah daya ginggang	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah ginggang	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten / kota	Gubernur
80	01286	pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	buah daya kina, edis, pinang, gambir	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah kina, edis, pinang, gambir	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten / kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISKI SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISKI				PARAMETER	KEWENANGAN
81	01289	pertanian tanaman rimpang-termpah, aromatik / pengayag, dan obat lainnya	buah daya kemiri, pala, kayu manis, pala	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah kemiri, pala, kayu manis, pala	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten / kota	Gubernur
82	01291	perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya	buah daya karet	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah karet	setengah	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten / kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BEDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISKI SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISKI				PARAMETER	KEWENANGAN
83	01290	pertanian sayuran dan tanaman tahunan lainnya	budi daya jeruk, papaya, angsa, sapi, kambing angsan dan tanaman tahunan lainnya	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah jeruk, papaya, angsa, sapi, kambing angsan dan tanaman tahunan lainnya	seleuruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
84	10431	industri minyak mentah kerude palm oil	pengolahan minyak mentah kerude palm oil	besar	NA	tinggi	NIB dan Ijin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
85	10721	industri gula pasir	pengolahan gula pasir berbasis tebu	besar	NA	tinggi	NIB dan Ijin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
86	10763	industri pengolahan teh	pengolahan teh	besar	NA	tinggi	NIB dan Ijin	5 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
87	01117	pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	budi daya wijen	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah wijen	seleuruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
88	01137	pertanian biji-bijian dan tanaman penunjang bukan tebu	budi daya bit	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi buah bit	seleuruh	NA	menengah tinggi	NIB dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
89	01160	pertanian tanaman beresat	budidaya kapuk, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NI dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih kapuk, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf	sekitar	NA	menengah tinggi	NI dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur
90	01260	perkebunan buah oleaginous lainnya	budidaya zaitun	besar	luas lahan >25 ha	menengah tinggi	NI dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	lahan usaha berada di lintas kabupaten / kota	Gubernur
			produksi benih zaitun	sekitar	NA	menengah tinggi	NI dan Sertifikat standar	3 hari	selama menjalankan kegiatan usaha	usaha berlokasi di kabupaten/ kota	Gubernur

B1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	sertifikat cara budi daya ternak yang baik	01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499	14 hari	3 tahun	usaha berlokasi lintas kabupaten/ kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
2	sertifikat cara pembibitan ternak yang baik	01411	14 hari	3 tahun	usaha berlokasi lintas kabupaten/ kota	Gubernur
		01412				
		01413				
		01414				
		01420				
		01441				
		01442				
		01443				
		01444				
		01461				
		01462				
		01463				
		01464				
		01465				
		01466				
		01467				
		01468				
		01469				
		01491				
		01492				
01493						
01494						
01495						
01496						
01497						
01499						
3	sertifikasi benih tanaman perkebunan	46202, 46209, 46315	7 hari	2 tahun	seluruh	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
4	sertifikat penerapan penanganan yang baik (PSAT)	01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10612, 10613, 10631, 10632, 10772	60 hari	5 tahun	unit usaha untuk penanganan PSAT produksi dalam negeri	Gubernur
5	sertifikat PSAT produksi dalam negeri (PSAT-PD)	01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319, 47111, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10314, 10612, 10613, 10631, 10632, 10772	14 hari	5 tahun	unit usaha sesuai lokasi provinsi	Gubernur
6	izin keamanan PSAT/ health certificate	01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319	14 hari	4 bulan	lokasi keberangkatan PSAT sesuai provinsi	Gubernur
7	izin rumah pengemasan	01630, 46201, 46311, 46312, 46313, 46319	14 hari	3 bulan	lokasi unit usaha sesuai provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
B. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN											
1	38120	Pengumpulan limbah berbahaya	pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan : pengumpulan limbah berbahaya dan beracun; - pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun; pengolahan limbah berbahaya dan beracun; - penimbunan limbah berbahaya dan beracun; pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/ pelaku usaha.	seluruh	N/A	tinggi	NIB dan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 hari	5 tahun	kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Gubernur
2	38220	treatment dan pembuangan limbah berbahaya	pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan : pengumpulan limbah berbahaya dan beracun; pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun; pengolahan limbah berbahaya dan beracun; - penimbunan limbah berbahaya dan beracun; pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/ pelaku usaha.	seluruh	N/A	tinggi	NIB dan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 hari	5 tahun	kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Gubernur
C. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH											
1	37011	pengumpulan air limbah tidak berbahaya	pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar pengangkutan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
2	37012	pengumpulan air limbah berbahaya	pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas <5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengangkutan air limbah berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
D. BIDANG USAHA											
NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
1	37021	treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. instalasi pengolahan lumpur tinja (PLT) termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas <50M3 / hari dan/atau ; 2. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas melayani <20.000 jiwa atau 2.000 M3 / hari.	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengangkutan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
2	37022	treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	1. instalasi pengolahan lumpur tinja (PLT) termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas <50M3 / hari dan/atau ; 2. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas melayani >20.000 jiwa atau 2.000 M3 / hari; 3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri; 4. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu air limbah domestik dan air limbah proses dari usaha dan/ atau kegiatan).	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pengolahan air limbah berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
B. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN											
1	38120	pengumpulan limbah berbahaya	pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan : pengumpulan limbah berbahaya dan beracun; pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun; pengolahan limbah berbahaya dan beracun; - penimbunan limbah berbahaya dan beracun; pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/ pelaku usaha.	seluruh	N/A	tinggi	NIB dan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 hari	5 tahun	kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Gubernur
2	38220	treatment dan pembuangan limbah berbahaya	pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan : pengumpulan limbah berbahaya dan beracun; pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun; pengolahan limbah berbahaya dan beracun; - penimbunan limbah berbahaya dan beracun; pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/ pelaku usaha.	seluruh	N/A	tinggi	NIB dan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 hari	5 tahun	kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Gubernur
C. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH											
1	37011	pengumpulan air limbah tidak berbahaya	pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar pengangkutan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
2	37012	pengumpulan air limbah berbahaya	pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas <5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengangkutan air limbah berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
3	37021	treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. instalasi pengolahan lumpur tinja (PLT) termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas <50M3 / hari dan/atau ; 2. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas melayani <20.000 jiwa atau 2.000 M3 / hari.	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengangkutan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
20131		industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik									
20294		industri minyak atsiri									
22123		industri karet remah (jerumb rubber)									
B. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN											
1	38120	pengumpulan limbah berbahaya	pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan : pengumpulan limbah berbahaya dan beracun; pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun; pengolahan limbah berbahaya dan beracun; - penimbunan limbah berbahaya dan beracun; pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/ pelaku usaha.	seluruh	N/A	tinggi	NIB dan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 hari	5 tahun	kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Gubernur
2	38220	treatment dan pembuangan limbah berbahaya	pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan : pengumpulan limbah berbahaya dan beracun; pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun; pengolahan limbah berbahaya dan beracun; - penimbunan limbah berbahaya dan beracun; pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai ketersediaan dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pemohon/ pelaku usaha.	seluruh	N/A	tinggi	NIB dan izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 hari	5 tahun	kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Gubernur
C. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH											
1	37011	pengumpulan air limbah tidak berbahaya	pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar pengangkutan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
2	37012	pengumpulan air limbah berbahaya	pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga dengan kapasitas <5M3 / angkutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengangkutan air limbah berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur
3	37021	treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	1. instalasi pengolahan lumpur tinja (PLT) termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas <50M3 / hari dan/atau ; 2. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik termasuk fasilitas pemanjangan dragas kapasitas melayani <20.000 jiwa atau 2.000 M3 / hari.	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar pengangkutan air limbah tidak berbahaya	1. pemeriksaan administrasi 5 hari kerja; 2. pemeriksaan teknis 1 tahun.	5 tahun	skala provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
D. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI											
1	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala mikro pada kawasan konservasi.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
2	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
3	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala menengah dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
4	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
5	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro pada kawasan konservasi.	25 hari	20 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
6	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk memanfaatkan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil pada kawasan konservasi.	25 hari	20 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
4	37022	treatment dan pembuangan air limbah berbahaya	1. instalasi pengolahan lumpur tpa (PAL) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50M3 / hari dan/atau; 2. instalasi pengolahan air limbah (PAL) domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas melayani >20.000 jiwa atau 2.000 M3 / hari; 3. instalasi pengolahan air limbah (PAL) industri; 4. instalasi pengolahan air limbah (PAL) terpadu air limbah domestik dan air limbah proses dari usaha dan/ atau kegiatan).	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pengolahan air limbah berbahaya	5 tahun	5 tahun	skala provinsi	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
1	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik (lima liter per detik); 2. pemanfaatan massa air skala mikro dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
2	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
3	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala menengah dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
4	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
1	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/ detik (lima liter per detik); 2. pemanfaatan massa air skala mikro dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
2	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/ detik sampai dengan 20 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
3	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/ detik sampai dengan 50 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala menengah dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur
4	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/ detik; 2. pemanfaatan massa air skala besar dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seluruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar pada kawasan konservasi.	25 hari	10 tahun	taman hutan skala provinsi/linas kabupaten/ kota	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO			PERIZINAN BERUSHAHA	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
7.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa aliran energi air	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
8.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa aliran energi air skala besar pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
9.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha pemanfaatan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; 2. meliputi usaha penyediaan sarana wisata alam, sarana akomodasi, sarana transportasi khusus (helicopter, sea plane, ultra light), sub marine, catamaran boat) dan sarana wisata kebudayaan alam;	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO			PERIZINAN BERUSHAHA	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
10.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha penyediaan jasa wisata alam pada suatu muka marga air, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; 2. penyediaan jasa wisata alam lain kegiatan usaha informasi pariwisata alam, pemandu wisata / Interpreter wisata alam, transportasi wisata alam, perjalanan wisata alam, cinderamata wisata alam, makanan dan minuman wisata alam, perswaan peralatan wisata alam.	seuruh	N/A	mengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
11	02209	usaha kehutanan lainnya	penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa dan taman buru.	UMKM	N/A	mengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
12	02209	usaha kehutanan lainnya	penyediaan jasa aliran air untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pembangkit listrik tenaga mini hidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa dan taman buru.	UMKM	N/A	mengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan energi air pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO			PERIZINAN BERUSHAHA	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
5	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik (sepuah liter per detik); 2. pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
6.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
7.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala menengah pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO			PERIZINAN BERUSHAHA	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
8.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa aliran energi air skala besar pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
9.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha pemanfaatan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; 2. meliputi usaha penyediaan sarana wisata alam, sarana akomodasi, sarana transportasi khusus (helicopter, sea plane, ultra light, sub marine, catamaran boat) dan sarana wisata kebudayaan alam;	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO			PERIZINAN BERUSHAHA	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
5	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala mikro, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit kurang dari 5 liter/detik (sepuah liter per detik); 2. pemanfaatan jasa aliran air skala mikro dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
6.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala kecil, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
7.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala menengah, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala menengah pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO			PERIZINAN BERUSHAHA	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
8.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha skala besar, untuk pemanfaatan jasa aliran air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik; 2. pemanfaatan jasa aliran air skala kecil dilakukan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman buru.	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan jasa aliran energi air skala besar pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
9.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha pemanfaatan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; 2. meliputi usaha penyediaan sarana wisata alam, sarana akomodasi, sarana transportasi khusus (helicopter, sea plane, ultra light, sub marine, catamaran boat) dan sarana wisata kebudayaan alam;	seuruh	N/A	tinggi	NIB + izin pemanfaatan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO			PERIZINAN BERUSHAHA	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
10.	02209	usaha kehutanan lainnya	1. usaha penyediaan jasa wisata alam pada suatu muka marga air, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; 2. penyediaan jasa wisata alam lain kegiatan usaha informasi pariwisata alam, pemandu wisata / Interpreter wisata alam, transportasi wisata alam, perjalanan wisata alam, cinderamata wisata alam, makanan dan minuman wisata alam, perswaan peralatan wisata alam.	seuruh	N/A	mengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
11	02209	usaha kehutanan lainnya	penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial di sekitar taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa dan taman buru.	UMKM	N/A	mengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		
12	02209	usaha kehutanan lainnya	penyediaan jasa aliran air untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pembangkit listrik tenaga mini hidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan kepentingan sosial di sekitar taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa dan taman buru.	UMKM	N/A	mengah tinggi	NIB + sertifikat standar; penyediaan jasa lingkungan energi air pada kawasan konservasi	taman hutan skala provinsi/lintas kabupaten/kota	Gubernur		

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
F. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN											
1	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar ; pengalihan dan pengedaran benih	15 hari	1 tahun	seluruh	Gubernur
2	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar ; pengalihan dan pengedaran benih	15 hari	1 tahun	seluruh	Gubernur
3	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar; pengalihan dan pengedaran benih dari bibit	15 hari	1 tahun	yang dimiliki oleh pelaku usaha perseroan dan pelaku usaha non perseroan	Gubernur

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR ESDM

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
1	10111	penambangtan tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB, dan sertifikasi standar	5 hari	5 hari	seluruh	Gubernur
2	10112	mineral tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB, dan sertifikasi standar	5 hari	5 hari	seluruh	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
F. BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN											
1	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar ; pengalihan dan pengedaran benih	15 hari	1 tahun	seluruh	Gubernur
2	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar ; pengalihan dan pengedaran benih	15 hari	1 tahun	seluruh	Gubernur
3	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar; pengalihan dan pengedaran benih dari bibit	15 hari	1 tahun	yang dimiliki oleh pelaku usaha perseroan dan pelaku usaha non perseroan	Gubernur
G. BIDANG TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA											
1	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Pengolahan sampah yang tidak berbahaya menghasilkan produk berupa bahan bakar alternatif/substitusi, biogas, dan lainnya (contoh kegiatan pengolahan sampah yang masuk dalam kelompok ini: fasilitas pengolahan sampah menghasilkan RDF, SRF, atau jurnprutan padat, biogas, biokonverter maggot (Black Soldier Fly), dll)	Seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB+sertifikat standar	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Berkas usaha kalupaten/ko ta	Gubernur

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR ESDM

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
1	10111	penambangtan tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB, dan sertifikasi standar	5 hari	5 hari	seluruh	Gubernur
2	10112	mineral tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB, dan sertifikasi standar	5 hari	5 hari	seluruh	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
F. BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN											
1	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar ; pengalihan dan pengedaran benih	15 hari	1 tahun	seluruh	Gubernur
2	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar ; pengalihan dan pengedaran benih	15 hari	1 tahun	seluruh	Gubernur
3	2140	pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan	kelompok usaha ini mencakup kegiatan pengalihan dan pengedaran benih tanaman hutan	seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB + sertifikat standar; pengalihan dan pengedaran benih dari bibit	15 hari	1 tahun	yang dimiliki oleh pelaku usaha perseroan dan pelaku usaha non perseroan	Gubernur
G. BIDANG TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA											
1	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Pengolahan sampah yang tidak berbahaya menghasilkan produk berupa bahan bakar alternatif/substitusi, biogas, dan lainnya (contoh kegiatan pengolahan sampah yang masuk dalam kelompok ini: fasilitas pengolahan sampah menghasilkan RDF, SRF, atau jurnprutan padat, biogas, biokonverter maggot (Black Soldier Fly), dll)	Seluruh	N/A	menengah tinggi	NIB+sertifikat standar	10 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Berkas usaha kalupaten/ko ta	Gubernur

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR ESDM

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
1	10111	penambangtan tenaga listrik	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB, dan sertifikasi standar	5 hari	5 hari	seluruh	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG URAHA			MIBRO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERILAI	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP REGULASI	SKALA URAHA	LEHAR LAHAN					PARAMETER	KENYAMANAN
13	72102	perizinan dan penyelenggaraan kegiatan dan kegiatan	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan yang terkait dengan aktivitas usaha.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
14	43407	perizinan untuk usaha	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan di bidang tenaga kerja.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
15	35129	aktivitas produksi barang-barang	sekolah	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
16	20115	industri kimia dasar organik yang berantai dari hasil pertanian	selengkap ini mencakup pembuatan bahan, yang harus menggunakan tenaga dengan pabrik, hasil dari (sederhana dan kompleks) industri, baik-baik (tidak ada) industri, minyak, bahan kimia, minyak, atau/ per hasil industri.	sekolah	NA	tinggi	RD, dan sertifikasi standar	15 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
17	08301	Penggalan Dana dan Rata-rata	sekolah	sekolah	NA	tinggi	RD, dan sertifikasi standar	14 hari	1. Pengalangan RUP, 2. Pengalangan RUP, 3. Pengalangan RUP, 4. Pengalangan RUP, 5. Pengalangan RUP, 6. Pengalangan RUP, 7. Pengalangan RUP, 8. Pengalangan RUP, 9. Pengalangan RUP, 10. Pengalangan RUP, 11. Pengalangan RUP, 12. Pengalangan RUP, 13. Pengalangan RUP, 14. Pengalangan RUP, 15. Pengalangan RUP, 16. Pengalangan RUP, 17. Pengalangan RUP, 18. Pengalangan RUP, 19. Pengalangan RUP, 20. Pengalangan RUP, 21. Pengalangan RUP, 22. Pengalangan RUP, 23. Pengalangan RUP, 24. Pengalangan RUP, 25. Pengalangan RUP, 26. Pengalangan RUP, 27. Pengalangan RUP, 28. Pengalangan RUP, 29. Pengalangan RUP, 30. Pengalangan RUP.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG URAHA			MIBRO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERILAI	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP REGULASI	SKALA URAHA	LEHAR LAHAN					PARAMETER	KENYAMANAN
13	72102	perizinan dan penyelenggaraan kegiatan dan kegiatan	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan yang terkait dengan aktivitas usaha.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
14	43407	perizinan untuk usaha	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan di bidang tenaga kerja.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
15	35129	aktivitas produksi barang-barang	sekolah	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
16	20115	industri kimia dasar organik yang berantai dari hasil pertanian	selengkap ini mencakup pembuatan bahan, yang harus menggunakan tenaga dengan pabrik, hasil dari (sederhana dan kompleks) industri, baik-baik (tidak ada) industri, minyak, bahan kimia, minyak, atau/ per hasil industri.	sekolah	NA	tinggi	RD, dan sertifikasi standar	15 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
17	08301	Penggalan Dana dan Rata-rata	sekolah	sekolah	NA	tinggi	RD, dan sertifikasi standar	14 hari	1. Pengalangan RUP, 2. Pengalangan RUP, 3. Pengalangan RUP, 4. Pengalangan RUP, 5. Pengalangan RUP, 6. Pengalangan RUP, 7. Pengalangan RUP, 8. Pengalangan RUP, 9. Pengalangan RUP, 10. Pengalangan RUP, 11. Pengalangan RUP, 12. Pengalangan RUP, 13. Pengalangan RUP, 14. Pengalangan RUP, 15. Pengalangan RUP, 16. Pengalangan RUP, 17. Pengalangan RUP, 18. Pengalangan RUP, 19. Pengalangan RUP, 20. Pengalangan RUP, 21. Pengalangan RUP, 22. Pengalangan RUP, 23. Pengalangan RUP, 24. Pengalangan RUP, 25. Pengalangan RUP, 26. Pengalangan RUP, 27. Pengalangan RUP, 28. Pengalangan RUP, 29. Pengalangan RUP, 30. Pengalangan RUP.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG URAHA			MIBRO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERILAI	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP REGULASI	SKALA URAHA	LEHAR LAHAN					PARAMETER	KENYAMANAN
11	85122	pengoperasian dan/atau pemeliharaan tenaga listrik	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan tenaga listrik.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
12	71102	aktivitas industri dan/atau jasa	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan tenaga listrik.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
13	72102	perizinan dan penyelenggaraan kegiatan dan kegiatan	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan yang terkait dengan aktivitas usaha.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
14	85199	perizinan untuk usaha	usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa produksi dan perdagangan di bidang tenaga listrik.	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
15	35129	aktivitas produksi barang-barang	sekolah	sekolah	NA	menengah	RD dan vertikal standar	5 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
16	20115	industri kimia dasar organik yang berantai dari hasil pertanian	selengkap ini mencakup pembuatan bahan, yang harus menggunakan tenaga dengan pabrik, hasil dari (sederhana dan kompleks) industri, baik-baik (tidak ada) industri, minyak, bahan kimia, minyak, atau/ per hasil industri.	sekolah	NA	tinggi	RD, dan sertifikasi standar	15 hari	tidak berlaku sepanjang berlaku untuk semua dan tidak ada perubahan klasifikasi dan keabsahan usaha.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur
17	08301	Penggalan Dana dan Rata-rata	sekolah	sekolah	NA	tinggi	RD, dan sertifikasi standar	14 hari	1. Pengalangan RUP, 2. Pengalangan RUP, 3. Pengalangan RUP, 4. Pengalangan RUP, 5. Pengalangan RUP, 6. Pengalangan RUP, 7. Pengalangan RUP, 8. Pengalangan RUP, 9. Pengalangan RUP, 10. Pengalangan RUP, 11. Pengalangan RUP, 12. Pengalangan RUP, 13. Pengalangan RUP, 14. Pengalangan RUP, 15. Pengalangan RUP, 16. Pengalangan RUP, 17. Pengalangan RUP, 18. Pengalangan RUP, 19. Pengalangan RUP, 20. Pengalangan RUP, 21. Pengalangan RUP, 22. Pengalangan RUP, 23. Pengalangan RUP, 24. Pengalangan RUP, 25. Pengalangan RUP, 26. Pengalangan RUP, 27. Pengalangan RUP, 28. Pengalangan RUP, 29. Pengalangan RUP, 30. Pengalangan RUP.	tidak ada nilai tambah.	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIJANG UMAMA			REVISI		PERIZINAN BERHAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER REVISI				TEKNIK REVISI	PARAMETER
19	08103	Penggalan Kerah/Baru	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh
20	08104	Penggalan Pasir	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh

NO	BIJANG UMAMA			REVISI		PERIZINAN BERHAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER REVISI				TEKNIK REVISI	PARAMETER
21	08105	Penggalan Tanah dan Tanah Liat	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh

NO	BIJANG UMAMA			REVISI		PERIZINAN BERHAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER REVISI				TEKNIK REVISI	PARAMETER
22	08106	Penggalan Gips	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh

NO	BIJANG UMAMA			REVISI		PERIZINAN BERHAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER REVISI				TEKNIK REVISI	PARAMETER
19	08103	Penggalan Kerah/Baru	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh

NO	BIJANG UMAMA			REVISI		PERIZINAN BERHAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER REVISI				TEKNIK REVISI	PARAMETER
20	08104	Penggalan Pasir	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh

NO	BIJANG UMAMA			REVISI		PERIZINAN BERHAKA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER REVISI				TEKNIK REVISI	PARAMETER
21	08105	Penggalan Tanah dan Tanah Liat	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh
22	08106	Penggalan Gips	sewaruh	sewaruh	NA	NA	14 hari	1. Penanggung LUP a. tahun elektronik 3 (tiga) tahun untuk pertanggung jawaban, atau b. tahun operasi produksi pertanggung jawaban paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penanggung SPPB paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Penanggung SPP paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	sewaruh	sewaruh

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG LINGKUP			SIFAT	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA WAKTU	MASA BEKALAU	KEWENANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN						
23	08107	Penggalan Dana	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Perizinan SIP a. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan

NO	RUANG LINGKUP			SIFAT	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA WAKTU	MASA BEKALAU	KEWENANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN						
24	08108	Penggalan Dana Aneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Perizinan SIP a. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan

NO	RUANG LINGKUP			SIFAT	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA WAKTU	MASA BEKALAU	KEWENANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN						
25	08109	Penggalan Dana, Pemasaran Tanah Liat beraneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Perizinan SIP a. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan

NO	RUANG LINGKUP			SIFAT	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA WAKTU	MASA BEKALAU	KEWENANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN						
24	08108	Penggalan Dana Aneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Perizinan SIP a. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan
25	08109	Penggalan Dana, Pemasaran Tanah Liat beraneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan

NO	RUANG LINGKUP			SIFAT	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA WAKTU	MASA BEKALAU	KEWENANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN						
24	08108	Penggalan Dana Aneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Perizinan SIP a. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan
25	08109	Penggalan Dana, Pemasaran Tanah Liat beraneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan

NO	RUANG LINGKUP			SIFAT	TINGKAT	PERIZINAN	JANGKA WAKTU	MASA BEKALAU	KEWENANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN						
24	08108	Penggalan Dana Aneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Perizinan SIP a. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan
25	08109	Penggalan Dana, Pemasaran Tanah Liat beraneka	selektif	selektif	tinggi	NDI, Jati dan Bertindak Standar	14 hari	1. Perizinan SIP a. Tahap ekplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batubara atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batubara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Perizinan SPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Perizinan IPR paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Deburan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG UMAMA			MISKRO		TINGKAT MISKRO	PERIZINAN BEBLUMADA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER MISKRO LEKAS LAKAS					PARAMETER	KEWENANGAN
20	08915	Pertanangan Petak (Kebun Kacang)	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NSR dan Berfilial Standar	14 hari	1.Pemangku UP seluruh dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn: tahun 3.Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG UMAMA			MISKRO		TINGKAT MISKRO	PERIZINAN BEBLUMADA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER MISKRO LEKAS LAKAS					PARAMETER	KEWENANGAN
20	08915	Pertanangan Petak (Kebun Kacang)	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NSR dan Berfilial Standar	14 hari	1.Pemangku UP seluruh tahun 10 seluruh dapat diampingi 3 kali masing-masing 5 dgn: tahun 3.Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn) tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG UMAMA			MISKRO		TINGKAT MISKRO	PERIZINAN BEBLUMADA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER MISKRO LEKAS LAKAS					PARAMETER	KEWENANGAN
27	08919	Pertanangan Muncul, Mata Keras dan Mata Pupuk Lain-lain	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NSR dan Berfilial Standar	14 hari	1.Pemangku UP seluruh tahun 10 seluruh dapat diampingi 5 kali masing-masing 5 dgn: tahun 7. Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn: tahun 8. Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn: tahun 9. Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn: tahun	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG UMAMA			MISKRO		TINGKAT MISKRO	PERIZINAN BEBLUMADA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA UMAMA	PARAMETER MISKRO LEKAS LAKAS					PARAMETER	KEWENANGAN
27	08919	Pertanangan Muncul, Mata Keras dan Mata Pupuk Lain-lain	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NSR dan Berfilial Standar	14 hari	1.Pemangku UP seluruh tahun 10 seluruh dapat diampingi 5 kali masing-masing 5 dgn: tahun 7. Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn: tahun 8. Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn: tahun 9. Pemangku PPH seluruh tahun 10 (seluruh) tahun dan dapat diampingi 2 kali masing-masing 5 dgn: tahun	Seluruh	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERURAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	PARAMETER RISIKO LEAS LAHAN				PARAMETER	KEWENANGAN
24	08991	Pertambangan Batu Gamping	seluruh	seluruh	NA	tinggi	14 hari	1. Penanggung RUP a. Tahap eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batu gamping seluruh - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan batu gamping seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan batu gamping seluruh b. Tahap operasi pertambangan seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan batu gamping seluruh c. Tahap penutupan pertambangan seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan batu gamping seluruh	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERURAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	PARAMETER RISIKO LEAS LAHAN				PARAMETER	KEWENANGAN
25	08992	Pertambangan Feldspar dan Kalsit	seluruh	seluruh	NA	tinggi	14 hari	1. Penanggung RUP a. Tahap eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan feldspar dan kalsit seluruh - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan feldspar dan kalsit seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan feldspar dan kalsit seluruh b. Tahap operasi pertambangan feldspar dan kalsit seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan feldspar dan kalsit seluruh c. Tahap penutupan pertambangan feldspar dan kalsit seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan feldspar dan kalsit seluruh	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERURAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	PARAMETER RISIKO LEAS LAHAN				PARAMETER	KEWENANGAN
26	08993	Pertambangan Pasir Hitam	seluruh	seluruh	NA	tinggi	14 hari	1. Penanggung RUP a. Tahap eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan pasir hitam seluruh - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan pasir hitam seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan pasir hitam seluruh b. Tahap operasi pertambangan pasir hitam seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan pasir hitam seluruh c. Tahap penutupan pertambangan pasir hitam seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan pasir hitam seluruh	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERURAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	PARAMETER RISIKO LEAS LAHAN				PARAMETER	KEWENANGAN
29	08995	Pertambangan Pasir Kuarsa	seluruh	seluruh	NA	tinggi	14 hari	1. Penanggung RUP a. Tahap eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan pasir kuarsa seluruh - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan pasir kuarsa seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan pasir kuarsa seluruh b. Tahap operasi pertambangan pasir kuarsa seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan pasir kuarsa seluruh c. Tahap penutupan pertambangan pasir kuarsa seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan pasir kuarsa seluruh	Seluruh	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERURAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	PARAMETER RISIKO LEAS LAHAN				PARAMETER	KEWENANGAN
30	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	seluruh	seluruh	NA	tinggi	14 hari	1. Penanggung RUP a. Tahap eksplorasi - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan lainnya seluruh - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan lainnya seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan lainnya seluruh b. Tahap operasi pertambangan lainnya seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan lainnya seluruh c. Tahap penutupan pertambangan lainnya seluruh - 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan lainnya seluruh	Seluruh	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111; 35112; 35113	5 hari	paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi; berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.	Gubernur
2	pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	1. untuk pengesahan RUPTL pertama 10 hari; 2. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari; 3. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari.	sesuai tahun periode RUPTL	untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur.	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111; 35112; 35113	5 hari	paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi; berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.	Gubernur
2	pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	1. untuk pengesahan RUPTL pertama 10 hari; 2. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari; 3. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari.	sesuai tahun periode RUPTL	untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur.	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	35111; 35112; 35113	5 hari	paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi; berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.	Gubernur
2	pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik	35113; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118.	1. untuk pengesahan RUPTL pertama 10 hari; 2. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang wilayah usaha 35 hari; 3. untuk pengesahan perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan perintah menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya 50 hari.	sesuai tahun periode RUPTL	untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahanya ditetapkan oleh Gubernur.	Gubernur
3	persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik	35111; 35114; 35115; 35116; 35117; 35118; 35121	7 hari	sesuai dengan proses pengadaan, maksimum 30 tahun	persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur.	Gubernur
4	perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung	93221; 93231; 16102; 18111; 12091; 10733; 10313; 10763; 01640; 10722; 10761	5 hari	5 tahun	lintas wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Gubernur
5	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)	Semua KBLI	5 hari	Paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang	memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi; berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.	Gubernur

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttt.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttt.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGANUKLIRAN

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
	NIHIL										

Tetap

Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						TINGKAT RISIKO
25	10300	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kemasan	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	MID dan sertifikat standar	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
30	10330	Industri pengolahan dari buah dan sayuran	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	MID dan sertifikat standar	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
27	10391	Industri tempa logam	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah rendah	MID dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
28	10392	Industri tahu kedelai	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah rendah	MID dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						TINGKAT RISIKO
25	10303	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kemasan lainnya selain tahu dan tempa	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
30	10309	Industri pengolahan dan pengawetan kacang buah-buahan dan sayuran	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	MID dan sertifikat standar	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
31	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar, tidak lintas kabupaten/ kota untuk skala industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
32	10412	Industri margarin	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar, tidak lintas kabupaten/ kota untuk skala menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						TINGKAT RISIKO
30	10399	Industri pengolahan dan pengawetan kacang buah-buahan dan sayuran	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	MID dan sertifikat standar	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
31	10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar, tidak lintas kabupaten/ kota untuk skala menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
32	10412	Industri margarin	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar, tidak lintas kabupaten/ kota untuk skala menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
33	10413	Industri minyak mentah dan lemak nabati selain ikan	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MID dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
34	10414	Industri minyak ikan	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MID dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						TINGKAT RISIKO
35	10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MID dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
36	10421	Industri logam	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah rendah	MID dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
37	10422	Industri minyak mentah kelapa	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
38	10423	Industri minyak goreng kelapa	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
39	10424	Industri tepung dan pati ketan	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MID	NA	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	MID dan izin	7 hari	selama berlaku usaha melakukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEKAITAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
49	10520	industri pengalihan arus listrik dan tenaga termal rumah	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
50	10531	industri pengalihan es krim	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
51	10552	industri pengalihan es segitunya yang dapat dimakan dingin es batu dan es blok	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
52	10590	industri pengalihan produk dari arus listriknya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEKAITAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
53	10611	industri pengalihan gas dan serat listrik	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
54	10612	industri pengalihan arca kerang (perhiasan kerang)	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
55	10613	industri pengalihan arca tembik dan sayuran (perhiasan tembik)	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
56	10614	industri tepung kapasitan dan ukuran tepung	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEKAITAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
59	10622	industri berbagai macam paku pakis	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
61	10623	industri glutena dan seprimpa	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi usaha kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
62	10629	industri pati lainnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
63	10631	industri pengalihan pati dan penyediaan beras	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEKAITAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
64	10632	industri pengalihan dan pemertahan jagung	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
65	10633	industri tepung beras dan tepung jagung	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
66	10634	industri pati beras dan jagung	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha
67	10635	industri perhiasan dari bahan dari jagung	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi usaha kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
68	10636	industri tepung dari jagung dan beras	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/wakil kota/gubernur jika lokasi usaha kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIR	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi usaha provinsi untuk semua skala usaha

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA				RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
57	10615	industri makanan serai	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
58	10616	industri tekstil tenun	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar; lokasi lintas Kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur	
59	10621	industri pati ubi kayu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
60	10622	industri berbagai macam pati palma	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	

NO	BIDANG USAHA				RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
69	10710	industri produk rot dan kcor	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
70	10721	industri gula pasir	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar; lokasi lintas Kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur	
71	10722	industri gula merah	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
72	10723	industri sirup	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar dan industri menengah	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota	
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
73	10729	industri pengolahan gula lainnya bukan sirup	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	

NO	BIDANG USAHA				RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
74	10731	industri kakao	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar; lokasi lintas Kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur	
75	10732	industri makanan dari sereal dan berbasis gula	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar dan industri menengah	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
76	10733	industri minuman buah - minuman dari sayuran kering	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
77	10734	industri sambung gula	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	
78	10736	industri sambung gula lainnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	kepuj/ wali kota/gubernur jika lokasi bisnis Kabupaten/ kota		
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan IIN	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KELOMPOK	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN	
74	10731	industri kakao	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lahan kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur	
75	10732	industri makanan dari coklat dan kembang gula	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri	
76	10733	industri minuman buah - bunsan dan sari-sari keras	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri	
77	10734	industri kembang gula	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KELOMPOK	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN	
88	10741	industri makanan bayi	seluruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lahan kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur	
89	10742	industri kue basah	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
91	10743	industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya bukan kacang, kacang dan tahu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
92	10744	industri tepung, terigu, perik dan sekraxnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
93	10745	industri lemak nabati	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KELOMPOK	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN	
78	10739	industri kembang gula lainnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
79	10740	industri makanan, mie dan produk sejenisnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
80	10730	industri makanan dan minuman lainnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
81	10761	industri pengolahan kopi	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KELOMPOK	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN	
94	10746	industri daging	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
95	10749	industri makanan lainnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
96	10801	industri pertanian tanaman hias	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
97	10802	industri konsentrat makanan hewan	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	duplikat/ wali kota, gubernur jika lokasi lahan kabupatèn/ kota	gubernur	
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lahan perizinan untuk semua skala usaha	gubernur, menteri
98	11032	industri meat	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan Ibtis	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lahan kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUBANG USUHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUBANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USUHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KETERANGAN
82	10702	industri pengolahan hasil (hasil industri)	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/ wakil ketua gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha
83	10703	industri pengolahan the	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/ wakil ketua gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha
84	10771	industri kecap	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/ wakil ketua gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha
85	10772	industri bumbu masak dan penyedap makanan	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/ wakil ketua gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUBANG USUHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUBANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USUHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KETERANGAN
99	11040	industri makanan ringan	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/ wakil ketua gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha
100	11050	industri air kemasan dan air mineral	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/ wakil ketua gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha
101	11051	industri air kemasan	seharus	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi bisnis kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
102	11052	industri air kemasan isi ulang	seharus	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi bisnis kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
103	11090	industri makanan kemasan	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	kepala/ wakil ketua gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika lokasi bisnis provinsi untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUBANG USUHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUBANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USUHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RISIKO	PARAMETER	KETERANGAN
104	12011	industri eperet kretek tangan	seharus	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi bisnis kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
105	12012	industri rokok gitan	seharus	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi bisnis kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
106	12013	industri eperet kretek mesin	seharus	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi bisnis kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
107	12019	industri rokok batanga	seharus	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi bisnis kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur
108	12091	industri pengeringan dan pengalihan tembakau	seharus	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	menengah rendah	NB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi bisnis kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Table with 12 columns: NO, KODE KBLI, JUDUL KBLI, RUANG LINGKUP KEGIATAN, PARAMETER RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, JANGKA WAKTU, MASA BERLAKU, KEWENANGAN PEMERINTAH. Contains rows 91-94.

Table with 12 columns: NO, KODE KBLI, JUDUL KBLI, RUANG LINGKUP KEGIATAN, PARAMETER RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, JANGKA WAKTU, MASA BERLAKU, KEWENANGAN PEMERINTAH. Contains rows 95-99.

Table with 12 columns: NO, KODE KBLI, JUDUL KBLI, RUANG LINGKUP KEGIATAN, PARAMETER RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, JANGKA WAKTU, MASA BERLAKU, KEWENANGAN PEMERINTAH. Contains rows 100-113.

Table with 12 columns: NO, KODE KBLI, JUDUL KBLI, RUANG LINGKUP KEGIATAN, PARAMETER RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, JANGKA WAKTU, MASA BERLAKU, KEWENANGAN PEMERINTAH. Contains rows 114-118.

Table with 12 columns: NO, KODE KBLI, JUDUL KBLI, RUANG LINGKUP KEGIATAN, PARAMETER RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, JANGKA WAKTU, MASA BERLAKU, KEWENANGAN PEMERINTAH. Contains rows 119-132.

Table with 12 columns: NO, KODE KBLI, JUDUL KBLI, RUANG LINGKUP KEGIATAN, PARAMETER RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, JANGKA WAKTU, MASA BERLAKU, KEWENANGAN PEMERINTAH. Contains rows 133-138.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHAA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RIBKO		PERIZINAN BERUSAHAA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RIBKO SKALA USAHAA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER RIBKO	KEWENANGAN
110	13111	indukansi pembuatan aspal tefalit	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
111	13112	indukansi pemantaban besang	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
112	13113	indukansi pemantaban besang jati	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
113	13121	indukansi pertanaman (dalam pertanaman budidaya gula dan batang kelapa)	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
114	13122	indukansi buah temau laut	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
115	13123	indukansi buah temau daratan	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
116	13131	indukansi pemertumbuhan besang	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
117	13132	indukansi pemertumbuhan bambu	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
118	13133	indukansi pemantaban bambu	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
119	13134	indukansi baliak	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHAA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RIBKO		PERIZINAN BERUSAHAA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RIBKO SKALA USAHAA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER RIBKO	KEWENANGAN
129	13920	indukansi barang jadi tekstil lainnya	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
130	13930	indukansi karpet dan permadani	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
131	13941	indukansi tali	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
132	13942	indukansi besang dari tali	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	
133	13991	indukansi kaus pria	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
134	13992	indukansi yang menggunakan kain berpadam (selendang)	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
135	13993	indukansi sarung	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
136	13994	indukansi kaus ibu	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
137	13995	indukansi korpik	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
138	13996	indukansi kaus bali dan kaus jaring	seluruh	ukuran kecil dan ukuran menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
			seluruh	ukuran besar	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ menteri	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHAA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RIBKO		PERIZINAN BERUSAHAA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RIBKO SKALA USAHAA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER RIBKO	KEWENANGAN
139	13997	indukansi kaus kaki	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
140	13998	indukansi sarung	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
141	13999	indukansi kaus ibu	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	
142	13999	indukansi kaus ibu	seluruh	ukuran kecil, ukuran menengah, dan ukuran besar	NA	tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil, menengah, dan besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wali kota/ gubernur jika tidak beres kabupaten/ kota	

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEHATIAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAYANAN						
120	13911	industri kain rajutan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
121	13912	industri kain wolanan/border	sejarah	usaha kecil dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/kota	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
122	13913	industri kain rami rajutan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
123	13921	industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
124	13922	industri barang jadi tekstil lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEHATIAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAYANAN						
139	13990	industri tekstil lainnya YIB	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
140	14111	industri pakaian jadi (bennek) dari benak	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
141	14112	industri pakaian jadi (bennek) dari benak	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
142	14130	pengalihan dan pemindahan hak milik perorangan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/kota	gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar dan industri menengah	gubernur
143	14131	industri pengalihan paksaan dari kecil	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEHATIAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAYANAN						
144	14132	industri pengalihan paksaan dari kecil	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
145	14200	industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
146	14300	industri pakaian jadi rajutan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
147	14301	industri pakaian jadi wolanan/border	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
148	14302	industri rajutan keme-kami dan sejenisnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari		skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERSAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					
120	13029	industri barang jadi tekstil lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
130	13030	industri kertas dan perampal	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
131	13041	industri tali	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
132	13042	industri barang dari tek	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
133	13091	industri kain gita	sejarah	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar, kecil dan menengah	gubernur

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERSAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					
134	13092	industri yang memproduksi kain keperluan industri	sejarah	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar, kecil dan menengah	gubernur
135	13093	industri esmeben	sejarah	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar, kecil dan menengah	gubernur
136	13094	industri kain ben	sejarah	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar, kecil dan menengah	gubernur
137	13095	industri kapuk	sejarah	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar, kecil dan menengah	gubernur
138	13096	industri kain tulle dan kain jaring	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERSAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					
139	15111	industri pengawetan kulit	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
140	15112	industri penyamakan kulit	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
141	15113	industri penjahitan kulit busa	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
142	15114	industri kulit busana/ aksesoris	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
143	15121	industri barang dari kulit dan kulit busana untuk keperluan pribadi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERSAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH					
144	15122	industri barang dari kulit dan kulit busana untuk keperluan teknik/ industri	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
145	15123	industri barang dari kulit dan kulit busana untuk keperluan busana	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
146	15124	industri barang dari kulit dan kulit busana untuk keperluan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
147	15201	industri alas kaki untuk keperluan sehari hari	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
148	15202	industri sepatu olahraga	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menggunakan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEPUNANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEPUNANGAN
				Skala Usaha	Luas Lahan						
148	14303	industri rajutan kasa kain dan sejenisnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
149	15111	industri pengawetan kulit	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
150	15112	industri penyamakan kulit	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
151	15113	industri sepatu kulit baru	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEPUNANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEPUNANGAN
				Skala Usaha	Luas Lahan						
152	15114	industri kulit bukaan/ istilah	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
153	15121	industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
154	15122	industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/ industri	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
155	15123	industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEPUNANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEPUNANGAN
				Skala Usaha	Luas Lahan						
169	16214	industri veneer	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
170	16215	industri kayu laminasi	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah standar	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
171	16221	industri barang hampas dari kayu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
172	16222	industri bangunan prefabrikasi dari kayu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
173	16230	industri woodch dari kayu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEPUNANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEPUNANGAN
				Skala Usaha	Luas Lahan						
174	16291	industri barang anyaman dari rotan dan bambu	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur
175	16292	industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur
176	16293	industri kerajinan ukiran dari kayu tidak berbulu	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur
177	16294	industri alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur
178	16295	industri kayu balok dan jekel baru	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wakil kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
165	16105	industri perhiasan kayu dan logam	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MI dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	MI dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
166	16211	industri kayu lapis	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MI	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	MI dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
167	16212	industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MI	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	MI dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
168	16213	industri panel kayu laminasi	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MI	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	MI dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
169	16214	industri veneer	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
170	16215	industri kayu laminasi	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
171	16221	industri barang bangunan dari kayu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
172	16222	industri bangunan prefabrikasi dari kayu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
189	18111	industri penataan interior	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	rendah	NIB dan sert	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
190	18112	industri penataan eksterior	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sert	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur,
191	18113	industri penataan 3D printing	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur,
192	18120	kegiatan jasa perancangan, percontohan	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertikat standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
193	18201	produksi media rekaman musik, man, dan piranti lunak	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
194	18202	produksi media rekaman film dan video	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	BE	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	BE dan sertifikat standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
195	18100	industri produk dari buku, buku	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	BE dan sert	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
196	18212	industri pengolahan minyak pelarut	seluruh	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertikat standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur,
197	19211	industri pengolahan kretek, minyak pelarut kretek	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertikat standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
198	19291	industri produk dari hasil olahan minyak biji	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	BE dan sertikat standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kepala/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	tinggi	BE dan sert	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERKUMBUHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
173	16230	instansi wadah dari baru	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
174	16291	instansi barang-barang dari rumah dan hantu	sekarang	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, tidak indikasi menengah/ kota, tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
175	16292	instansi barang-barang dari bangunan bukit, rumah dan hantu	sekarang	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, tidak indikasi menengah/ kota, tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
176	16293	instansi koridor wisata dari koridor wisata	sekarang	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, tidak indikasi menengah/ kota, tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
177	16294	instansi alat dapur dari dapur rumah dan hantu	sekarang	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, tidak indikasi menengah/ kota, tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERKUMBUHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
190	19292	instansi tempat baru	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
200	20111	instansi kios dan organisme hidup dan tidak	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
201	20112	instansi kios dan organisme tidak hidup	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
202	20113	instansi kios dan organisme pangan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
203	20114	instansi kios dan organisme lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERKUMBUHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
178	16295	instansi bisnis dari pasar baru	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
179	16299	instansi barang dari kayu, logam, gelas, keramik, dll	sekarang	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, tidak indikasi menengah/ kota, tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
180	17011	instansi butik rumah tangga	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah/rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
181	17012	instansi restoran keluarga	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah/rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
182	17013	instansi restoran keluarga	sekarang	usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar	NA	rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, tidak indikasi menengah/ kota, tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERKUMBUHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
204	20110	instansi kios dan organisme yang berwujud dari hasil pertanian	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	rendah	2 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
205	20116	instansi kios dan organisme untuk bahan baku dan alat pertanian, alat mesin dan pangan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah/rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
206	20117	instansi kios dan organisme yang berwujud dari mineral, gas, logam dan hasil hutan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
207	20118	instansi kios dan organisme yang menggunakan bahan kimia lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota
208	20119	instansi kios dan organisme lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	gubernur/ wali kota, gubernur/ wali kota kabupaten/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	rendah	7 hari	selama peletak usaha mengajukan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	gubernur/ bupati/ wali kota, gubernur/ bupati/ wali kota kabupaten/ kota

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH						
183	17014	indikasi kertas khusus	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah, dan usaho besar	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
184	17019	indikasi kertas lainnya	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
185	17021	indikasi kertas dan papan kertas lengkung/bengkok	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
186	17022	indikasi kerajinan dan kotak dari kerbau dan kerbau	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
187	17023	indikasi kerajinan tenun	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH						
206	20121	indikasi produk tekstil/ non tekstil hasil makro petaner	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
210	20122	indikasi produk tekstil/ non tekstil hasil makro petaner	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
211	20123	indikasi produk tekstil/ non tekstil hasil makro petaner	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
212	20124	indikasi produk tekstil/ non tekstil hasil makro petaner	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
213	20125	indikasi produk tekstil/ non tekstil hasil makro petaner	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH						
188	17009	indikasi barang dari kerbau dan sapi/ kerbau lainnya yang tidak dapat dibedakan di tempat lain	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
189	18111	indikasi perikanan umum	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
190	18112	indikasi perikanan khusus	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
191	18113	indikasi perikanan 30 perikanan	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
192	18120	kegiatan jasa penunjang perikanan	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMPAH						
214	20126	indikasi produk hasil makro	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
215	20127	indikasi produk peternakan	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
216	20128	indikasi produk lainnya	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
217	20129	indikasi produk lainnya	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.
218	20131	indikasi produk lainnya	sekarang	usaho kecil dan usaho menengah	NA	rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		SEKALA USAHA	LUAS LAHAN							
218	20121	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
219	20132	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
220	20211	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
221	20212	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
222	20213	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		SEKALA USAHA	LUAS LAHAN							
223	20214	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
224	20221	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
225	20222	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
226	20223	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		SEKALA USAHA	LUAS LAHAN							
250	22121	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
251	22122	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
252	22123	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
253	22191	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
254	22192	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		SEKALA USAHA	LUAS LAHAN							
255	22193	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
256	22194	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
257	22199	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
258	22210	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
259	22220	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		SEKALA USAHA	LUAS LAHAN							
260	22221	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
261	22222	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
262	22223	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
263	22224	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah
264	22225	Industri dan/atau kegiatan industri dan/atau kegiatan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	7 hari	sejarah	sejarah	sejarah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
227	20231	Industri bahan dan bahan pembentuk keperluan rumah tangga	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NEB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
228	20232	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NEB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
229	20233	Industri kosmetik untuk hewan	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
230	20234	Industri pernak gigi	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
200	22250	Industri pipa plastik dan perangkapannya	seharus	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi industri kabupaten/ kota untuk skala industri menengah	Gubernur
201	22291	Industri barang plastik lembaran	seharus	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi industri kabupaten/ kota untuk skala industri menengah	Gubernur
202	22292	Industri perangkapan dan pernak raman tangga (tidak termasuk permady)	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NEB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
203	22293	Industri barang dan peralatan plastik/ industri dan plastik	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NEB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
204	22299	Industri barang plastik lainnya yang bukan industri kecil dan menengah	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NEB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
201	20291	Industri pernak/ lem	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
202	20292	Industri bahan pelat	seharus	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi industri kabupaten/ kota untuk skala industri menengah	Gubernur
203	20293	Industri tinta	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
204	20294	Industri esekay plastik	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NEB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota
205	20295	Industri kerik api	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	kegiatan/ wali kota, gubernur jika tidak lintas kabupaten/ kota
			seharus	usaha besar	NA	menengah tinggi	NEB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak lintas kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEHATIAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO	PARAMETER KEWENANGAN				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAMBAT	SKALA USAHA				LUAS LAMBAT	
236	20296	Industri manufaktur kimia dasar (tegang)	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
237	20298	Industri barang kimia lainnya YME	setengah	skala kecil dan sedang	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
238	20301	Industri serat/ benang/ strip/ filamen khusus	setengah	skala kecil, sedang menengah dan skala besar	NA	tinggi	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
239	20302	Industri serat rajut busana	setengah	skala kecil, sedang menengah dan skala besar	NA	tinggi	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
240	31011	Industri bahan farmasi untuk manusia	setengah	skala kecil, sedang menengah dan skala besar	NA	tinggi	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEHATIAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO	PARAMETER KEWENANGAN				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAMBAT	SKALA USAHA				LUAS LAMBAT	
270	23123	Industri lembaran dari kaca	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
271	23134	Industri alat biokimia/ medis	setengah	skala kecil dan sedang	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
272	23120	Industri barang lainnya dari kaca	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
273	39911	Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang bukan api	setengah	skala kecil dan sedang	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
274	23010	Industri barang dari gelas (air/ keramik lainnya)	setengah	skala kecil dan sedang	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEHATIAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO	PARAMETER KEWENANGAN				KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAMBAT	SKALA USAHA				LUAS LAMBAT	
241	21012	Industri produk kosmetik manufaktur	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
242	21013	Industri produk obat tradisional termasuk tomas	setengah	skala kecil, sedang menengah dan skala besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
243	21014	Industri bahan farmasi untuk hewan	setengah	skala kecil, sedang menengah dan skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
244	21015	Industri alat kesehatan dalam sub golongan 2101	setengah	skala kecil dan sedang	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
245	21021	Industri bahan kimia obat tradisional	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
275	23024	Industri bata, bata dari tanah liat/ keramik	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
276	23022	Industri genteng dari tanah liat/ keramik	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
277	23023	Industri penakut semen dan per semen	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
278	23020	Industri bahan bangunan dari tanah liat/ keramik bukan bata/ bata dan genteng	setengah	skala kecil dan sedang	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
			setengah	skala besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	
279	23031	Industri perlengkapan rumah tangga dari perunggu	setengah	skala kecil dan sedang	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/ wali kota/ bupati/ wal kota/ gubernur jika lokasi bisnis kabupaten/ kota	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
246	21002	industri produk obat tradisional	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
247	21003	industri produk obat tradisional campur keram	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
248	22111	industri bus bus dan bus bakul	seleksi	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
249	22112	industri kendaraan bus	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
250	22121	industri peragaapan karet	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
280	23002	industri pengolahan rumput tangga dari tumbuh liar/ keramik	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
281	23003	industri alat kecantikan dan alat tato/ teknik dari perhiasan	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
282	23030	industri benang tenun batik/ keramik dan perhiasan lainnya selain bahan logam mulia	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
283	23041	industri semen	seleksi	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
284	23042	industri kapur	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
285	23043	industri gips	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
286	23051	industri barang dari semen	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
287	23052	industri barang dari kapur	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
288	23053	industri barang dari semen dan gips untuk konstruksi	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota
			seleksi	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
289	23054	industri barang dari gips untuk konstruksi	seleksi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika lokasi lintas kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
253	22193	industri barang dari karet untuk keperluan industri/retail	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
256	22194	industri barang dari karet untuk kebutuhan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
257	22199	industri barang dari karet lainnya TSM	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
258	22210	industri barang dari plastik untuk bangunan	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur dan Bupati/Walikota
259	22220	industri barang dari plastik untuk perumahan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
260	22230	industri pipa plastik dan perlengkapan	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur dan Bupati/Walikota
261	22291	industri barang plastik benjolan	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur dan Bupati/Walikota
262	22292	industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
263	22293	industri barang dari plastik untuk keperluan industri/retail/kebutuhan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
264	22299	industri barang plastik lainnya TSM untuk skala industri kecil dan menengah	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
290	23956	industri barang dari tekstil termasuk perlengkapan bangunan	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur dan Bupati/Walikota
291	23956	industri barang dari tekstil termasuk perlengkapan	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur dan Bupati/Walikota
292	23957	industri barang dari tekstil siap pakai	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
293	23959	industri barang dari seramik, kapur, gips dan bahan lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
294	23961	industri barang dari marmer dan granit termasuk perlengkapan bangunan dan pajangan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
295	23962	industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
296	23963	industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
297	23969	industri barang dari marmer, granit dan bahan lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
298	23990	industri barang gelas bukan bagian lainnya TSM	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
299	24956	industri barang dari tekstil termasuk perlengkapan bangunan	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur dan Bupati/Walikota
300	24956	industri barang dari tekstil termasuk perlengkapan	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur dan Bupati/Walikota
301	24957	industri barang dari tekstil siap pakai	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
302	24959	industri barang dari seramik, kapur, gips dan bahan lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
303	24961	industri barang dari marmer dan granit termasuk perlengkapan bangunan dan pajangan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
304	24962	industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
305	24963	industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
306	24969	industri barang dari marmer, granit dan bahan lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota
307	24990	industri barang gelas bukan bagian lainnya TSM	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur dan Bupati/Walikota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	BIDANG USAHA		RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
		JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				PARAMETER	KERUMAHAN
265	23111	industri kaca lembaran	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III	Gubernur
266	23112	industri kaca perhiasan	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III	Gubernur
267	23119	industri kaca lainnya	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III	Gubernur
268	23121	industri perhiasan dan perhiasan rumah tangga dari kaca	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
269	23122	industri perhiasan dan perhiasan rumah tangga dari kaca	sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
269	23122	industri alat-alat laboratorium farmasi dan kesehatan dari kaca	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur

NO	KODE KBLI	BIDANG USAHA		RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
		JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				PARAMETER	KERUMAHAN
270	23123	industri keramik dari kaca	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
271	23124	industri alat laboratorium kimia	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
272	23129	industri barang lainnya dari kaca	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
273	23911	industri lain, motor, mesin, dan aksesorisnya yang lain ag	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	BIDANG USAHA		RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
		JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				PARAMETER	KERUMAHAN
299	24101	industri besi dan baja dasar (non cast steel making)	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III	Gubernur
300	24102	industri pengalangan baja pejal Rolling	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III	Gubernur
301	24103	industri pipa dan tabung baja dan besi dari besi	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
302	24104	industri pembuatan logam dasar tuas	sekaruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III	Gubernur
303	24200	industri pembuatan logam dasar bukan besi	sekaruh	usaha kecil	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota

NO	KODE KBLI	BIDANG USAHA		RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
		JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				PARAMETER	KERUMAHAN
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
304	34200	industri pengalangan logam bukan besi	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
305	24204	industri ekstraksi logam bukan besi	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil dan menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
306	24208	industri pipa dan wadahnya pipa dari logam bukan besi dan baja	sekaruh	usaha kecil	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
307	24310	industri pengecoran besi dan baja	sekaruh	usaha kecil	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri kecil	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	BIDANG USAHA		RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
		JUDUL KBLI	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN				PARAMETER	KERUMAHAN
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur
			sekaruh	usaha menengah	NA	menengah rendah	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, Gubernur jika kelas I/II/III kabupaten/ kota
			sekaruh	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan usaha	skala industri besar	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
274	22919	industri barang api dari tanah liat/ keramik lainnya	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
275	22921	industri bahan bata dari tanah liat/ keramik	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
276	22922	industri geramik dari tanah liat/ keramik	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
277	22923	industri peralatan saniter dari perunggu	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
208	23220	industri pengolahan logam bukan besi dari baja	separuh	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
			separuh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
209	25111	industri barang dari logam bukan besi dengan siap pasang untuk tangkapan	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
210	25112	industri barang dari logam bukan besi dengan siap pasang untuk tangkapan	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
211	25113	industri kontraktor beton siap pasang dari baja untuk tangkapan	separuh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas menengah/ kelas usaha Kabupaten/ kota	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
212	25119	industri barang dari logam siap pasang untuk konektansi listrik	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
228	23209	industri bahan bangunan dari tanah liat/ keramik beton batu bata dan geramik	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
279	23201	industri perlengkapan rumah tangga dari perunggu	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
280	23202	industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/ keramik	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
281	23203	industri alat laboratorium dan alat listrik/ elektronik dari perunggu	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
			separuh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
213	23120	industri logam, tembaga air dan wadah dari logam	separuh	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
			separuh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
214	23130	industri generator siap pakai pemancar	separuh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
215	23200	industri perlengkapan dan peralatan	separuh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas menengah/ kelas usaha Kabupaten/ kota	Gubernur, menteri jika tidak dilaksanakan provinsi untuk semua skala usaha
216	23910	industri perhiasan, perhiasan, perhiasan dan perhiasan logam; peralatan musik	separuh	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota
			separuh	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah	Diputuf/ wali kota, Gubernur jika tidak dilaksanakan Kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA				RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
282	23639	Industri barang tekstil dan keramik dan perhiasan lainnya selain bahan logam mulia	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
283	23641	Industri serami	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
284	23642	Industri kapur	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
285	23643	Industri gips	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
286	23651	Industri barang dari serami	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah

NO	BIDANG USAHA				RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
287	23652	Industri barang dari kapur	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
288	23653	Industri barang dari serami dan kapur untuk konstruksi	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
289	23654	Industri barang dari gips untuk konstruksi	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
290	23655	Industri barang dari serami untuk keperluan bahan bangunan	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
291	23656	Industri barang dari serami untuk keperluan industri	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA				RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
317	23620	Jasa industri teknik berbagai program khusus logam dan logam dari logam	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
318	23631	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
319	23632	Industri alat potong dan perkakas tangan pertambangan	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
320	23633	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah

NO	BIDANG USAHA				RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
321	23634	Industri peralatan rumah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
322	23640	Industri ember, baskor, dan alat ukur lainnya dari logam	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
323	23651	Industri barang dari keramik	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
324	23652	Industri pasta, cat dan hias	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
325	23651	Industri tembok, lilin, kanvas, dan sejenisnya	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA				RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
326	23639	Industri barang tekstil dan keramik dan perhiasan lainnya selain bahan logam mulia	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
327	23641	Industri serami	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
328	23642	Industri kapur	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
329	23643	Industri gips	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
330	23651	Industri barang dari serami	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMAH				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
292	29257	Industri motor atau jenis atap pelat	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan dan peralihan kerja dari sistem	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
293	29399	Industri barang dari semen, kapur, gipsum dan arden lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
294	29961	Industri barang dari maner dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
295	29962	Industri barang dari maner dan granit untuk keperluan bahan bangunan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMAH				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
296	29963	Industri barang dari besi untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
297	29969	Industri barang dari maner, granit dan batu lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
298	29960	Industri barang galian bukan logam lainnya YDI	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
299	24101	Industri besi dan baja kasar (non aral steel making)	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
300	24102	Industri pengalangan baja terkecil (rolling)	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMAH				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
326	29992	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
327	29993	Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
328	29994	Industri pembuatan profil	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
329	29995	Industri logam dari logam	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
330	29996	Industri barang logam lainnya YDI	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SKALA USAHA	LUAS LAMAH				TINGKAT RISIKO	PARAMETER
331	26110	Industri barang elektronik dan perangkat elektronik	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur
			sekarang	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
332	26120	Industri alat elektronik dan komponen elektronika lainnya	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
333	26210	Industri komputer dari/ atau peralatan komputer	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
334	26220	Industri perlengkapan komputer	sekarang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika tidak sesuai babapan/ kota
			sekarang	usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota
335	26310	Industri peralatan telepon dan telekomunikasi	sekarang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur
			sekarang	usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	tidak industri besar	Gubernur, menteri jika tidak sesuai babapan/ kota

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO				PERIZINAN BERSAHAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SEALA USAHA	LULUS LAMPAU							
301	24163	industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
302	24201	industri pembuatan logam dasar mika	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur	
303	24202	industri pembuatan logam dasar buhlon besi	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
304	24203	industri pengalangan logam buhlon besi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO				PERIZINAN BERSAHAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SEALA USAHA	LULUS LAMPAU							
306	20320	industri pembuatan bus/kendaraan tanpa kabel (wireless)	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur	
307	20391	industri kerajinan keramik (keramik)	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NIB	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar, sedang, dan kecil	Gubernur	
308	20399	industri pembuatan bus/kendaraan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
309	20410	industri servis dan/atau perawatan kendaraan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
340	20420	industri pembuatan perhiasan, perhiasan dan perlengkapan untuk dan dengan industri fashion	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Gubernur	

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO				PERIZINAN BERSAHAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SEALA USAHA	LULUS LAMPAU							
305	24204	industri ekstraksi logam buhlon besi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
306	24205	industri pipa dan sambungan pipa dari logam buhlon besi dan baja	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
307	24310	industri pengecoran besi dan baja	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
308	24320	industri pengecoran logam buhlon besi dan baja	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	1A	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lisensi	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO				PERIZINAN BERSAHAMA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
				PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO	PARAMETER				KEWENANGAN	
				SEALA USAHA	LULUS LAMPAU							
341	20490	industri produksi media dan video elektronik lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
342	20511	industri alat ukur dan alat uji mekanik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Gubernur	
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
343	20512	industri alat ukur dan alat uji elektronik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
344	20513	industri alat ukur dan alat uji elektromik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	
345	20514	industri alat uji gelas perona industri	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Diputi/wali kota, Gubernur, atau Bupati/walikota	
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanaan kegiatan usaha	skala industri menengah	Gubernur, Bupati/walikota, dan Bupati/walikota	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BEREKSA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
300	25111	industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A	selama pelepasan usaha (mengajukan kegiatan usaha)	skala industri kecil dan menengah	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
310	25112	industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A	selama pelepasan usaha (mengajukan kegiatan usaha)	skala industri kecil dan menengah	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIS dan izin	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
311	25113	industri konstruksi besi siap pasang dari baja untuk bangunan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
312	25119	industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A	selama pelepasan usaha (mengajukan kegiatan usaha)	skala industri kecil dan menengah	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIS dan izin	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BEREKSA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
313	25120	industri tangki, tankon air dan wadah dari logam	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIS	3A	selama pelepasan usaha (mengajukan kegiatan usaha)	skala industri kecil	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri menengah	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
314	25130	industri generator siap, bukan tipe pemenuh	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A	selama pelepasan usaha (mengajukan kegiatan usaha)	skala industri kecil dan menengah	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
315	25200	industri senjata dan amunisi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIS dan izin	7 hari		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
316	25910	industri perhiasan, perhiasan, perhiasan dan perhiasan logam, termasuk busuk	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIS	3A	selama pelepasan usaha (mengajukan kegiatan usaha)	skala industri kecil	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri menengah	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BEREKSA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
340	30320	industri alat ukur untuk	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri kecil dan menengah	Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri besar	Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
347	3601	industri peralatan listrik/ atau N. pertambangan dan energi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
348	3602	industri peralatan elektronika dan elektronika	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
349	36730	industri peralatan fotograf	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
350	3679	industri kamera cinematografi proyektor dan pemrosesan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BEREKSA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
351	30792	industri terapan dan instrumen optik bukan kaca mata	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
352	20030	industri mesin stamping dan mesin tekan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NIS	3A		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
353	2711	industri motor listrik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri menengah	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
354	27112	industri mesin pemrosesan logam	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri menengah	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
355	27113	industri penghalang tegangan transmisi/atau, pengalihan arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage controller)	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIS dan sertifikasi standar	3A		skala industri menengah	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BEREKSA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
356	25111	industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A		skala industri kecil dan menengah	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
357	25112	industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A		skala industri kecil dan menengah	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIS dan izin	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
358	25113	industri konstruksi besi siap pasang dari baja untuk bangunan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar, lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIS dan sertifikasi standar	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
359	25119	industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIS	3A		skala industri kecil dan menengah	Diputi/ wali kota, Gubernur jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	tinggi	NIS dan izin	7 hari		skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi kegiatan/ kota kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USHAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PENJENJAN BERISIKO	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LUAS LAHAN						
317	25920	Jasa Industri Usaha Berbagi Penghasilan Aktiva Tetap dan Berbagi dari Iqan	selekeh	usaha kecil	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha menengah	NA	renekah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sira	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
318	25931	Industri alat pereng dan perlakaa tangar untuk peralakaan	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
319	25932	Industri alat pereng dan perlakaa tangar peralakaan	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;
320	25933	Industri alat pereng dan perlakaa tangar yang dipakaaan dalam rumah tangar	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sira	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha

NO	BIDANG USHAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PENJENJAN BERISIKO	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LUAS LAHAN						
321	25934	Industri peralakaan umum	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sira	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
322	25940	Industri ember, kaleng, uruan dan wadah selasa dari lagan	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sira	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
323	25951	Industri barang dari logam	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sira	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
324	25952	Industri paio, sur dan busa	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sira	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha

NO	BIDANG USHAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PENJENJAN BERISIKO	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LUAS LAHAN						
326	27120	Industri peralakaan pengantaa dan peralakaan lantia	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika lakaali lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
327	27204	Industri kaba lantia lantia lantia lantia lantia lantia	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	renekah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;
328	27292	Industri akumalater lantia	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika selasa lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
329	27265	Industri lantia lantia lantia lantia lantia lantia	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	renekah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;
330	27110	Industri kaba selasa	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	renekah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;

NO	BIDANG USHAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PENJENJAN BERISIKO	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LUAS LAHAN						
361	27320	Industri kaba lantia lantia lantia lantia lantia lantia	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sira	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;
362	27330	Industri peralakaan kaba	selekeh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	renekah	NIB	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri kecil dan menengah	Dipukul/ waki kota Gubernur jika selasa lantia hahapater/ kota
			selekeh	usaha besar	NA	renekah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar	Dipemerat; menteri jika selasa lantia provinsi untuk selasa sikala usaha
363	27401	Industri lantia lantia lantia lantia lantia lantia	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;
364	27402	Industri lantia lantia lantia lantia lantia lantia	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;
365	27403	Industri peralakaan peralakaan lantia lantia lantia lantia lantia lantia	selekeh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	renekah renkah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama peletak usaha menjalankan kegiatan usaha	sikala industri besar, lakaali lantia hahapater/ kota	Dipemerat;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMBEK					
325	25901	industri bakery, filling, kanter dan sebagainya	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
326	25902	industri peralatan dapur dan pernakaliran meja dari logam	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
327	25903	industri perbaikan rumah tangga dari logam bahan produksi dapur dan pernakaliran meja	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
328	25904	industri pembuatan profil	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
329	25905	industri kempas dari logam	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMBEK					
330	25906	industri barang logam hitam Yid	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
331	26110	industri barang elektronik dan konverter elektronik	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
332	26120	industri semi konduktor dan komponen elektronika lainnya	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
333	26210	industri komputer dan/jalan pernakaliran komputer	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
334	26210	industri komputer dan/jalan pernakaliran komputer	sekaruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMBEK					
306	27494	industri barang besi	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
307	27499	industri pembuatan perungguan lainnya	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
308	27510	industri pembuatan isolasi rumah tangga	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
309	27520	industri pembuatan elektrotermal rumah tangga	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
320	27530	industri pembuatan pemecah dan mosaic keramik lantai rumah tangga	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMBEK					
321	27500	industri pembuatan lantai keramik	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
322	28111	industri mesin cap, turbin, dan lain-lain	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur
323	28112	industri mesin pembekuan daging	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur
324	28113	industri komponen dan suku cadang mesin dari turbin	sekaruh	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
325	28120	industri pembuatan tenaga net cair dan gas	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAMBEK					
306	27494	industri barang besi	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
307	27499	industri pembuatan perungguan lainnya	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
308	27510	industri pembuatan isolasi rumah tangga	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
309	27520	industri pembuatan elektrotermal rumah tangga	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
320	27530	industri pembuatan pemecah dan mosaic keramik lantai rumah tangga	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur
321	27500	industri pembuatan lantai keramik	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
322	28111	industri mesin cap, turbin, dan lain-lain	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur
323	28112	industri mesin pembekuan daging	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur
324	28113	industri komponen dan suku cadang mesin dari turbin	sekaruh	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha
325	28120	industri pembuatan tenaga net cair dan gas	sekaruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku tidak dipersempit lagi; Gubernur jika tidak bertitik standar	Gubernur; menteri jika tidak bertitik standar untuk semua skala usaha

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERSIKAP	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER RISIKO	KEWENANGAN
				Skala Usaha	Luas Lahan						
324	26220	industri perengkapian komputer	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri besar	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
325	26210	industri peralatan telepon dan telekomunikasi	seluruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi tidak kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
326	26230	industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)	seluruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi tidak kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
327	26301	industri kaku cetak (hard copy)	seluruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NIB	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi tidak kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
328	26399	industri peralatan komunikasi lainnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERSIKAP	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER RISIKO	KEWENANGAN
				Skala Usaha	Luas Lahan						
326	28150	industri penge-batangan, kompos, kayu dan kayu-kayu	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
327	28140	industri barang, logam gip dan keramik pengeras jalan	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri besar	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
328	28151	industri oven, perapik dan tangki pemukul serpih yang tidak menggunakan arus listrik	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
329	28152	industri oven, perapik dan tangki pemukul serpih yang menggunakan arus listrik	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
330	28160	industri alat pemangkat dan pemampatan	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERSIKAP	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER RISIKO	KEWENANGAN
				Skala Usaha	Luas Lahan						
339	26410	industri televisi dan/atau peralatan televisi	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
340	26420	industri peralatan perekam, pemroses dan pengoptis audio dan video, bukan industri televisi	seluruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi tidak kabupaten/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
341	26490	industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	seluruh	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
			seluruh	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri besar	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota
342	26511	industri alat ukur dan alat uji manual	seluruh	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dupont/ wali kota, Gubernur jika lokasi tidak kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG UPAHA			RIBKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KETERANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RIBKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER KETERANGAN
343	26512	industri alat ukur dan alat uji elektronika	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	memegang rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
344	26513	industri alat ukur dan alat uji elektronika	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
345	26514	industri alat uji proses mekanis	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
346	26520	industri alat ukur ukutan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	memegang rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
347	26601	industri peralatan instalasi sistem X, perlengkapan dan sebagainya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	memegang rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai

NO	RUANG UPAHA			RIBKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KETERANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RIBKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER KETERANGAN
348	26602	industri peralatan elektronika dan elektronik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
349	26710	industri peralatan logam	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	memegang tinggi	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi tidak sesuai	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
350	26791	industri busana (konvensional) jahit dan pertukernya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	memegang tinggi	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi tidak sesuai	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
351	26792	industri tempung dan instrumen optik bukan kaca mata	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	memegang tinggi	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi tidak sesuai	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
352	26800	industri mesin optik dan mesin optik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi tidak sesuai	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG UPAHA			RIBKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KETERANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RIBKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER KETERANGAN
346	26180	industri perbaikan tenaga kerja (dibutuhkan tenaga)	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
347	26191	industri mesin teknik pemangkasan, pemendekan dan sebagainya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	memegang rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
348	26192	industri mesin pemangkas	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
349	26193	industri mesin pendingin	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
349	26190	industri mesin teknik pertanian umum lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	memegang rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai

NO	RUANG UPAHA			RIBKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KETERANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RIBKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER KETERANGAN
351	26210	industri mesin pertanian dan sebagainya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
352	26221	industri mesin dan perkakas mesin untuk pengisian bahan bakar	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
353	26222	industri mesin dan perkakas mesin untuk pengisian bahan bakar	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
354	26223	industri mesin dan perkakas mesin untuk pengisian bahan bakar (jenis dan baru)	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG UPAHA			RIBKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KETERANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RIBKO SKALA USAHA	LUAS LAHAN				TINGKAT RIBKO	PARAMETER KETERANGAN
346	26180	industri perbaikan tenaga kerja (dibutuhkan tenaga)	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
347	26191	industri mesin teknik pemangkasan, pemendekan dan sebagainya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	memegang rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
348	26192	industri mesin pemangkas	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
349	26193	industri mesin pendingin	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai
349	26190	industri mesin teknik pertanian umum lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	memegang rendah	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur, menteri jika lokasi tidak sesuai

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG UBAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RIBKO		TINGKAT RIBKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEMERANGAN PEMBERINTAH	KEMERANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RIBKO	LEJAS LAMEN						
353	27111	industri mesin listrik	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
354	27112	industri mesin pembangkit listrik	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
355	27113	industri pengubah tegangan (transformer), pengganti arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
356	27120	industri peralatan pengontrol dan pemeliharaan listrik	sedang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
357	27201	industri batu baterai kering (batu baterai primer)	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NID dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak kelas provinsi untuk skala usaha

NO	RUANG UBAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RIBKO		TINGKAT RIBKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEMERANGAN PEMBERINTAH	KEMERANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RIBKO	LEJAS LAMEN						
358	28224	industri mesin dan perkakas metalurgi primer yang menghasilkan besi kasar	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
359	28229	industri mesin metalurgi	sedang	usaha kecil	NA	rendah	NID	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri kecil	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
			sedang	usaha menengah	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
			sedang	usaha besar	NA	menengah tinggi	NID dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak kelas provinsi untuk skala usaha
367	28240	industri mesin pemrosesan, pengalihan dan konstruksi	sedang	usaha kecil	NA	rendah	NID	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri kecil	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
			sedang	usaha menengah	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
			sedang	usaha besar	NA	menengah tinggi	NID dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak kelas provinsi untuk skala usaha
368	28250	industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau	sedang	usaha kecil	NA	rendah	RIP	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri kecil	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
			sedang	usaha menengah	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota

NO	RUANG UBAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RIBKO		TINGKAT RIBKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEMERANGAN PEMBERINTAH	KEMERANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RIBKO	LEJAS LAMEN						
359	27202	industri akumulasi listrik	sedang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NID	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
360	27203	industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NID dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
360	27340	industri kabel serat optik	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NID dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
361	27340	industri kabel listrik dan elektronik lainnya	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NID dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
362	27350	industri perkakas-pipa kabel	sedang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NID	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
			sedang	usaha besar	NA	menengah tinggi	NID dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur, menteri jika tidak kelas provinsi untuk skala usaha

NO	RUANG UBAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RIBKO		TINGKAT RIBKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEMERANGAN PEMBERINTAH	KEMERANGAN
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RIBKO	LEJAS LAMEN						
369	28294	industri koloni mesin jahit	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	RIP	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	gubernur.
369	28292	industri mesin jahit serta mesin lain dan mesin pengering tekstil jenis lain	sedang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	RIP	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota
371	28295	industri mesin tekstil	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri menengah	Gubernur.
382	28264	industri jernis cetak jilat, cupli, bender dan sejenisnya	sedang	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NID dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri besar, kelas II/kecil kabupatèn/ kota untuk skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur.
383	28265	industri mesin pengapian dan pembumih produk besi	sedang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	RIP	NA	selama berlaku kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	Bupati/ wali kota, gubernur jika tidak kelas kabupatèn/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERISIKO	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEBERSIKAPAN	KEMERINTAHAN	
				BIAYA USAHA	LUAS LAHAN						
372	28112	industri motor pembakaran dalam	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri besar, kecuali untuk kegiatan usaha	gubernur
374	28113	industri komposit dari serat selang mesin dan turbin	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur, menteri jika telah ditetapkan
375	28120	industri peralatan tenaga zat cair dan gas	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur, menteri jika telah ditetapkan
376	28136	industri pengalangan, kompresor, tanki dan kapal kargo	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur, menteri jika telah ditetapkan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERISIKO	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEBERSIKAPAN	KEMERINTAHAN	
				BIAYA USAHA	LUAS LAHAN						
413	30113	industri produksi, pengolahan dan kegiatan kapal	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan menengah	gubernur jika telah ditetapkan
414	30120	industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur
415	30200	industri konservasi dan gerbang kereta	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur
416	30300	industri perawat kesehatan dan perawat gigi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur
417	30400	industri kondemisi perahu	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERISIKO	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER KEBERSIKAPAN	KEMERINTAHAN	
				BIAYA USAHA	LUAS LAHAN						
418	30411	industri sepeda motor roda dua dan tiga	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur
419	30912	industri angkutan dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur jika telah ditetapkan
420	30921	industri sepeda dan kereta roda dua dan tiga	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur
421	30922	industri perlengkapan sepeda dan motor roda dua dan tiga	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur jika telah ditetapkan
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur
422	30990	industri alat angkutan lainnya	sejarah	usaha kecil dan menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama berlaku	skala industri menengah	gubernur jika telah ditetapkan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USABA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		BEKAS USABA	LEBAR LAMAH							
181	20171	industri mesin kantor dan akuntansi manual	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
182	20172	industri mesin kantor dan akuntansi elektronik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
183	20173	industri mesin kantor dan akuntansi elektronik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
184	20174	industri mesin kantor dan akuntansi elektronik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
185	20179	industri mesin dan peralatan kantor lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USABA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		BEKAS USABA	LEBAR LAMAH							
423	31001	industri furnitur dari kayu	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
424	31002	industri furnitur dari logam dan baja lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
425	31003	industri furnitur dari plastik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
426	31004	industri furnitur dari logam	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
427	31009	industri furnitur lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USABA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
		BEKAS USABA	LEBAR LAMAH							
428	32111	industri perhiasan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
429	32112	industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
430	32113	industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
431	32114	industri barang dari logam mulia untuk keperluan teknis dan/atau laboratorium	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
432	32115	industri perhiasan lainnya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota
			sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama pelekta usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I dan II	gubernur/ wali kota, gubernur jika tidak dalam kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
301	28210	industri mesin perikanan dan ketuhanan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
302	28221	industri mesin dan perbaikan mesin untuk pengujian logam	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
303	28222	industri mesin dan perbaikan mesin untuk pengujian logam	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
304	28223	industri mesin dan perbaikan mesin untuk pengujian logam dan kayu	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
305	28224	industri mesin dan perbaikan mesin untuk pengujian logam menggunakan arus listrik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, jika tidak lintas kabupaten/kota	gubernur
306	28230	industri mesin metalurgi	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
307	28240	industri mesin perambangan, pengalihan dan transmisi	sejarah	usaha kecil	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
438	32110	industri logam lainnya dari logam non-ferrous	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha besar	gubernur
434	32120	industri perhiasan logam dan logam sepele	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha besar	gubernur
435	32200	industri alat musik tradisional	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha besar	gubernur
436	32202	industri alat musik lainnya tradisional	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha besar	gubernur
437	32200	industri alat musik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha besar	gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
438	32401	industri alat permainan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha besar	gubernur
439	32402	industri mainan anak-anak	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha besar	gubernur
440	32501	industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
441	32502	industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perhiasan kedokteran dan optik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	gubernur/jika tidak lintas kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha menengah	gubernur; menteri jika tidak lintas provinsi untuk semua skala usaha
442	32503	industri lensa mata	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri menengah dan usaha menengah	gubernur

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
308	28250	industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil	Duplikat/ wali kota, Gubernur jika tidak terima Kabupaten/ kota	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil	Gubernur, menteri jika tidak terima provinsi untuk semua skala usaha	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
309	28261	industri kakao manis jahit	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil, usaha menengah dan usaha besar	Gubernur	
400	28262	industri mesin jahit serta mesin jahit dan mesin penjahit untuk keperluan magang	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
401	28263	industri mesin tekstil	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
402	28264	industri mesin jahit, rajut, benut dan perlengkapan	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
403	28265	industri mesin pengapian dan pembuatan produk kulit	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
404	28261	industri mesin peretakan	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
405	28262	industri mesin pembekalan listrik	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
406	28269	industri mesin perbaikan kendaraan bermotor	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
443	32309	industri peralatan elektronik dan komunikasi gsm serta perlengkapan lainnya	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
444	32901	industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapan	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
445	32902	industri jasa mesin jahit/ gambar	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
446	32903	industri benang/jahit	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
447	32904	industri peralatan untuk pelindung keselamatan	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Duplikat/ wali kota, Gubernur jika tidak terima Kabupaten/ kota	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
448	32905	industri serat sutera sutera	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Duplikat/ wali kota, Gubernur jika tidak terima Kabupaten/ kota	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
449	32906	industri tekstil modal ringan	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	1 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	2 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
450	32907	industri tekstil modal berat	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	2 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	2 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
451	32909	industri pengolahan logam YBM	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
452	33113	reparasi produk listrik yang dipasang untuk bangunan, rumah, kendaraan dan generator uang	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Duplikat/ wali kota, Gubernur jika tidak terima Kabupaten/ kota	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
443	32309	industri peralatan elektronik dan komunikasi gsm serta perlengkapan lainnya	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
444	32901	industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapan	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
445	32902	industri jasa mesin jahit/ gambar	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
446	32903	industri benang/jahit	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
447	32904	industri peralatan untuk pelindung keselamatan	seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Duplikat/ wali kota, Gubernur jika tidak terima Kabupaten/ kota	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
448	32905	industri serat sutera sutera	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Duplikat/ wali kota, Gubernur jika tidak terima Kabupaten/ kota	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
449	32906	industri tekstil modal ringan	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	1 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	2 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
450	32907	industri tekstil modal berat	seluruh	seluruh	NA	tinggi	NIB dan sertifikasi standar	2 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	2 hari	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
451	32909	industri pengolahan logam YBM	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	
452	33113	reparasi produk listrik yang dipasang untuk bangunan, rumah, kendaraan dan generator uang	seluruh	seluruh	NA	rendah	NIB	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Duplikat/ wali kota, Gubernur jika tidak terima Kabupaten/ kota	
			seluruh	seluruh	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksanan kegiatan usaha	tidak industri kecil dan industri menengah	Gubernur,	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG UMUM			RISIKO		PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA UMUM	LUAS LAHAN					
407	29101	industri kerajinan keramik atau empas atau leleh	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
408	29102	industri kerajinan anyaman pedesaan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
409	29200	industri kanvasi industri kerajinan rupa empas atau leleh dan industri traktor dan semi traktor	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
410	29300	industri kain dan tekstil	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
411	30111	industri kapal dan perahu	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas

NO	BIDANG UMUM			RISIKO		PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA UMUM	LUAS LAHAN					
412	30112	industri bangunan tepi pantai dan bangunan terapung	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
413	30113	industri perikanan, perikanan dan budidaya ikan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
414	30120	industri perikanan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
415	30200	industri kanvasi dan gresing kerusi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
416	30300	industri perawat tekstil dan perlempasan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG UMUM			RISIKO		PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA UMUM	LUAS LAHAN					
453	33112	reparasi produk senjata dan amunisi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
454	33119	reparasi produk logam perhiasan lainnya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
455	33121	reparasi mesin untuk keperluan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
456	33122	reparasi mesin untuk keperluan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
457	33131	reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas

NO	BIDANG UMUM			RISIKO		PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA UMUM	LUAS LAHAN					
458	33132	reparasi peralatan ortodonti, ortodontia dan estetis/orthopedi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
459	33133	reparasi peralatan fotografi dan optik	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
460	33141	reparasi motor listrik, generator dan transformator	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
461	33142	reparasi baterai dan akumulator listrik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
462	33149	reparasi peralatan listrik lainnya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NA	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG UMUM			RISIKO		PERIZINAN BERUMUM	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA UMUM	LUAS LAHAN					
453	33112	reparasi produk senjata dan amunisi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
454	33119	reparasi produk logam perhiasan lainnya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri besar, lokasi terbatas	Gubernur
455	33121	reparasi mesin untuk keperluan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
456	33122	reparasi mesin untuk keperluan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas
457	33131	reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NA	selama berlaku	skala industri kecil dan industri menengah	Dipukul/ wali kota, Gubernur jika lokasi terbatas

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SIKLA USAHA	LUAS LAHAP				TINGKAT RISIKO	PARAMETER KEBERUSAHAAN
417	50400	industri kendaraan perang	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain-lain	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
418	50911	industri seperti motor roda dua dan tiga	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
419	30912	industri komputer dan perifernya seperti monitor, mouse dan keyboard	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
420	30921	industri seperti dan lain-lain roda bermotor listrik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
421	30922	industri perangkapan seperti dan lain-lain roda bermotor listrik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SIKLA USAHA	LUAS LAHAP				TINGKAT RISIKO	PARAMETER KEBERUSAHAAN
422	30990	industri alat angkutan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
423	31001	industri furnitur dari kayu	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
424	31002	industri furnitur dari rotan dan atau bambu	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
425	31003	industri furnitur dari plastik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SIKLA USAHA	LUAS LAHAP				TINGKAT RISIKO	PARAMETER KEBERUSAHAAN
463	31151	reparasi kapal, perahu dan bagasi lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
464	31152	reparasi alat transportasi darat lainnya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
465	31153	reparasi pesawat terbang	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
466	31159	reparasi alat angkutan bus, trolley bus, tramway dan lain-lain	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
467	31190	reparasi peralatan listrik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk

NO	RUANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO SIKLA USAHA	LUAS LAHAP				TINGKAT RISIKO	PARAMETER KEBERUSAHAAN
468	31200	instalasi, pemeliharaan, reparasi dan perbaikan instalasi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
469	36301	perdagangan ritel barang konsumsi dan lainnya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
470	58302	perilaku es	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
471	37021	pengalihan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk
472	37022	pengalihan dan pembuangan air limbah berbahaya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	NIB dan sertifikasi standar	7 hari	setelah pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	sejarah, seputar, tidak laris, baik/laris, baik/buruk, baik/buruk, baik/buruk

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEBAYAAN	RISIKO		PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
436	52302	industri alat musik bukan tradisional	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
437	52306	industri alat olahraga	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
438	52401	industri alat permainan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
439	52402	industri mesin anak-anak	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
440	52501	industri fasilitas teknik operasi, pemertan bodibone dan konstruksi gigi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEBAYAAN	RISIKO		PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
441	52502	industri peralatan bodibone dan bodibone gigi, perlengkapan orthodontic dan prostesis	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
442	52503	industri kamus mata	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
443	52506	industri peralatan kedokteran dan bodibone gigi serta perlengkapan lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
444	52601	industri alat tulis dan gambar termasuk perkengkapannya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
445	52902	industri pola mesin tulis/gambar	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MD dan sertifikasi standar	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEBAYAAN	RISIKO		PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
443	50201	aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh perseorangan	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
444	50102	aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh instansi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
445	40203	jasa penyedia layanan pelatihan berbasis teknologi digital atau layanan tetap tidak tetap tidak dengan mobilitas terbatas	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
446	60200	jasa email/teknologi lainnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
447	42011	aktivitas pengalokasian video game	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEBAYAAN	RISIKO		PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO					PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN					
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
448	62012	aktivitas pengembangan aplikasi perbandingan media sosial internet (social media)	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
449	62019	aktivitas pengembangan komputer pintar	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
450	60221	aktivitas komersial konsumen	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
451	60204	aktivitas pemasaran dan pemasaran internet of things (IoT)	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MD	NA	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	MD dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksnanya memperhatikan kegiatan usaha	Gubernur

**Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	LUAS LAMPAH				PARAMETER RISIKO	KWENANGAN
440	52903	industri serbuk gipsum YtM	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak terdapat	Gubernur
441	52904	industri produksi untuk pelindung keselamatan	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
448	52905	industri serat selulosa kelapa	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur, Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
449	52906	industri produksi radomemp	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
450	52907	industri fabrikasi elemen bakar uranium	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	LUAS LAMPAH				PARAMETER RISIKO	KWENANGAN
451	52909	industri pengolahan kelapa YtM	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak terdapat	Gubernur
452	53111	reparasi produk mesin tetap pasang untuk bangunan, tangki, tanka air dan generator uap	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
453	53112	reparasi produk senjata dan amunisi	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
454	53119	reparasi produk mesin pembakaran tenaga	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
455	53121	reparasi mesin untuk pertanian umum	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	LUAS LAMPAH				PARAMETER RISIKO	KWENANGAN
492	62029	aktivitas konsultasi komputer dan manajemen	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
493	62090	aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
494	62111	aktivitas pengisian data	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
495	62112	aktivitas hosting dan VDR	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
496	62121	portal web dan/ atau platform digital tanpa layanan	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	LUAS LAMPAH				PARAMETER RISIKO	KWENANGAN
497	62122	portal web dan/ atau platform digital dengan layanan komersial	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
498	62123	komunikasi internet	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
499	70209	aktivitas konsultasi manajemen lainnya	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
500	71102	aktivitas konsultasi dan pemeliharaan tenaga VDR	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
501	71201	jasa sertifikasi	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		PERIZINAN PERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO	LUAS LAMPAH				PARAMETER RISIKO	KWENANGAN
502	62029	aktivitas konsultasi komputer dan manajemen	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
503	62090	aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
504	62111	aktivitas pengisian data	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
505	62112	aktivitas hosting dan VDR	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
506	62121	portal web dan/ atau platform digital tanpa layanan	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
507	62122	portal web dan/ atau platform digital dengan layanan komersial	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Bupati/ wali kota, Gubernur jika tidak terdapat Kabupaten/ kota	Gubernur
508	62123	komunikasi internet	sekarang	angka kecil dan usaha menengah	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
509	70209	aktivitas konsultasi manajemen lainnya	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	revisi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
510	71102	aktivitas konsultasi dan pemeliharaan tenaga VDR	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur
511	71201	jasa sertifikasi	sekarang	angka kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	7 hari	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	Gubernur	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USABA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSABA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEMERANGAN
				SKALA USABA	LUAS LAMPAH						
490	3119	reparasi alat angkutan tanam, beban kendaraan bermotor	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
467	3119	reparasi peralatan tenaga	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas lintas subkapasite/ atau untuk skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
468	3330	instalasi/ pemangkas tenaga dan peralatan industri	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
469	3531	pengisian ulang/pemeliharaan dan ubra dingi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	MB	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas lintas subkapasite/ atau untuk skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
470	3532	produksi es	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur

NO	BIDANG USABA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSABA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEMERANGAN
				SKALA USABA	LUAS LAMPAH						
471	3701	pengelasan dan pekerjaan air limbah tidak berbahaya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas lintas subkapasite/ atau untuk skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
472	3702	pengelasan dan pekerjaan air limbah berbahaya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas lintas subkapasite/ atau untuk skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
473	3822	produksi Kempis stamp organik	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
474	3831	dirur ulang barang logam	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	MB	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
475	3832	dirur ulang barang bukan logam	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri besar Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USABA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSABA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEMERANGAN
				SKALA USABA	LUAS LAMPAH						
512	24809	aktifitas pekerjaan, terdiri dari kelas layanan YTDG	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	MB	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
513	27301	aktifitas pengemasan dari semua jenis usaha tanpa baik apa mesin dan peralatan industri	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	MB	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
514	27301	aktifitas pengemasan dari semua jenis usaha tanpa baik apa mesin dan peralatan industri pengalihan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	MB	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
515	5220	aktifitas pengolahan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	MB	7 hari	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
516	55110	reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur

NO	BIDANG USABA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSABA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEMERANGAN
				SKALA USABA	LUAS LAMPAH						
517	55120	reparasi peralatan komunikasi	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
518	55130	reparasi alat alat elektronik rumah tangga	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
519	55220	reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
520	55230	reparasi alat ukur dan barang dari kaku	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur
521	55240	reparasi motor dan penggantian suku cadang	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	MB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur

NO	BIDANG USABA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSABA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEMERANGAN
				SKALA USABA	LUAS LAMPAH						
522	55290	reparasi ban dan rem, suspensi, knalpot, lampu	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USABA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUSABA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBL	JUDUL KBL		PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER KEWENANGAN	KEMERANGAN
				SKALA USABA	LUAS LAMPAH						
523	55290	reparasi ban dan rem, suspensi, knalpot, lampu	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NB	NA	selama pelaku usaha mengajukan kegiatan usaha	skala industri kecil dan industri menengah Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai Gubernur, Bupati/wali kota, Gubernur jika lokasi tidak sesuai	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG UPAHA			REBKO		PERIZINAN BERUMUMAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLU	JUDEL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER REBKO SKALA USAHA	LEJAS LAMAH				TINGKAT REBKO	PARAMETER	KEWENANGAN
476	41213	konstruksi gedung industri	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	ND dan terdapat standar	7 hari	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar, kecil, menengah / baik untuk skala indikator level dan indikator menengah	Gubernur
477	45201	reparasi mobil	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	ND dan terdapat standar	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator level dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	ND dan terdapat standar	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha
478	45407	reparasi dan pemertoran sepeda motor	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	ND dan terdapat standar	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator level dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah rendah	ND dan terdapat standar	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha
479	58139	penelitian pasar barang, jasa dan layanan atau majalah	kebaruan untuk barang	usaha kecil dan usaha menengah	NA	menengah rendah	ND dan terdapat standar	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator level dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan terdapat standar	7 hari	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha
480	58200	penelitian pasar barang (bebas)	sejarah	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	ND	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator level dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan terdapat standar	7 hari	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha

NO	RUANG UPAHA			REBKO		PERIZINAN BERUMUMAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLU	JUDEL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER REBKO SKALA USAHA	LEJAS LAMAH				TINGKAT REBKO	PARAMETER	KEWENANGAN
481	79111	aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah	kebaruan untuk layanan	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	ND	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator kecil dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan terdapat standar	7 hari	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha
482	79112	aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta	kebaruan untuk layanan	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	ND	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator kecil dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan terdapat standar	7 hari	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha
483	79121	aktivitas jasa produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah	kebaruan untuk layanan	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	ND	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator kecil dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan terdapat standar	7 hari	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha
484	79122	aktivitas jasa produksi film, video dan program televisi oleh swasta	kebaruan untuk layanan	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	ND	NA	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator kecil dan indikator menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika tidak terdapat kabupaten/kota
			sejarah	usaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan terdapat standar	7 hari	selama pelekta usaha mengajukan kegiatan usaha	skala indikator besar	Gubernur, menteri jika tidak terdapat untuk semua skala usaha

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USHAHA			RINCI			PERIZINAN BERUSHAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LUAS LAHAN						
855	61023	Jasa penyedia layanan wisata perjalanan wisata melalui jasa online travel agent/ travel agent/ travel agent dengan mobilitas terbatas	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota
856	61029	Jasa multimedial lainnya	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota
857	62011	Aktivitas pengembangan video game	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota
858	62012	Aktivitas pengembangan aplikasi perangkat lunak internet (e-commerce)	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota

NO	BIDANG USHAHA			RINCI			PERIZINAN BERUSHAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LUAS LAHAN						
859	62019	Aktivitas pengembangan komputer lainnya	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota
860	62021	Aktivitas konsultasi kearsifan	akutansi	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, lokasi/ kota kabupaten/ kota untuk tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Gubernur;
861	62024	Aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT)	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota
862	62029	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen	akutansi	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, lokasi/ kota kabupaten/ kota untuk tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Gubernur;
863	62099	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah rendah	NIH dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota

NO	BIDANG USHAHA			RINCI			PERIZINAN BERUSHAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LUAS LAHAN						
864	62019	Aktivitas pengembangan komputer lainnya	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota
865	62021	Aktivitas konsultasi kearsifan	akutansi	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, lokasi/ kota kabupaten/ kota untuk tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Gubernur;
866	62024	Aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT)	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota
867	62029	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen	akutansi	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIH dan sertifikasi standar	7 hari	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar, lokasi/ kota kabupaten/ kota untuk tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Gubernur;
868	62099	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	akutansi	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIH	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi kecil dan indikasi menengah	Dipapil/ wali kota, Gubernur jika lokasi lokasi/ kota kabupaten/ kota
			akutansi	usaha besar	NA	menengah rendah	NIH dan sertifikasi standar	NA	selama berlaku usaha menjalankan kegiatan usaha	tidak indikasi besar	Gubernur; menteri jika lokasi lokasi provinsi/ kota kabupaten/ kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	RUANG USAH			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER BERISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SIKLA USAH	LEJAK LALUAN						
404	63111	aktivitas pengolahan data	sekarang	umaha kecil dan umaha menengah	NA	rendah	ND	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri kecil dan menengah	Dipapri/ wali kota, Gubernur jika tidak kabupatere/ kota
			sekarang	umaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar	Gubernur; asertori jika tidak lntas provinsi untuk semua skala umaha
405	63112	aktivitas belajar dan YED	sekarang	umaha kecil, umaha menengah dan umaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar; lntas kabupatere/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur;
406	63121	portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial	sekarang	umaha kecil dan umaha menengah	NA	rendah	ND	NA	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri kecil dan menengah	Dipapri/ wali kota, Gubernur jika tidak kabupatere/ kota
			sekarang	umaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar	Gubernur; asertori jika tidak lntas provinsi untuk semua skala umaha
407	63122	portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial	sekarang	umaha kecil dan umaha menengah	NA	rendah	ND	NA	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri kecil dan menengah	Dipapri/ wali kota, Gubernur jika tidak kabupatere/ kota
			sekarang	umaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar	Gubernur; asertori jika tidak lntas provinsi untuk semua skala umaha
408	64130	kegiatan industri	sekarang	umaha besar	NA	tinggi	ND dan lnta	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar; lntas kabupatere/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur;

NO	RUANG USAH			RISIKO			PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLJ	JUDUL KBLJ	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER BERISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SIKLA USAH	LEJAK LALUAN						
499	71209	aktivitas komersial manufaktur lainnya	sekarang	umaha kecil, umaha menengah dan umaha besar	NA	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar; lntas kabupatere/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur;
500	71202	aktivitas komersial dan komersial teknik YED	sekarang	umaha kecil, umaha menengah dan umaha besar	NA	tinggi	ND dan lnta	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar; lntas kabupatere/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur;
501	71201	jasa sertifikasi	kegiatan komersial manufaktur lain; agromanufaktur dan agromanufaktur perikanan dan perikanan	umaha kecil, umaha menengah dan umaha besar	NA	tinggi	ND dan lnta	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar; lntas kabupatere/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur;
502	71202	jasa pengujian laboratorium	kegiatan komersial manufaktur lain; agromanufaktur dan agromanufaktur perikanan dan perikanan	umaha kecil, umaha menengah dan umaha besar	NA	tinggi	ND dan lnta	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar; lntas kabupatere/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur;
503	71203	jasa inspeksi periksa	kegiatan komersial manufaktur lain; agromanufaktur dan agromanufaktur perikanan dan perikanan	umaha kecil, umaha menengah dan umaha besar	NA	tinggi	ND dan lnta	7 hari	selama pelaksanaan umaha pemrosesan kegiatan umaha	skala industri besar; lntas kabupatere/ kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEMERANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEMERANGAN
				SKALA USAHA	LAS LAYAN						
504	71204	Jasa Instalasi Teknik Instalasi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NDI dan lain	7 hari	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
505	71205	Jasa Keahlian/teknologi	kegiatan usaha bertingkat tinggi, perbaikan/perbaikan/pergantian/pemeliharaan/ pemeliharaan usaha alat alat yang digunakan oleh industri manufaktur	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NDI dan lain	7 hari	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
506	71206	Jasa commissioning proses industri, quality assurance (QA), dan quality control (QC)	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NDI dan perantara sertifikasi standar	7 hari	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
507	71209	Analisa dan uji teknis lainnya	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NDI dan lain	7 hari	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
508	72102	penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NDI	NA	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEMERANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEMERANGAN
				SKALA USAHA	LAS LAYAN						
509	72104	penelitian dan pengembangan teknologi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NDI dan perantara sertifikasi standar	7	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
510	72109	penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NDI	NA	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
511	74100	aktivitas perancang bangunan	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NDI dan perantara sertifikasi standar	7	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
512	74009	aktivitas perencana, desain dan gambar teknik VTD	sejarah kegiatan jasa keahliannya (perencanaan/ gambar)	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NDI dan lain	7	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur
513	77301	aktivitas perancangan dan sewa jasa usaha bagi sewa mesin dan peralatan industri	sejarah	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NDI dan lain	7	selama pelaksanaan pemrosesan kegiatan usaha	skala industri besar, kelas I/II/III subsektor/kegiatan usaha skala industri kecil dan industri menengah	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
514	77301	aktivitas pengemasan dan serpihan usaha tanpa baik opsi sendiri dan peralatan industri pengolahan	seharus	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	menengah tinggi	NIB dan pernyataan sertifikat standar	7	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
515	82900	aktivitas pengolahan	seharus	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	tinggi	NIB dan lain	7	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
516	90110	reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi lintas kabupaten/kota
			seharus	usaha besar	menengah rendah	NIB dan pernyataan sertifikat standar	NA	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
517	90120	reparasi peralatan komunikasi	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi lintas kabupaten/kota
			seharus	usaha besar	menengah rendah	NIB dan pernyataan sertifikat standar	NA	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
518	90210	reparasi alat alat elektronik konsumen	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi lintas kabupaten/kota
			seharus	usaha besar	menengah rendah	NIB dan pernyataan sertifikat standar	NA	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
519	90220	reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi lintas kabupaten/kota
			seharus	usaha besar	menengah rendah	NIB dan pernyataan sertifikat standar	NA	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
520	90230	reparasi alas kaki dan barang dari kulit	seharus	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur
521	90240	reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	seharus	usaha kecil dan usaha menengah	NA	rendah	NIB	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri kecil dan menengah	Dipukul/wali kota, Gubernur jika lokasi lintas kabupaten/kota
			seharus	usaha besar	menengah rendah	NIB dan pernyataan sertifikat standar	NA	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar	Gubernur, menteri jika lokasi lintas provinsi untuk semua skala usaha
522	90299	reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya	seharus	usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar	NA	rendah	NIB	NA	selama pelepasan usaha menjalankan kegiatan usaha	skala industri besar, lokasi lintas kabupaten/kota untuk skala industri kecil dan menengah	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

E1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

Tetap

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
E1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN						
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
1	verifikasi teknis perizinan berusaha industri	10431 10432 10433 16101 16104 16105 16211 16212 16213 16214 16215 16221 16222 16230 16295 17011 17012 17013 17014 17019 17021 17022 17091 17099 18111 18112	7 hari	setiap pengajuan perizinan berusaha industri per KBLI	PMDN dengan skala usaha menengah dan besar	kepala dinas perindustrian tingkat provinsi

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
					SKALA USAHA	LUAS LAHAN
1	verifikasi teknis perizinan berusaha industri	10431 10432 10433 16101 16104 16105 16211 16212 16213 16214 16215 16221 16222 16230 16295 17011 17012 17013 17014 17019 17021 17022 17091 17099 18111 18112 18120 20115 20294 20296 22121 22122 22123 22193	7 hari	setiap pengajuan perizinan berusaha industri per KBLI	PMDN dengan skala usaha menengah dan besar	kepala dinas perindustrian tingkat provinsi

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		18120 20115 20294 20296 22121 22122 22123 22193 23990 31001 31002 32905 95240 10130 10212 10213 10215 10216 10217 10219 10221 10222 10291 10292 10293 10295 10296 10297 10298 10299				

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		21940 21941 21942 22945 22946 22948 22949 22950 22951 22952 22953 22954 22955 22956 22957 22958 22959 22960 22961 22962 22963 22964 22965 22966 22967 22968 22969 22970 22971 22972 22973 22974 22975 22976 22977 22978 22979 22980 22981 22982 22983 22984 22985 22986 22987 22988 22989 22990 22991 22992 22993 22994 22995 22996 22997 22998 22999									

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		18201				
		18202				
		19212				
		19213				
		20221				
		20222				
		20223				
		20231				
		20232				
		20234				
		20291				
		20293				
		20295				
		20299				
		21012				
		21013				
		21015				
		21021				
		21023				
		21024				
		22111				
		22112				
		22191				
		22192				
		22193				
		22194				
		22199				
		22210				
		22220				
		22291				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		141.31									
		141.32									
		142.00									
		142.01									
		143.00									
		151.11									
		151.12									
		151.13									
		151.14									
		151.21									
		151.22									
		151.23									
		151.26									
		152.01									
		152.02									
		152.03									
		152.09									
		17991									
		20301									
		20302									
		21012									
		21015									
		23196									
		32904									
		29200									
		29999									
		29513									
		27202									
		27203									
		27303									
		27600									
		28130									
		28140									
		28146									
		28183									
		28280									
		28103									
		22102									
		29200									
		24200									
		30111									
		30112									
		30113									
		30120									
		30200									
		30400									
		30401									

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		22292				
		22293				
		22299				
		26800				
		31003				
		32904				
		38302				
		23111				
		23112				
		23119				
		23121				
		23122				
		23123				
		23124				
		23129				
		23921				
		23922				
		23923				
		23929				
		23931				
		23932				
		23933				
		23939				
		23941				
		23942				
		23943				
		23951				
		23952				
		23953				
		23954				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		30912									
		30921									
		30922									
		30940									
		33112									
		33121									
		33131									
		33142									
		33149									
		33151									
		33152									
		33153									
		33159									
		33301									
		42201									
		42427									
		35113									
		25120									
		25130									
		25931									
		26511									
		26512									
		26514									
		26601									
		26602									
		27111									
		27112									
		27113									
		27130									
		28111									
		28112									
		28113									
		28130									
		28130									
		28151									
		28152									
		28160									
		28171									
		28180									
		28191									
		28192									
		28193									
		28199									
		28210									
		28221									
		28223									
		28224									
		28230									

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		23955				
		23956				
		23957				
		23959				
		23961				
		23962				
		23963				
		23969				
		23990				
		32111				
		38302				
		13111				
		13112				
		13113				
		13121				
		13123				
		13131				
		13132				
		13911				
		13913				
		13921				
		13922				
		13923				
		13924				
		13925				
		13926				
		13929				
		13930				
		13941				
		13942				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		28240									
		28250									
		28251									
		28253									
		28254									
		28255									
		28257									
		28258									
		28259									
		28260									
		28262									
		28263									
		28264									
		28265									
		28266									
		28267									
		28268									
		28269									
		28270									
		28271									
		28272									
		28273									
		28274									
		28275									
		28276									
		28277									
		28278									
		28279									
		28280									
		28281									
		28282									
		28283									
		28284									
		28285									
		28286									
		28287									
		28288									
		28289									
		28290									
		28291									
		28292									
		28293									
		28294									
		28295									
		28296									
		28297									
		28298									
		28299									
		28300									
		28301									
		28302									
		28303									
		28304									
		28305									
		28306									
		28307									
		28308									
		28309									
		28310									
		28311									
		28312									
		28313									
		28314									
		28315									
		28316									
		28317									
		28318									
		28319									
		28320									
		28321									
		28322									
		28323									
		28324									
		28325									
		28326									
		28327									
		28328									
		28329									
		28330									
		28331									
		28332									
		28333									
		28334									
		28335									
		28336									
		28337									
		28338									
		28339									
		28340									
		28341									
		28342									
		28343									
		28344									
		28345									
		28346									
		28347									
		28348									
		28349									
		28350									

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		27900									
		28130									
		28131									
		28132									
		28133									
		28134									
		28135									
		28136									
		28137									
		28138									
		28139									
		28140									
		28141									
		28142									
		28143									
		28144									
		28145									
		28146									
		28147									
		28148									
		28149									
		28150									
		28151									
		28152									
		28153									
		28154									
		28155									
		28156									
		28157									
		28158									
		28159									
		28160									
		28161									
		28162									
		28163									
		28164									
		28165									
		28166									
		28167									
		28168									
		28169									
		28170									
		28171									
		28172									
		28173									
		28174									
		28175									
		28176									
		28177									
		28178									
		28179									
		28180									
		28181									
		28182									
		28183									
		28184									
		28185									
		28186									
		28187									
		28188									
		28189									
		28190									
		28191									
		28192									
		28193									
		28194									
		28195									
		28196									
		28197									
		28198									
		28199									
		28200									
		28201									
		28202									
		28203									
		28204									
		28205									
		28206									
		28207									
		28208									
		28209									
		28210									
		28211									
		28212									
		28213									
		28214									

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		23129				
		32904				
		25200				
		25999				
		26513				
		27202				
		27203				
		27403				
		27900				
		28120				
		28130				
		28140				
		28193				
		28240				
		29101				
		29102				
		29200				
		29300				
		30111				
		30112				
		30113				
		30120				
		30200				
		30300				
		30400				
		30911				
		30912				
		30921				
		30922				
		30990				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		33112				
		33121				
		33131				
		33142				
		33149				
		33151				
		33152				
		33153				
		33159				
		38301				
		45201				
		45407				
		25113				
		25120				
		25130				
		25931				
		26511				
		26512				
		26514				
		26601				
		26602				
		27111				
		27112				
		27113				
		27120				
		28111				
		28112				
		28113				
		28120				
		28130				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		24310									
		24320									
		25111									
		25112									
		25113									
		25119									
		25149									
		25910									
		25920									
		25921									
		25924									
		25940									
		25951									
		25952									
		25953									
		25964									
		25965									
		25969									
		27300									
		27309									
		28130									
		31044									
		31111									
		31149									
		38301									
		40130									
		40211									
		40313									
		40314									
		40314									
		40315									
		40316									
		40317									
		40319									
		40321									
		40322									
		40322									
		40321									
		40322									
		40324									
		40325									
		40325									
		40326									
		40327									
		40328									
		40329									
		40331									

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		40313									
		40313									
		40314									
		40320									
		40330									
		40391									
		40392									
		40393									
		40398									
		40413									
		40414									
		40415									
		40421									
		40422									
		40423									
		40424									
		40431									
		40432									
		40434									
		40435									
		40435									
		40490									
		40510									
		40520									
		40521									
		40531									
		40532									
		40590									
		40611									
		40612									
		40613									
		40614									
		40615									
		40621									
		40622									
		40629									
		40631									
		40632									
		40633									
		40634									
		40635									
		40710									
		40722									
		40723									
		40729									
		40732									
		40733									
		40734									
		40739									

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		28151				
		28152				
		28160				
		28171				
		28180				
		28191				
		28192				
		28193				
		28199				
		28210				
		28221				
		28223				
		28224				
		28230				
		28240				
		28250				
		28262				
		28263				
		28264				
		28265				
		28291				
		28292				
		28292				
		28299				
		32501				
		32502				
		32509				
		33111				
		33121				
		33122				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		33131				
		33132				
		33141				
		33200				
		25999				
		26110				
		26120				
		26220				
		26310				
		26320				
		26391				
		26399				
		26410				
		26420				
		26490				
		26512				
		26513				
		26520				
		26710				
		26791				
		26792				
		26800				
		27113				
		27201				
		27310				
		27330				
		27401				
		27402				
		27404				
		27409				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO					
		00700									
		00750									
		00761									
		00762									
		00763									
		00771									
		00772									
		00773									
		00774									
		00779									
		00792									
		00793									
		00794									
		00795									
		00796									
		00799									
		00801									
		00802									
		11000									
		11002									
		11009									
		16101									
		16102									
		16104									
		16105									
		16311									
		16312									
		16313									
		16314									
		16315									
		16321									
		16322									
		16330									
		16305									
		21001									
		21004									
		26301									
		31001									
		31002									
		31003									
		31004									
		31009									
		33302									
		05200									
		03111									
		03112									
		03121									

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO			PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	TINGKAT RISIKO					
		13122									
		13123									
		13124									
		13125									
		13133									
		13134									
		13911									
		13912									
		13913									
		13921									
		13932									
		13933									
		13934									
		13935									
		13936									
		13937									
		13938									
		13939									
		13940									
		13941									
		13942									
		13943									
		13944									
		13945									
		13946									
		13947									
		14111									
		14112									
		14120									
		14131									
		14132									
		14200									
		14301									
		14302									
		14303									
		15111									
		15112									
		15113									
		15114									
		15121									
		15122									
		15123									
		15124									
		15201									
		15202									
		15203									
		15204									
		15205									
		15206									
		15207									
		15208									
		15209									
		15210									
		15211									
		15212									
		15213									
		15214									
		15215									
		15216									
		15217									
		15218									
		15219									
		15220									
		15221									
		15222									
		15223									
		15224									
		15225									
		15226									
		15227									
		15228									
		15229									
		15230									
		15231									
		15232									
		15233									
		15234									

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		25934				
		25940				
		25951				
		25952				
		25991				
		25992				
		25993				
		25994				
		25995				
		25999				
		27320				
		27530				
		28130				
		31004				
		33111				
		33149				
		38301				
		10130				
		10211				
		10212				
		10213				
		10214				
		10215				
		10216				
		10217				
		10219				
		10221				
		10222				
		10291				
		10292				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		10293				
		10294				
		10295				
		10296				
		10297				
		10298				
		10299				
		10311				
		10312				
		10313				
		10314				
		10320				
		10330				
		10391				
		10392				
		10393				
		10399				
		10413				
		10414				
		10415				
		10421				
		10422				
		10423				
		10424				
		10431				
		10432				
		10434				
		10435				
		10436				
		10490				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		30113									
		32114									
		32115									
		32116									
		32130									
		32201									
		32202									
		32300									
		32401									
		32402									
		32501									
		32502									
		32503									
		32504									
		32601									
		32602									
		32603									
		32604									
		32605									
		32609									
		33111									
		36112									
		36302									
		36303									
		36304									
		36305									
		36306									
		36307									
		36308									
		36309									
		36310									
		36311									
		36312									
		36313									
		36314									
		36315									
		36316									
		36317									
		36318									
		36319									
		36320									
		36321									
		36322									
		36323									
		36324									
		36325									
		36326									
		36327									
		36328									
		36329									
		36330									
		36331									
		36332									
		36333									
		36334									
		36335									
		36336									
		36337									
		36338									
		36339									
		36340									
		36341									
		36342									
		36343									
		36344									
		36345									
		36346									
		36347									
		36348									
		36349									
		36350									

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		25931									
		25932									
		25991									
		25992									
		25993									
		25994									
		25999									
		26120									
		36309									
		36410									
		36460									
		36512									
		36513									
		36514									
		36515									
		36516									
		36517									
		36518									
		36519									
		36520									
		36521									
		36522									
		36523									
		36524									
		36525									
		36526									
		36527									
		36528									
		36529									
		36530									
		36531									
		36532									
		36533									
		36534									
		36535									
		36536									
		36537									
		36538									
		36539									
		36540									

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		10510				
		10520				
		10531				
		10532				
		10590				
		10611				
		10612				
		10613				
		10614				
		10615				
		10621				
		10622				
		10629				
		10631				
		10632				
		10633				
		10634				
		10636				
		10710				
		10722				
		10723				
		10729				
		10732				
		10733				
		10734				
		10739				
		10740				
		10750				
		10761				
		10762				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		10763				
		10771				
		10772				
		10773				
		10774				
		10779				
		10792				
		10793				
		10794				
		10795				
		10796				
		10799				
		10801				
		10802				
		11040				
		11052				
		11090				
		16101				
		16102				
		16104				
		16105				
		16211				
		16212				
		16213				
		16214				
		16215				
		16221				
		16222				
		16230				
		16295				

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		24300									
		30111									
		30113									
		30130									
		30200									
		30912									
		30922									
		30990									
		30991									
		32502									
		33509									
		33111									
		33119									
		33121									
		33122									
		33131									
		33132									
		33141									
		33142									
		33149									
		33151									
		33159									
		33199									
		33200									
		38001									
		42001									
		42002									
		58130									
		58200									
		59111									
		59112									
		59121									
		59122									
		60102									
		60109									
		60111									
		60112									
		60113									
		60114									
		60115									
		60119									
		60704									
		60900									
		60111									
		63121									
		63122									
		63119									

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						
		85120									
		95210									
		95220									
		95299									
		71201									
		71202									
		71203									
		71205									
		18113									
		41013									
		42023									
		70204									
		70209									
		71102									
		71204									
		71206									
		71209									
		74111									
		74112									
		74113									
		74114									
		74115									
		74116									
		74117									
		74118									
		74119									
		74900									
		77391									
		82020									
		72102									
		72104									
		72109									
		31021									
		37022									

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO						PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN						

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		16299				
		21021				
		21024				
		28261				
		31001				
		31002				
		31003				
		31004				
		31009				
		35302				
		95240				
		13111				
		13112				
		13121				
		13122				
		13123				
		13131				
		13132				
		13133				
		13134				
		13911				
		13912				
		13913				
		13921				
		13922				
		13923				
		13924				
		13925				
		13926				
		13929				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		13930				
		13941				
		13942				
		13995				
		13996				
		13999				
		14111				
		14112				
		14120				
		14131				
		14132				
		14200				
		14301				
		14302				
		14303				
		15111				
		15112				
		15113				
		15114				
		15121				
		15122				
		15123				
		15129				
		15201				
		15202				
		15203				
		15209				
		16103				
		16291				
		16292				

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		16293				
		16294				
		17011				
		17012				
		17019				
		17021				
		17022				
		17091				
		17099				
		18111				
		18120				
		19100				
		19213				
		19291				
		19292				
		20111				
		20112				
		20113				
		20114				
		20115				
		20116				
		20117				
		20118				
		20119				
		20121				
		20122				
		20123				
		20124				
		20125				
		20126				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		16293				
		16294				
		17011				
		17012				
		17019				
		17021				
		17022				
		17091				
		17099				
		18111				
		18120				
		19100				
		19213				
		19291				
		19292				
		20111				
		20112				
		20113				
		20114				
		20115				
		20116				
		20117				
		20118				
		20119				
		20121				
		20122				
		20123				
		20124				
		20125				
		20126				

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		20127				
		20128				
		20129				
		20131				
		20211				
		20212				
		20213				
		20214				
		20221				
		20222				
		20223				
		20231				
		20232				
		20233				
		20234				
		20291				
		20293				
		20294				
		20295				
		20296				
		20299				
		21015				
		21022				
		21023				
		22112				
		22121				
		22122				
		22123				
		22191				
		22192				

NO	BIDANG USAHA		RUANG LINGKUP KEGIATAN	RISIKO		TINGKAT RISIKO
	KODE KBLI	JUDUL KBLI		PARAMETER RISIKO		
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		22193				
		22194				
		22199				
		22220				
		22292				
		22293				
		22299				
		23121				
		23122				
		23123				
		23124				
		23129				
		23911				
		23919				
		23921				
		23922				
		23923				
		23929				
		23931				
		23932				
		23933				
		23939				
		23942				
		23943				
		23952				
		23953				
		23954				
		23957				
		23959				
		23961				

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		23962				
		23963				
		23969				
		23990				
		26520				
		31009				
		32111				
		32112				
		32113				
		32114				
		32115				
		32119				
		32120				
		32201				
		32202				
		32300				
		32401				
		32402				
		32502				
		32503				
		32509				
		32901				
		32902				
		32903				
		32904				
		32905				
		32909				
		33131				
		38212				
		38302				

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		95230				
		95230				
		95291				
		95299				
		18201				
		18202				
		24103				
		24202				
		24203				
		24204				
		24205				
		24310				
		24320				
		25111				
		25112				
		25119				
		25120				
		25130				
		25910				
		25920				
		25931				
		25932				
		25933				
		25934				
		25934				
		25940				
		25951				
		25952				
		25991				
		25992				

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		25993				
		25994				
		25999				
		26120				
		26220				
		26399				
		26410				
		26490				
		26512				
		26513				
		26514				
		26602				
		27120				
		27202				
		27330				
		27404				
		27409				
		27530				
		27900				
		28113				
		28120				
		28130				
		28140				
		28151				
		28152				
		28160				
		28171				
		28179				
		28180				
		28192				

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		25993				
		25994				
		25999				
		26120				
		26220				
		26399				
		26410				
		26490				
		26512				
		26513				
		26514				
		26602				
		27120				
		27202				
		27330				
		27404				
		27409				
		27530				
		27900				
		28113				
		28120				
		28130				
		28140				
		28151				
		28152				
		28160				
		28171				
		28179				
		28180				
		28192				

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		28193				
		28199				
		28210				
		28221				
		28222				
		28223				
		28230				
		28240				
		28250				
		28262				
		28265				
		28291				
		28299				
		29200				
		29300				
		30111				
		30113				
		30120				
		30200				
		30912				
		30921				
		30922				
		30990				
		32501				
		32502				
		32509				
		33111				
		33119				
		33121				
		33122				

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN	
		33131				
		33132				
		33141				
		33142				
		33149				
		33151				
		33159				
		33190				
		33200				
		38301				
		45201				
		45407				
		58130				
		58200				
		59111				
		59112				
		59121				
		59122				
		61912				
		61929				
		62011				
		62012				
		62013				
		62014				
		62015				
		62019				
		62024				
		62090				
		63111				
		63121				

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
		63122				
		95110				
		95120				
		95210				
		95220				
		95299				
		71201				
		71202				
		71203				
		71205				
		18113				
		41013				
		42923				
		70204				
		70209				
		71102				
		71204				
		71206				
		71209				
		74111				
		74112				
		74113				
		74114				
		74115				
		74116				
		74117				
		74118				
		74119				
		74909				
		77391				

NO	BIDANG USAHA			RISIKO		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO
		82920				
		72102				
		72104				
		72109				
		31021				
		37022				

Tetap

Tetap

F. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
147221		perdagangan eceran minuman beralkohol	tidak bebas biaya	menengah/ besar	DA	tinggi	NIR dan IIR	5 hari	3 tahun	provinsi	Gubernur

Tetap

Tetap

G. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
---	---	---

G1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Tetap	Tetap
--	-------	-------

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	izin pengusahaan sumber daya air (izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha)	semua kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya air meliputi : 1. pemanfaatan air sebagai bahan baku utama; 2. pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; 3. pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi; 4. pemanfaatan ruang pada sumber air; 5. pemanfaatan daya air; dan/ atau 6. kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut di atas	7 hari	10 tahun, dan dapat diperpanjang	wilayah sungai lintas kabupaten/ kota	gubernur
2	izin pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian jalan	semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian- bagian jalan non tol antara lain : 1. ruang manfaat jalan (rumajal); 2. ruang milik jalan (rumija); 3. ruang pengawasan jalan (ruwasjal).	17 hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	bagian- bagian jalan provinsi	gubernur.

H. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI	H. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI	Tetap
--	--	-------

NO	BIDANG USAHA			RISIKO			PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN	
				SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
1	49442	angkutan jalan rel wisata	sejarah	menengah dan besar	NA	LUAS LAHAN	tinggi	ND dan izin	14 hari	selama pe laku usaha menjalankan usahanya	lingkup operasionalnya antar/kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur.
2	49459	angkutan jalan rel lainnya	sejarah	menengah dan besar	NA	LUAS LAHAN	tinggi	ND dan izin	14 hari	selama pe laku usaha menjalankan usahanya	lingkup operasionalnya antar/kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur.
3	52222	aktivitas pelayanan kepelayanan sungai dan daratan	sejarah	sejarah	NA	LUAS LAHAN	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	4 hari	selama pe laku usaha menjalankan usahanya	lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar negara, antar kabupaten/ kota dalam provinsi, dan dalam kabupaten/ kota	Mensteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
4	52223	aktivitas pelayanan kepelayanan penyebrangan	sejarah	menengah dan besar	NA	LUAS LAHAN	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	4 hari	selama pe laku usaha menjalankan usahanya	lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar negara, antar kabupaten/ kota dalam provinsi, dan dalam kabupaten/ kota	Mensteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
5	50211	angkutan energi dan daratan liner trayek tetap dan teratur untuk penumpang	sejarah	sejarah	NA	LUAS LAHAN	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar negara, antar kabupaten/ kota dalam provinsi, dan dalam kabupaten/ kota	Mensteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
6	50216	angkutan penyebrangan antar/kabupaten/ kota untuk penumpang	sejarah	besar	NA	LUAS LAHAN	menengah tinggi	ND dan sertifikasi standar	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya antar/kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur.
7	42103	konstruksi jalan rel	sejarah	menengah besar	NA	LUAS LAHAN	tinggi	ND dan izin	14 hari	selama pe laku usaha menjalankan usahanya	lingkup operasionalnya antar/kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	RUANG UBAHA			REPERK		PERIZINAN/DEKORASI	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	HUANG LINGKUP KBLU	SKALA UBAHA	LEMB LAMBAH				PARAMETER	KEPERANGAN
8	5229	aktivitas penanjanng angkutan penumpang lainnya	1. perubahan jual beli dan/atau sewa kapal; 2. aktivitas perbaikan kapal; 3. perolehan perizinan angkutan laut atau perizinan jasa terkait dengan angkutan laut; dan 4. seluruh bentuk operasi pengangkutan air, dan lain-lain.	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
9	5011	angkutan laut dalam negeri	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
10	5044	angkutan laut luar negeri	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
11	5240	perancangan kapal	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
12	5291	jasa angkutan transportasi (JPT)	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur

NO	RUANG UBAHA			REPERK		PERIZINAN/DEKORASI	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KBLU	JUDUL KBLU	HUANG LINGKUP KBLU	SKALA UBAHA	LEMB LAMBAH				PARAMETER	KEPERANGAN
13	4942b	angkutan bus khusus	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri dan Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi
14	4916	angkutan bus khusus	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
15	4919	angkutan bus dalam trayek	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
16	4922a	angkutan bus dalam trayek	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
17	5031	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
18	5021	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
19	5022	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
20	5022	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
21	5012	angkutan laut pesisir	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

8	5229	aktivitas penanjanng angkutan penumpang lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
9	5011	angkutan laut dalam negeri	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
10	5044	angkutan laut luar negeri	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
11	5240	perancangan kapal	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
12	5291	jasa angkutan transportasi (JPT)	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
13	4942b	angkutan bus khusus	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri dan Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi
14	4916	angkutan bus khusus	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
15	4919	angkutan bus dalam trayek	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
16	4922a	angkutan bus dalam trayek	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
17	5031	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
18	5021	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
19	5022	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
20	5022	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
21	5012	angkutan laut pesisir	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

8	5229	aktivitas penanjanng angkutan penumpang lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
9	5011	angkutan laut dalam negeri	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
10	5044	angkutan laut luar negeri	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
11	5240	perancangan kapal	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
12	5291	jasa angkutan transportasi (JPT)	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur
13	4942b	angkutan bus khusus	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri dan Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi
14	4916	angkutan bus khusus	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
15	4919	angkutan bus dalam trayek	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
16	4922a	angkutan bus dalam trayek	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
17	5031	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
18	5021	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
19	5022	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
20	5022	angkutan wisata dan wisata transpot wisata lainnya	sejarah	sejarah	NA	sejarah	7 hari	sebelum berlaku	sejarah	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
21	5012	angkutan laut pesisir	sejarah	sejarah	NA	sejarah	5 hari	sebelum berlaku	sejarah	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	BIDANG USHAHA		RISIKO				PERIZINAN BERUBAH	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
	KODE KEJDI	JUDUL KEJDI	RUMAH LINGKUP KEGIATAN	PARAMETER RISIKO		TINGKAT RISIKO				PARAMETER	KEWENANGAN
				SKALA USHAHA	LAIN LAIN						
22	50132	angketan laot perizinan perubahan dalam negeri untuk barang	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	3 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya dalam perubahan wilayah kabupaten/kota/provinsi	Gubernur	
35	49421	angketan laot	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya meliputi perubahan wilayah kabupaten/kota/provinsi	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota	
24	50217	angketan pemberdayaan perizinan antar kabupaten/ kota untuk penampang	seluruh	besar	NA	tingkat tinggi	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur	
25	49431	angketan harmonisasi untuk barang umum	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Gubernur	
26	52221	aktivitas pelayanan kependudukan dan kependudukan	seluruh, kecuali pengurusan penduduk melalui perizinan	seluruh	seluruh	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota	
27	52298	aktivitas raky mandiri	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	lingkup operasionalnya dalam satu provinsi	Gubernur	
28	50135	angketan laot dalam negeri pengurusan raky	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. lntas perubahan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, 2. lntas perubahan dalam kabupaten/ kota	1. Gubernur, 2. Bupati/ Wali kota	
29	42914	pengurusan	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota	
30	43120	pengurusan laot	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota	

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

22	50132	angketan laot perizinan perubahan dalam negeri untuk barang	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	3 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya dalam perubahan wilayah kabupaten/kota/provinsi	Gubernur
23	49421	angketan laot	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya meliputi perubahan wilayah kabupaten/kota/provinsi	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota
24	50217	angketan pemberdayaan perizinan antar kabupaten/ kota untuk penampang	seluruh	besar	NA	tingkat tinggi	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
25	49431	angketan harmonisasi untuk barang umum	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Gubernur
26	52221	aktivitas pelayanan kependudukan dan kependudukan	seluruh, kecuali pengurusan penduduk melalui perizinan	seluruh	seluruh	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota
27	52298	aktivitas raky mandiri	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	lingkup operasionalnya dalam satu provinsi	Gubernur
28	50135	angketan laot dalam negeri pengurusan raky	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. lntas perubahan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, 2. lntas perubahan dalam kabupaten/ kota	1. Gubernur, 2. Bupati/ Wali kota
29	42914	pengurusan	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota
30	43120	pengurusan laot	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota
31	50223	angketan laot dan izin untuk barang berbahaya	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota
32	49213	angketan laot antar kota dalam provinsi AKDP	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya antar kota dalam provinsi	Gubernur
33	49412	angketan antarkota dalam provinsi AKDP bukan bus, dalam trayek	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya antar kota dalam provinsi	Gubernur
34	49429	angketan darat lntas untuk penampang	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya antar provinsi, dalam provinsi, kabupaten/ kota	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota
35	50226	angketan penyebrangan lntas antar kabupaten/ kota untuk barang	seluruh	besar	seluruh	tingkat tinggi	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya dalam satu provinsi	Gubernur
36	50114	angketan laot dalam negeri perizinan untuk penampang	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	3 hari	selama berlaku	lntas perubahan antarprovinsi dan internasional, lntas perubahan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lntas perubahan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota
37	50131	angketan laot dalam negeri untuk barang umum	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	3 hari	selama berlaku	lntas perubahan antarprovinsi dan internasional, lntas perubahan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lntas perubahan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota
38	50134	angketan laot dalam negeri perizinan untuk barang	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	3 hari	selama berlaku	lntas perubahan antarprovinsi dan internasional, lntas perubahan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lntas perubahan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota
39	52109	pengelolaan dan pengurusan lntas	seluruh	seluruh	seluruh	tingkat tinggi	3 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya dalam satu provinsi	Gubernur
40	50227	angketan penyebrangan perizinan antar kabupaten/ kota untuk barang	seluruh	besar	NA	tingkat tinggi	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

22	50132	angketan laot perizinan perubahan dalam negeri untuk barang	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	3 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya dalam perubahan wilayah kabupaten/kota/provinsi	Gubernur
23	49421	angketan laot	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya meliputi perubahan wilayah kabupaten/kota/provinsi	Menrist, Gubernur, Bupati/ Wali kota
24	50217	angketan pemberdayaan perizinan antar kabupaten/ kota untuk penampang	seluruh	besar	NA	tingkat tinggi	7 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
25	49431	angketan harmonisasi untuk barang umum	seluruh	seluruh	NA	tingkat tinggi	5 hari	selama berlaku	lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Gubernur
26	52221	aktivitas pelayanan kependudukan dan kependudukan	seluruh, kecuali pengurusan penduduk melalui perizinan	seluruh	seluruh	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota
27	52298	aktivitas raky mandiri	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	lingkup operasionalnya dalam satu provinsi	Gubernur
28	50135	angketan laot dalam negeri pengurusan raky	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. lntas perubahan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, 2. lntas perubahan dalam kabupaten/ kota	1. Gubernur, 2. Bupati/ Wali kota
29	42914	pengurusan	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota
30	43120	pengurusan laot	seluruh	seluruh	NA	tingkat rendah	NA	selama berlaku	1. hierarki perubahan status dan pelayanan kependudukan, 2. hierarki pelayanan kependudukan regional, 3. hierarki pelayanan kependudukan kabupaten/kota	1. Menteri, 2. Gubernur, 3. Bupati/ Wali kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

H1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

Tetap

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	84127	3 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	lingkup operasionalnya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan/ atau desa, jalan kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
2	izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	42103	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
3	izin operasi prasarana perkeretaapian umum	42103	44 hari	sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
4	izin operasi sarana perkeretaapian umum	49110, 49120, 49441	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
5	izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442, 49450	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
6	izin operasi perkeretaapian khusus	49442, 49450	30 hari	selama badan usaha penyelenggaraan perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
7	pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	49450	30 hari	selama badan usaha penyelenggaraan perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
8	peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, dan/ atau fasilitas operasi kereta api; dan/ atau menambah jumlah rangkaian kereta api)	49450	60 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
9	sertifikat standar pembukaan kantor cabang Stupal (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	5 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
10	sertifikat standar pembukaan kantor cabang Stupal (risiko menengah tinggi)	50131, 50134	5 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
1	persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	84127	3 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	lingkup operasionalnya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan/ atau desa, jalan kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
2	izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	42103	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
3	izin operasi prasarana perkeretaapian umum	42103	44 hari	sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
4	izin operasi sarana perkeretaapian umum	49110, 49120, 49441	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
5	izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442, 49450	30 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
6	izin operasi perkeretaapian khusus	49442, 49450	30 hari	selama badan usaha penyelenggaraan perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
7	pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	49450	30 hari	selama badan usaha penyelenggaraan perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
8	peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, dan/ atau fasilitas operasi kereta api; dan/ atau menambah jumlah rangkaian)	49450	60 hari	5 tahun	lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
11	sertifikat standar perubahan data siupal/ siopsus (risiko menengah rendah)	50111, 50114	1 hari	selama tidak terjadi perubahan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
12	sertifikat standar perubahan data siupal/ siopsus (risiko menengah rendah)	50131, 50134	1 hari	selama tidak terjadi perubahan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
13	sertifikat standar pemutakhiran siupal/ siopsus (risiko menengah rendah)	50111, 50114	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
14	sertifikat standar pemutakhiran siupal/ siopsus (risiko menengah rendah)	50131, 50134	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
15	sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (risiko menengah rendah)	52240	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
16	sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (risiko menengah rendah)	52291	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
17	sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (risiko menengah rendah)	52109	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
18	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (risiko menengah rendah)	52298	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
19	sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (risiko menengah rendah)	50112	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
20	sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (risiko menengah rendah)	50132	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
21	sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	provinsi	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
9	sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	5 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
10	sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (risiko menengah tinggi)	50131, 50134	5 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
11	sertifikat standar perubahan data siupal/ siopsus (risiko menengah rendah)	50111, 50114	1 hari	selama tidak terjadi perubahan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
12	sertifikat standar perubahan data siupal/ siopsus (risiko menengah rendah)	50131, 50134	1 hari	selama tidak terjadi perubahan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
13	sertifikat standar pemutakhiran siupal/ siopsus (risiko menengah rendah)	50111, 50114	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
22	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52240 52291 52109 52298 50112 50132	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	provinsi	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
23	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	nasional, provinsi	Menteri, Gubernur.

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
24	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	nasional, provinsi	Menteri, Gubernur.

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
25	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	nasional, provinsi	Menteri, Gubernur.

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
14	sertifikat standar pemutakhiran sipul/ siopsus (risiko menengah rendah)	50131, 50134	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
15	sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (risiko menengah rendah)	52240	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
16	sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (risiko menengah rendah)	52291	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
17	sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti kemas (risiko menengah rendah)	52109	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
18	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (risiko menengah rendah)	52298	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
19	sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (risiko menengah rendah)	50112	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur
20	sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (risiko menengah rendah)	50132	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
26	registrasi penutupan kantor pusat/ cabang : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52240 5229r 52r09 52298 50112 50132	1 hari		provinsi	Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
27	registrasi penutupan kantor pusat/ cabang : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari		nasional, provinsi	Menteri, Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
28	registrasi penutupan kantor pusat/ cabang : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari		nasional, provinsi	Menteri, Gubernur

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
29	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	3 hari	1 tahun	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
21	sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	provinsi	Gubernur
22	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52240 52291 52 109 52298 50112 50132	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	provinsi	Gubernur
23	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	nasional, provinsi	Menteri, Gubernur.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
30	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (risiko menengah tinggi)	50131, 50134	3 hari	1 tahun	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
31	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
32	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (risiko menengah tinggi)	50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
33	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114, 50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
34	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114, 50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
35	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	3 hari	6 bulan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
24	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	nasional, provinsi	Menteri, Gubernur.
25	sertifikat standar pemutakhiran 2 tahunan : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	nasional, provinsi	Menteri, Gubernur.

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
26	registrasi penutupan kantor pusat/ cabang : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52240 5229r 52r09 52298 50112 50132	1 hari		provinsi	Gubernur
27	registrasi penutupan kantor pusat/ cabang : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari		nasional, provinsi	Menteri, Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
36	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (risiko menengah tinggi)	50131	3 hari	6 bulan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
37	Izin pembangunan / pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 hari	2 tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
38	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 hari	selama masa konsesi	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
39	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko	52221	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
28	registrasi penutupan kantor pusat/ cabang : 1. perusahaan bongkar muat; 2. jasa pengurusan transportasi; 3. depo peti kemas; 4. tally mandiri; 5. angkutan perairan pelabuhan; 6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. perawatan dan perbaikan kapal; 8. pengelolaan kapal; atau 9. keagenan kapal; 10. perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (risiko menengah rendah)	52229	1 hari		nasional, provinsi	Menteri, Gubernur
29	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	3 hari	1 tahun	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
30	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (risiko menengah tinggi)	50131, 50134	3 hari	1 tahun	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
31	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal onisi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
40	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan ro-ro (Risiko Menengah Tinggi)	52221	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
41	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914, 43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
42	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
43	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
44	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	42914, 43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
45	Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 hari	5 tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
46	sertifikat standar pengoperasian terminal khusus/ TUKS (risiko menengah tinggi)	43210	3 hari	paling lama 5 tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
47	sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan terminal khusus/ TUKS (risiko menengah tinggi)	43210	10 hari	paling lama 2 (dua) tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
48	sertifikat standar perpanjangan pengoperasian terminal khusus/ TUKS (risiko menengah rendah)	43210	1 hari	paling lama 5 (lima) tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
49	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 hari	paling lama 5 (lima) tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
32	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (risiko menengah tinggi)	50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
33	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114, 50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
34	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114, 50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
35	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	3 hari	6 bulan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
36	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (risiko menengah tinggi)	50131	3 hari	6 bulan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
37	Izin pembangunan / peragamaan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	13 hari	2 tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
38	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 hari	selama masa konsesi	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
39	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	52221	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
40	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, bendaraman, dan ro-ro (Risiko Menengah Tinggi)	52221	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
41	Izin kegiatan kerja keruk dan penyisipan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914, 43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
42	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
32	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (risiko menengah tinggi)	50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
33	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114, 50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
34	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (risiko menengah tinggi)	50111, 50114, 50131, 50134	3 hari	1 kali voyage	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
35	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (risiko menengah tinggi)	50111, 50114	3 hari	6 bulan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
36	sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/ tramper khusus (risiko menengah tinggi)	50131	3 hari	6 bulan	lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/ kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Menteri, Gubernur, Bupati/ Wali kota
37	Izin pembangunan / peragamaan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	13 hari	2 tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
38	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 hari	selama masa konsesi	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
39	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)	52221	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
40	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, bendaraman, dan ro-ro (Risiko Menengah Tinggi)	52221	7 hari	selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
41	Izin kegiatan kerja keruk dan penyisipan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914, 43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
42	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI TERKAIT	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH	
					PARAMETER	KEWENANGAN
43	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
44	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	42914, 43210	7 hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
45	Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 hari	5 tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
46	Sertifikat standar pengoperasian terminal khusus/ TUKS (risiko menengah tinggi)	43210	3 hari	paling lama 5 tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
47	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/ pengembangan terminal khusus/ TUKS (risiko menengah tinggi)	43210	10 hari	paling lama 2 (dua) tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
48	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian terminal khusus/ TUKS (risiko menengah rendah)	43210	1 hari	paling lama 5 (lima) tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan
49	Sertifikat standar penyelesaian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 hari	paling lama 5 (lima) tahun	hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Wali kota sesuai dengan kewenangan

I. PERIZINAN BERUSAHA RISIKO SUBSEKTOR KESEHATAN

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
2	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Usaha kecil obat tradisional	Usaha Kecil dan Menengah	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 hari	5 Tahun	Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan	Gubernur
3	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas utama	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 hari	5 Tahun	Provinsi	Gubernur
			Laboratorium medis kelas pratama	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 hari	5 Tahun	Provinsi	Gubernur

Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
				Skala Usaha	Luas Lahan						
5	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas B	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 Tahun	Kemampuan Layanan	Gubernur
19	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	Pedagang besar farmasi cabang	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 hari	5 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi	Gubernur
21	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia	Cabang distributor alat kesehatan	Seluruh	NA	Menegah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 hari	5 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
				Skala Usaha	Luas Lahan						
25	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	Pedagang besar farmasi cabang	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 hari	Maksimal 5 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi	Gubernur
29	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rumah sakit swasta kelas B	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 hari	5 Tahun	Kemampuan Layanan	Gubernur
46	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	Pedagang besar obat tradisional	Seluruh	NA	Menegah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 hari	5 Tahun	Cakupan distribusi ke pedagang eceran	Gubernur
47	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk manusia	Pedagang besar kosmetika	Seluruh	NA	Menegah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 hari	5 Tahun	Cakupan distribusi ke pedagang eceran	Gubernur

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>																														
<p>II. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SUBSEKTOR KESEHATAN</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Perizinan Berusaha</th> <th rowspan="2">Kode KBLI Terkait</th> <th rowspan="2">Jangka Waktu</th> <th rowspan="2">Masa Berlaku</th> <th colspan="2">Kewenangan Pemerintah</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>Kewenangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38</td> <td>Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)</td> <td>86101 86903</td> <td>25 Hari</td> <td>5 Tahun</td> <td>Kemampuan Pelayanan</td> <td>Gubernur</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama</td> <td>86 104 86 105</td> <td>28 Hari</td> <td>5 Tahun</td> <td>Pelayanan</td> <td>Gubernur</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit</td> <td>86101 86 103</td> <td>28 Hari</td> <td>5 Tahun</td> <td>Pelayanan</td> <td>Gubernur</td> </tr> </tbody> </table>	No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah		Parameter	Kewenangan	38	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101 86903	25 Hari	5 Tahun	Kemampuan Pelayanan	Gubernur	42	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama	86 104 86 105	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan	Gubernur	43	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit	86101 86 103	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan	Gubernur	<p>Tetap</p>	
No						Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah																						
	Parameter	Kewenangan																														
38	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101 86903	25 Hari	5 Tahun	Kemampuan Pelayanan	Gubernur																										
42	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di klinik utama	86 104 86 105	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan	Gubernur																										
43	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit	86101 86 103	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan	Gubernur																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Perizinan Berusaha</th> <th rowspan="2">Kode KBLI Terkait</th> <th rowspan="2">Jangka Waktu</th> <th rowspan="2">Masa Berlaku</th> <th colspan="2">Kewenangan Pemerintah</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>Kewenangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51</td> <td>Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan</td> <td>46691</td> <td>30 Hari</td> <td>5 Tahun</td> <td>Wilayah cakupan usaha di Provinsi.</td> <td>Gubernur</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT</td> <td>21015 32501 17091 32909 20231</td> <td>7 Hari</td> <td>5 Tahun</td> <td>Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi.</td> <td>Gubernur</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik</td> <td>47725</td> <td>7 Hari</td> <td>5 Tahun</td> <td>Penjualan eceran, jenis produk tertentu, dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi.</td> <td>Gubernur</td> </tr> </tbody> </table>	No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah		Parameter	Kewenangan	51	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan	46691	30 Hari	5 Tahun	Wilayah cakupan usaha di Provinsi.	Gubernur	58	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	21015 32501 17091 32909 20231	7 Hari	5 Tahun	Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi.	Gubernur	59	Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik	47725	7 Hari	5 Tahun	Penjualan eceran, jenis produk tertentu, dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi.	Gubernur		
No						Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah																						
	Parameter	Kewenangan																														
51	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan	46691	30 Hari	5 Tahun	Wilayah cakupan usaha di Provinsi.	Gubernur																										
58	Sertifikat standar penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	21015 32501 17091 32909 20231	7 Hari	5 Tahun	Teknologi dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi.	Gubernur																										
59	Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik	47725	7 Hari	5 Tahun	Penjualan eceran, jenis produk tertentu, dan cakupan distribusi dalam satu Provinsi.	Gubernur																										

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
---	---	---

12. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tetap	
--	-------	--

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
	NIHIL										

13. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tetap	
---	-------	--

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Kewenangan
	NIHIL					

J. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA	J. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA	
--	--	--

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
71	93222	Pengelolaan Goa	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
72	49442	Angkutan Jalan Wisata Rel	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata makam di Sumatera Barat, kereta wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambowara Jawa Tengah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
73	50113	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata	Usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operasinya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
74	50122	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	Usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operasinya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
71	93222	Pengelolaan Goa	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
72	49442	Angkutan Jalan Wisata Rel	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata makam di Sumatera Barat, kereta wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambowara Jawa Tengah	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
73	50113	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata	Usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operasinya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
74	50122	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	Usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operasinya.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
75	50213	Angkutan Stasiun dan Danau untuk Wisata dan YBDI	Usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
76	55193	Vila (bintang 2 dan 3)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disediakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
77	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 -200 unit	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
75	50213	Angkutan Stasiun dan Danau untuk Wisata dan YBDI	Usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	Menengah dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
76	55193	Vila (bintang 2 dan 3)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disediakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
77	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 -200 unit	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
78	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang diselenggarakan melalui pesan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan siap diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/ peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/ kegiatan acara berlangsung.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
79	56301	Bar	Usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.	Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
78	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang diselenggarakan melalui pesan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan siap diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/ peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/ kegiatan acara berlangsung.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
79	56301	Bar	Usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.	Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Tingkat Risiko	Parameter				Kewenangan	
80	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Tingkat Risiko	Parameter				Kewenangan	
80	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Tingkat Risiko	Parameter				Kewenangan	
81	55120 55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidak tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melalui yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. 55110: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000 < 10.000 meter ²	Menengah B Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
82	55194	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit: 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menyediakan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartel/ kondotel)	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000 < 10.000 meter ²	Menengah B Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Tingkat Risiko	Parameter				Kewenangan	
81	55120 55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidak tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melalui yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. 55110: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000 < 10.000 meter ²	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	30 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
82	55194	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit: 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menyediakan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartel/ kondotel)	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000 < 10.000 meter ²	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
83	93223	Wisata Petualangan Alam	Usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan penerahan tenaga fisik, seperti panayang, parashot, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, off road, dan mountain biking.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
84	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makanan minuman	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama dimana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan dilirigi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.	Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
85	93113	Fasilitas Gelanggang / Arena	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti pengelolaan gelanggang / arena renang, bowling, billar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin pengelolaan gelanggang / arena paragliding, hang gliding sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang / arena lainnya.	Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
86	93291	Klub Malam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan dilirigi musik, atraksi pertunjukan lampu, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Menyediakan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
87	93293	Usaha Arena Permainan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timzone, Kidnesia	Menyediakan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
88	93294	Diskotek	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
83	93223	Wisata Petualangan Alam	Usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan penerahan tenaga fisik, seperti panayang, parashot, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, off road, dan mountain biking.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
84	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan makanan minuman	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama dimana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan dilirigi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.	Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
85	93113	Fasilitas Gelanggang / Arena	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti pengelolaan gelanggang / arena renang, bowling, billar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin pengelolaan gelanggang / arena paragliding, hang gliding sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang / arena lainnya.	Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
86	93291	Klub Malam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan dilirigi musik, atraksi pertunjukan lampu, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Menyediakan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
87	93293	Usaha Arena Permainan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timzone, Kidnesia	Menyediakan skala usaha dalam standar usaha	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
88	93294	Diskotek	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
89	93241	Arung Jeram	Usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sumber-sumber arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Luar Citarik. Termasuk rafting, tubing, riverboarding, canoeing, kayaking, dan body rafting experience	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLU	Judul KBLU	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
89	93241	Arung Jeram	Usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram Sobek, Bali, Arung Jeram Arus Liar Cibirik. Termasuk rafting, tubing, riverboarding, canoeing, kayaking, dan body rafting experience	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
90	93242	Wisata Selam	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan perijinan dan perijinan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional, dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung kelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walking.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLU	Judul KBLU	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
91	93243	Wisata Memancing	Usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing Guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (salt water fishing) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (sport fishing)	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
92	93246	Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, parasayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional / naga	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLU	Judul KBLU	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
90	93242	Wisata Selam	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan perijinan dan perijinan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional, dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung kelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walking.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLU	Judul KBLU	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
91	93243	Wisata Memancing	Usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing Guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (salt water fishing) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (sport fishing)	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
92	93246	Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, parasayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional / naga	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLU	Judul KBLU	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
90	93242	Wisata Selam	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan perijinan dan perijinan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional, dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung kelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walking.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
91	93243	Wisata Memancing	Usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing Guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (salt water fishing) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (sport fishing)	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	20	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
92	93246	Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, parasayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional / naga	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Laban	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
93		Wisata Dayung	tradisional / dengan boat race, berpertandingan dengan perahu/ kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience), dan flyng board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menyesuaikan penjelasan KBLI	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
94	93249	Wisata Olah Raga Minat Khusus	Wisata Tirta Lainnya yang belum tercover di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
95	93249	Wisata Tirta Lainnya	Wisata Tirta Lainnya yang belum tercover di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Laban	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
90	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aquas)	Usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan, dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

J1. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Laban	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan

J2. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Kewenangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Laban	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
93		Wisata Dayung	tradisional / dengan boat race, berpertandingan dengan perahu/ kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience), dan flyng board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menyesuaikan penjelasan KBLI	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
94	93249	Wisata Olah Raga Minat Khusus	Wisata Tirta Lainnya yang belum tercover di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
95	93249	Wisata Tirta Lainnya	Wisata Tirta Lainnya yang belum tercover di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Laban	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
90	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aquas)	Usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan, dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Tetap

Tetap

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Laban	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
93		Wisata Dayung	tradisional / dengan boat race, berpertandingan dengan perahu/ kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience), dan flyng board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menyesuaikan penjelasan KBLI	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
94	93249	Wisata Olah Raga Minat Khusus	Wisata Tirta Lainnya yang belum tercover di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur
95	93249	Wisata Tirta Lainnya	Wisata Tirta Lainnya yang belum tercover di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko	Luas Laban	Tingkat Risiko				Parameter	Kewenangan
90	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aquas)	Usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan, dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur

Tetap

Tetap

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>																																														
<p>K. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKOKBLI SEKTOR KETENAGAKERJAAN</p> <table border="1" data-bbox="96 435 1047 570"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th colspan="3">Bidang Usaha</th> <th colspan="3">Risiko</th> <th rowspan="2">Perizinan Berusaha</th> <th rowspan="2">Jangka Waktu</th> <th rowspan="2">Masa Berlaku</th> <th colspan="2">Kewenangan Pemerintah</th> </tr> <tr> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Ruang Lingkup Kegiatan</th> <th>Skala Usaha</th> <th>Luas Lahan</th> <th>Tingkat Resiko</th> <th>Parameter</th> <th>Kewenangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> </tr> </tbody> </table>	No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Resiko	Parameter	Kewenangan		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	<p>Tetap</p>															
No		Bidang Usaha			Risiko						Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah																																		
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Resiko	Parameter	Kewenangan																																								
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL																																					
<p>K1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN</p> <table border="1" data-bbox="96 675 1047 993"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Perizinan Berusaha</th> <th rowspan="2">Kode KBLI Terkait</th> <th rowspan="2">Jangka Waktu</th> <th rowspan="2">Masa Berlaku</th> <th colspan="2">Kewenangan Pemerintah</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>Kewenangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator / Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja</td> <td>Seluruh</td> <td>5 Hari</td> <td>1 tahun (Pesawat Tenaga dan Produksi, Elevator, Eskalator dan Lingkungan Kerja)</td> <td>Provinsi</td> <td>Gubernur</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia</td> <td>78102</td> <td>5 Hari</td> <td>Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha</td> <td>Provinsi</td> <td>Gubernur</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;"><u>ADI BAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p> <p style="text-align: center;">HAMENGGU BUWONO X</p>	No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah		Parameter	Kewenangan	1	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator / Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja	Seluruh	5 Hari	1 tahun (Pesawat Tenaga dan Produksi, Elevator, Eskalator dan Lingkungan Kerja)	Provinsi	Gubernur	2	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur	<p>K1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN</p> <table border="1" data-bbox="1081 675 2051 993"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Perizinan Berusaha</th> <th rowspan="2">Kode KBLI Terkait</th> <th rowspan="2">Jangka Waktu</th> <th rowspan="2">Masa Berlaku</th> <th colspan="2">Kewenangan Pemerintah</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>Kewenangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator / Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja</td> <td>Seluruh</td> <td>7 Hari</td> <td>1 tahun (Pesawat Tenaga dan Produksi, Elevator, Eskalator dan Lingkungan Kerja)</td> <td>Provinsi</td> <td>Gubernur</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia</td> <td>78102</td> <td>5 Hari</td> <td>Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha</td> <td>Provinsi</td> <td>Gubernur</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;"><u>ADI BAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p> <p style="text-align: center;">HAMENGGU BUWONO X</p>	No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah		Parameter	Kewenangan	1	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator / Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja	Seluruh	7 Hari	1 tahun (Pesawat Tenaga dan Produksi, Elevator, Eskalator dan Lingkungan Kerja)	Provinsi	Gubernur	2	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur	
No						Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah																																						
	Parameter	Kewenangan																																														
1	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator / Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja	Seluruh	5 Hari	1 tahun (Pesawat Tenaga dan Produksi, Elevator, Eskalator dan Lingkungan Kerja)	Provinsi	Gubernur																																										
2	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur																																										
No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah																																											
					Parameter	Kewenangan																																										
1	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator / Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja	Seluruh	7 Hari	1 tahun (Pesawat Tenaga dan Produksi, Elevator, Eskalator dan Lingkungan Kerja)	Provinsi	Gubernur																																										
2	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi	Gubernur																																										
<p>LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</p>	<p>LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN</p>	<p>LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>																																														
<p>JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN</p>	<p>JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN</p>	<p>JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN</p>																																														

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan			Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan			Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan		
NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI	NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN	NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
1.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Nasional b. Izin Pengumpulan Uang atau Barang c. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah d. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial e. Perpanjangan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial f. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing g. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing 	1.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Nasional b. Izin Pengumpulan Uang atau Barang c. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah d. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial e. Perpanjangan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial f. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing g. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing 	1.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Nasional b. Izin Pengumpulan Uang atau Barang c. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah d. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial e. Perpanjangan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial f. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing g. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dispensasi Jalan b. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan di Ruang Pengawasan Jalan Provinsi c. Izin Pengubahan/Pembongkaran Jaringan Irigasi d. Izin Peningkatan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi e. Rekomendasi Pemanfaatan Lahan yang Berbatasan dengan Garis Sempadan Jaringan Irigasi f. Izin pembangunan/penempatan media informasi/iklan di jalan provinsi untuk kegiatan non berusaha g. Izin pembangunan/penempatan bangun bangunan di jalan provinsi untuk kegiatan non berusaha h. Izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas di jalan provinsi untuk kegiatan non berusaha i. Izin pembangunan/penempatan bangun bangunan di dalam ruang milik jalan provinsi untuk kegiatan non berusaha 	2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dispensasi Jalan b. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan di Ruang Pengawasan Jalan Provinsi c. Izin Pengubahan/Pembongkaran Jaringan Irigasi d. Izin Peningkatan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi e. Rekomendasi Pemanfaatan Lahan yang Berbatasan dengan Garis Sempadan Jaringan Irigasi f. Izin Pembangunan/Penempatan Media Informasi/Iklan Di Jalan Provinsi Untuk Kegiatan Non Berusaha g. Izin Pembangunan/Penempatan Bangun Bangunan di Jalan Provinsi Untuk Kegiatan Non Berusaha 	2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dispensasi Jalan b. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan di Ruang Pengawasan Jalan Provinsi c. Izin Pengubahan /Pembongkaran Jaringan Irigasi d. Izin Penutupan Saluran Irigasi e. Izin Pemanfaatan/Peningkatan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi f. Rekomendasi Pemanfaatan Lahan yang Berbatasan dengan Garis Sempadan Jaringan Irigasi g. Izin Pemanfaatan Embung dan Sempadan Embung h. Izin Pembangunan/Penempatan Media Informasi/Iklan di Jalan Provinsi untuk Kegiatan Non Berusaha i. Izin Pembangunan/Penempatan Bangun

		<ul style="list-style-type: none"> j. Persetujuan Penanaman Pohon di jalan provinsi k. Persetujuan Penebangan Pohon di jalan provinsi l. Lisensi Arsitek 	NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN	NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
3.	Energi Sumber Daya Mineral	Surat Izin Juru Bor (SIJB)			<ul style="list-style-type: none"> h. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Jalan Provinsi Untuk Kegiatan Non Berusaha i. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi j. Izin Penanaman Pohon di Bagian-Bagian Jalan Provinsi k. Izin Penebangan Pohon di Bagian-Bagian Jalan Provinsi l. Lisensi Arsitek m. Surat Keterangan Sewa Untuk Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi 			<ul style="list-style-type: none"> Bangunan di Jalan Provinsi untuk Kegiatan Non Berusaha j. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas di Jalan Provinsi untuk Kegiatan Non Berusaha k. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pada Bagian-Bagian Jalan Provinsi l. Izin Penanaman Pohon di Bagian-Bagian Jalan Provinsi m. Izin Penebangan Pohon di Bagian-Bagian Jalan Provinsi n. Lisensi Arsitek o. Surat Keterangan Sewa Untuk Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi
4.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) b. Izin Penambahan dan/atau Perubahan Bidang/Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) c. Izin Perubahan Nama dan/atau Bentuk dari Satuan Pendidikan Menengah tertentu menjadi nama dan/atau Bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang lain d. Izin Pindah Lokasi Satuan Pendidikan Menengah e. Izin Alih Kelola Satuan Pendidikan Menengah f. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa g. Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 	3.	Energi Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Juru Bor (SIJB) b. Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (LUPTS) c. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan f. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) g. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) 	3.	Energi Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (LUPTS) b. Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Non Berusaha c. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu f. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan g. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) h. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) i. Persetujuan Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi; j. Persetujuan Pembatalan Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi; k. Persetujuan Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi l. Persetujuan Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Tahap Produksi m. Persetujuan Pengakhiran Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) n. Persetujuan Pengakhiran IPR
5.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Membawa Warisan Budaya dan Cagar Budaya ke Luar DIY b. Izin Memindahkan dan Memisahkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya c. Izin Perbanyakkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya d. Izin Pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya e. Izin Penelitian Warisan Budaya dan Cagar Budaya f. Izin Adaptasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya g. Izin Revitalisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya h. Izin Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya 	4.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) b. Izin Penambahan dan/atau Perubahan Bidang/Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) c. Izin Perubahan Nama dan/atau Bentuk dari Satuan Pendidikan Menengah Tertentu Menjadi Nama dan/atau Bentuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Lain d. Izin Penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Menengah menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah Baru e. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah/Pencabutan f. Izin Pindah Lokasi Satuan Pendidikan Menengah g. Izin Alih Kelola Satuan Pendidikan Menengah h. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa 			
6.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) tidak untuk kegiatan berusaha h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) tidak untuk kegiatan berusaha 						

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
7.	Kesehatan	a. Rekomendasi Penetapan Izin Klinik Calon Tenaga Kerja Indonesia b. Persetujuan Pergantian Apoteker PBF Cabang c. Persetujuan Penggantian Kepala PBF Cabang
8.	Perdagangan	a. Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) b. Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol c. Rekomendasi Wilayah Pemasaran Distributor Minuman Beralkohol
9.	Koperasi	a. Izin Koperasi Simpan Pinjam b. Izin Pembukaan Kantor Cabang c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu d. Izin Pembukaan Kantor Kas
10.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Surat Keterangan Penelitian
11.	Pertanahan dan Tata Ruang	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan non Berusaha
12.	Transportasi	Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
		i. Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
5.	Kebudayaan	a. Izin Membawa Warisan Budaya dan Cagar Budaya ke Luar DIY b. Izin Memindahkan dan Memisahkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya c. Izin Perbanyak Warisan Budaya dan Cagar Budaya d. Izin Pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya e. Izin Penelitian Warisan Budaya dan Cagar Budaya f. Izin Adaptasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya g. Izin Revitalisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya j. Izin Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
6.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Untuk Kegiatan Non Berusaha b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Untuk Kegiatan Berusaha c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Untuk Kegiatan Non Berusaha d. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) e. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
7.	Kesehatan	a. Rekomendasi Penetapan Izin Klinik Calon Tenaga Kerja Indonesia b. Penyediaan Alat Kesehatan
8.	Perdagangan	a. Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) b. Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol c. Rekomendasi Wilayah Pemasaran Distributor Minuman Beralkohol
9.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Surat Keterangan Penelitian
10.	Pertanahan dan Tata Ruang	a. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) b. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
		o. Persetujuan Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan p. Persetujuan Pengakhiran IUP untuk Pengangkutan dan Penjualan. q. Pengakhiran Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIJP)
4.	Pendidikan	a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) b. Izin Penambahan dan/atau Perubahan Bidang/Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) c. Izin Perubahan Nama dan/atau Bentuk dari Satuan Pendidikan Menengah Tertentu Menjadi Nama dan/atau Bentuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Lain d. Izin Penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Menengah menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah Baru e. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah/Pencabutan f. Izin Pindah Lokasi Satuan Pendidikan Menengah g. Izin Alih Kelola Satuan Pendidikan Menengah h. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa i. Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
5.	Kebudayaan	a. Izin Membawa Warisan Budaya dan Cagar Budaya ke Luar DIY b. Izin Memindahkan dan Memisahkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya c. Izin Perbanyak Warisan Budaya dan Cagar Budaya d. Izin Pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya e. Izin Penelitian Warisan Budaya dan Cagar Budaya f. Izin Adaptasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya g. Izin Revitalisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya

	NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
	10.	Pertanahan dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha b. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Penerbitan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral Logam c. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam d. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan
	11.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan b. Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas c. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas
	12.	Perikanan dan Kelautan	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
<p data-bbox="1609 1044 2045 1114">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p data-bbox="1805 1161 1849 1189">ttd.</p> <p data-bbox="1675 1235 1982 1264">HAMENGGU BUWONO X</p>			
	NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN
			h. Izin Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
	6.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) untuk Kegiatan Non Berusaha b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) untuk Kegiatan Berusaha c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan Non Berusaha d. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) e. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
	7.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Penetapan Izin Klinik Calon Tenaga Kerja Indonesia b. Penyedia Alat Kesehatan
	8.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) b. Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol c. Rekomendasi Wilayah Pemasaran Distributor Minuman Beralkohol
	9.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Surat Keterangan Penelitian
	10.	Pertanahan dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) b. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha d. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam e. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam f. Rekomendasi Tata Ruang Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan
	11.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan b. Rekomendasi Teknis Penanganan

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan</p>									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="2091 370 2169 431">NO.</th> <th data-bbox="2169 370 2449 431">BIDANG/SEKTOR</th> <th data-bbox="2449 370 3030 431">JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="2091 431 2169 526"></td> <td data-bbox="2169 431 2449 526"></td> <td data-bbox="2449 431 3030 526">Dampak Lalu Lintas c. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="2091 526 2169 592">12.</td> <td data-bbox="2169 526 2449 592">Perikanan dan Kelautan</td> <td data-bbox="2449 526 3030 592">Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p> <p style="text-align: center;">Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. <u>ADI BAYU KRISTANTO</u> NIP. 19720711 199703 1 006</p>	NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN			Dampak Lalu Lintas c. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas	12.	Perikanan dan Kelautan	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
NO.	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI DAN NON PERIZINAN									
		Dampak Lalu Lintas c. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas									
12.	Perikanan dan Kelautan	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan									